



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Pendidikan Tinggi, Kemarin, Kini, dan Esok

ISBN

978-602-9290-37-0

E-ISBN

978-602-9290-38-7 (PDF)

Penerbit

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI

KATALOG DALAM TERBITAN

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Pendidikan Tinggi: kemarin, kini dan esok/M. Fasha Rouf (Ed.). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2020. ix, 108 hlm.: ill. ; 24 cm

Pelindung

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.

Pembina

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P.

Penanggung jawab

Didi Rustam

Yayat Hendayana

Penyunting Naskah

M. Fasha Rouf

Penulis

Dinna Handini, Doddy Zulkifli Indra Atmaja, Firman Hidayat, Neni Herlina, Yayat Hendayana, Tito Edy Priandono, Ester Napitupulu, Irwandi Maek, Suwitno, Joko Santosa, M. Taufik, Satya Herlina, M.S. Fajri, Angga Kusuma, Purwadi

Sumber Data

Franova Herdiyanto, Abdul Naser Rafi'i Attamimi, Anggi Dwi Ayuningtyas, Dina Alif Vatul

Layout dan Grafis

Youngest Arsyani Akmad, Indra Poltak, M. Abdul Rachman, Gozali

Distribusi

Mayong Krisna Dhani, Alvin Eka Priyadi, Dwi Rustandi

Sekretariat

Andriansyah, Annisa Prajna, Karina Ayu, Sumaryanto

Alamat Redaksi

Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Gedung D, Lt.8, Jl. Jenderal Sudirman,
Pintu 1 Senayan, Jakarta

© Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2021

Kata Pengantar

Pembangunan pendidikan tinggi akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat jika mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil yang dibutuhkan masyarakat, dunia usaha/industri, serta bangsa dan negara. Upaya tiada henti dalam membangun pendidikan tinggi di Indonesia terus dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, mutu dan relevansi pendidikan tinggi, mutu dosen dan tenaga kependidikan, serta sistem dan tata kelola kelembagaan yang menerapkan *good governance*.

Dari tahun ke tahun, terlihat kebijakan dan inovasi program yang dilakukan Ditjen Dikti memberikan peningkatan dan hasil kerja yang baik untuk mendukung penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter, terampil, dan berdaya saing. Pendidikan tinggi semakin menjangkau semua lapisan masyarakat dan menyumbangkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja sebagai profesional maupun wirausaha. Layanan pendidikan tinggi bermutu dan relevan semakin jadi komitmen dengan kinerja perguruan tinggi yang juga terus menggembirakan. Peningkatan mutu dosen yang tergambar dari kualifikasi pendidikan doktor yang terus bertambah serta kinerja penelitian dan pengembangan yang menghasilkan publikasi ilmiah terindeks hingga inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan bangsa.

Melalui buku ini, perkembangan pembangunan pendidikan tinggi setidaknya dalam lima tahun terakhir hingga tahun 2020, disajikan dengan data-data yang penting untuk dicermati bersama. Buku ini berupaya mengkomunikasikan data statistik pendidikan tinggi dengan merangkum pencapaian pada indikator input, proses, *output*, dan *outcome* pendidikan tinggi hingga tahun 2020, secara ringkas dan sederhana. Perguruan tinggi tak sekadar meluluskan mahasiswa, namun memastikan dapat memasuki dunia kerja dalam waktu dan pendapatan yang terukur, serta perguruan tinggi mampu berkontribusi lewat penelitian yang menjadi pendukung hadirnya banyak inovasi untuk bangsa.

Pencapaian memang terus menggembirakan dalam perjalanan untuk memperkuat mutu dan layanan pendidikan tinggi yang terkait dosen, mahasiswa, hingga kelembagaan perguruan tinggi dan program studi. Namun, tantangan masih terus ada untuk memastikan bahwa pencapaian kuantitas juga harus selaras dengan kualitas yang meningkat tiap tahunnya. Dengan demikian, perkembangan berbagai data kuantitatif yang disajikan dapat menjadi acuan untuk memberikan gambaran pencapaian yang akan diraih di masa depan sebagai sumbangsih pendidikan tinggi untuk negeri.

Di masa depan, seperti yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pendidikan tinggi mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan tinggi bermutu bagi semua rakyat Indonesia yang dicirikan oleh angka partisipasi pendidikan yang tinggi serta hasil pembelajaran yang berkualitas. Upaya ini untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui tercapainya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, berketuhanan, berakhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaan global.

Jakarta,

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.

Jalan Menganggit Menara Air

Alih-alih mengibaratkan kampus seperti mercusuar atau menara gading, Presiden Joko Widodo memilih kiasan yang lebih pas: perguruan tinggi sebagai menara air. Alasannya tak lain lantaran seluruh riset dan inovasi yang dihasilkan akademikus harus memiliki nilai guna, baik bagi kampus, masyarakat, negara, maupun *stakeholders*.

“Perguruan tinggi tidak berada di menara gading. Segala riset dan inovasi yang dihasilkan harus bisa bermanfaat untuk masyarakat,” katanya saat meresmikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sindang Sari, Kota Serang, Banten, 4 Maret 2021 lalu.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memfokuskan perhatian pengembangan penelitian kampus terhadap nilai gunanya seperti arahan presiden. Selama pandemi Covid-19, *civitas academica* dipicu lebih kreatif menghasilkan inovasi untuk membantu pemerintah menangani pagebluk. Lewat program relawan, misalnya, 15 ribu mahasiswa dari pelbagai universitas di seantero tanah air turut terjun dalam berbagai kegiatan guna meringankan beban tenaga medis. Rumah sakit-rumah sakit milik kampus pun dibuka sebagai tempat penanganan pasien yang terinfeksi virus corona, baik yang bergejala ringan maupun berat. Di saat *Bed Occupancy Rate* (BOR) meningkat, fasilitas kesehatan milik kampus ini dapat diandalkan.

Program insidental di tengah wabah itu adalah implementasi dari semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diusung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim bahwa kampus tak sekadar mengajarkan teori, tapi wadah pengembangan diri dan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. Bukan hanya untuk jangka pendek, kampus berkewajiban mencetak sumber daya manusia atau SDM yang dapat memberikan pengaruh dalam skala besar dan berjangka panjang.

Seperti fokus pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), indeks pengembangan manusia menjadi salah satu yang harus digeber sampai 2024 demi meraih peluang Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Pemerintah berupaya menghasilkan lulusan-lulusan kampus yang siap bekerja dan berdaya saing di matra internasional untuk mencapai tujuan RPJMN tersebut.

Dari tahun ke tahun, kinerja universitas dalam menghasilkan SDM berkualitas sebetulnya telah menunjukkan tren positif. Menyitir data teranyar 2020, capaian lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam waktu satu telah melampaui target yang semula dipatok 66,77 persen menjadi 75,4 persen—sebagai informasi, setiap tahun kampus menghasilkan 1,7 juta lulusan baru.

Namun perbaikan dari sisi SDM tak serta-merta cukup. Capaian ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas kampus dan inovasi yang dihasilkannya. Berdasarkan *Global Innovation Index (GII)*, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan peringkatnya. Pada 2020, Indonesia berada di urutan ke-85 dari 131 negara dan digolongkan dalam negara berkembang kelompok bawah. Posisi Indonesia kalah dengan tetangganya, seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina.

Menurut indikator penilaian dari lembaga pemeringkatan, posisi universitas di suatu negara tak hanya diukur dari sisi kualitas, tapi juga kuantitasnya. Seperti dihimpun Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi 2020, jumlah publikasi penelitian yang dihasilkan kampus di Indonesia belum terlampaui maksimal sehingga membuat negara kudu tancap gas untuk menyalip pesaingnya, baik di level Asia Tenggara, Asia, maupun global.

Sejatinya, lewat Kampus Merdeka, kuantitas penelitian kampus telah digenjot. Melalui program ini, dosen dan mahasiswa diberi kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga di luar kampus, seperti Eijkman, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hingga *Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Centre*. Sinergi pentahelix dari berbagai sektor itulah yang dapat mengisi kerumpangan-kerumpangan atas persoalan yang dihadapi perguruan tinggi.

Di luar masalah kualitas lulusan dan hasil riset kampus, aspek peningkatan mutu dosen tak luput dari tantangan yang harus dihadapi negara untuk menjaga api perguruan tinggi. Dosen adalah kunci penting dalam memajukan ekosistem perguruan tinggi di suatu negara.

Guna meningkatkan mutu tenaga pendidiknya, pemerintah saat ini perlu terus menambah jumlah dosen yang mengantongi sertifikasi. Sertifikasi dosen merupakan upaya untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi para pengajar. Pada 2020, jumlah dosen yang bersertifikat tercatat 111.017 orang dari total dosen tetap sebanyak 239.472 orang atau 46,4 persen secara kumulatif.

Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mencapai target 100 persen. Di sisi lain, pemerintah juga masih perlu menggenjot jumlah dosen dengan kualifikasi S-3. Dosen bergelar doktor memiliki peran besar untuk meningkatkan daya saing universitas-universitas dalam negeri di lingkup internasional. Tak sampai di situ, penambahan jumlah dosen dengan pengalaman kerja pun telah menjadi perhatian agar standar profesionalisme tenaga pendidik meningkat agar kampus benar-benar mampu menjadi menara air.

Daftar Isi

TIM REDAKSI	I
KATA PENGANTAR	II
JALAN MENGANGGIT MENARA AIR	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GRAFIK	VII
DAFTAR TABEL	IX
GARDA DEPAN DI INDONESIA MAJU	4
Persebaran Dosen Hingga ke Pelosok Negeri	7
Angka Dosen Bersertifikat Makin Meningkatkan	10
Menggendeng Para Profesional di Industri	14
Kejar Kualifikasi, Para Dosen Meraih Mimpi	17
Penting Siasat Mengejar Peringkat	22
BENAHU INSTITUSI UNTUK PRESTASI	24
Menjadi Universitas Bergengsi di Kelas Dunia	26
Peringkat Disiplin Ilmu Kelas Dunia	28
Transformasi Perguruan Tinggi untuk Mandiri	30
Akreditasi Perguruan Tinggi Dalam Negeri	32
Akreditasi Program Studi Cermin Kualitas Perguruan Tinggi	34
Mendongkrak Mutu melalui Kolaborasi	37
Adaptasi Pembelajaran Berbasis Jaringan	41
Benahi Strategi Kejar Prestasi	44

SDM PROFESIONAL UNTUK BONUS DEMOGRAFI	48
Anak Muda Mengenyam Pendidikan Tinggi	56
Meningkatkan Darma Penelitian di Kampus	66
Membangun Reputasi Penelitian Internasional	74
Harapan Menuai Bonus Demografi	81
KONTRIBUSI PERGURUAN TINGGI UNTUK DAYA SAING BANGSA	86
Membangun Reka Cipta Indonesia	88
Menakar Daya Serap Lulusan	92
Kesejahteraan Lulusan Perguruan Tinggi	95
Menimba Pengalaman di Luar Kampus	97
Sitasi, Pengakuan Mutu Publikasi Ilmiah	100
Perguruan Tinggi, Motor Penggerak Daya Saing Bangsa	103
KAMPUS MERDEKA BUKAN SEKADAR MIMPI	107

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Jumlah Dosen dengan Kualifikasi S-3	19
Grafik 1.2	Total jumlah dosen tetap	20
Grafik 1.3	Rasio Dosen Berkualifikasi S-3	20
Grafik 2.1	Universitas Terbaik di Kawasan Asia	26
Grafik 2.2	Persentase PTN dan PTN-BH	30
Grafik 2.3	Persentase Akreditasi Lembaga	33
Grafik 2.4	Lembaga yang Terakreditasi	33
Grafik 2.5	Program Studi yang Terakreditasi	34
Grafik 2.6	Persentase Akreditasi Program Studi Kesehatan	35
Grafik 2.7	Persentase Perguruan Tinggi yang telah melakukan Kerja Sama	39
Grafik 2.8	Jenis Kerja Sama Terbanyak	39
Grafik 3.1	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Nasional dari Tahun 2016-2020	48
Grafik 3.2	Perkembangan Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi Tiap Provinsi secara Nasional Tahun 2016-2020	51
Grafik 3.3	Perbandingan Keberlanjutan Studi Mahasiswa	52
Grafik 3.4	Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan Bidang Ilmu Tahun 2020	58
Grafik 3.5	Lulusan Berdasarkan Kelompok PT dari Bidang Ilmu Tahun 2019	60

Grafik 3.6	Sepuluh Prodi dengan Jumlah Mahasiswa Terbanyak Tiap Jenjang	63
Grafik 3.7	Jumlah Dosen Berkualifikasi S-3	64
Grafik 3.8	Total Jumlah Dosen Tetap	65
Grafik 3.9	Persentase Dosen Berkualifikasi S-3	69
Grafik 3.10	Penambahan Jumlah Dosen S-3	70
Grafik 3.11	Jumlah Lulusan Penerima Beasiswa Kemendikbudristek	71
Grafik 3.12	Publikasi Internasional Negara Asean Tahun 2014-2019	71
Grafik 3.13	Publikasi Internasional Negara Asean Tahun 2020	71
Grafik 3.14	Produktivitas dan Sebaran Publikasi menurut LLDIKTI Wilayah I-XIV	72
Grafik 3.15	Produktivitas dan Sebaran Publikasi menurut Status Perguruan Tinggi Negeri	74
Grafik 3.16	Produktivitas dan Sebaran Publikasi menurut Jenis Perguruan Tinggi Laporan Kondisi Tahun 2020	75
Grafik 3.17	Produktivitas dan Sebaran Publikasi menurut Hasil Survei Tahun 2020	78
Grafik 3.18	Mahasiswa Baru dan Bidang Ilmu Akademik Tahun 2019	78
Grafik 3.19	Produktivitas dan Sebaran Publikasi menurut Jenis Perguruan Tinggi Laporan Kondisi Tahun 2020	79
Grafik 3.20	Produktivitas dan Sebaran Publikasi menurut Hasil Survei Tahun 2020	79
Grafik 3.21	Mahasiswa Baru dan Bidang Ilmu Akademik Tahun 2019	82

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Akreditasi Prodi Internasional	36
Tabel 2.2	Laporan Kerja Sama Perguruan Tinggi	38
Tabel 3.1	Capaian Hasil Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2013-2019	55
Tabel 3.2	Jumlah Lulusan Menurut Bentuk Perguruan Tinggi Tahun 2020 Nasional	59
Tabel 3.3	Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi	68
Tabel 3.4	Pendanaan Penelitian DRPM Luaran yang Menghasilkan Publikasi	76



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi





Garda Depan di Indonesia Maju

Menyitir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah berfokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menyongsong Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Dalam sidang kabinet di Istana Negara pada Oktober 2020, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembangunan SDM akan dilakukan secara masif dan menyeluruh.

“Bahwa program tahun pertama pada periode pembangunan RPJMN 2020-2024, kita fokuskan kepada pembangunan SDM secara besar-besaran,” tutur Presiden Joko Widodo.

Pembenahan kualitas SDM untuk mengejar era Indonesia emas digeber dengan pelbagai upaya, tak terkecuali peningkatan serta pemerataan kemampuan tenaga pendidik di level perguruan tinggi. Dosen diyakini merupakan garda terdepan yang memiliki tugas besar untuk mencetak para pemimpin dan tenaga terampil di berbagai profesi di masa mendatang.

Dalam capaian kinerja sasaran program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020, penilaian peningkatan dan pemerataan kemampuan dosen dilakukan dengan tiga indikator. Indikator pertama adalah dosen bersertifikat. Sertifikasi dosen bertujuan untuk menilai kinerja hingga menakar kelayakan para pengajar. Sertifikasi ini sekaligus merupakan bukti formal bahwa dosen telah memperoleh pengakuan atas profesionalismenya sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi.

Sementara itu, indikator kedua ialah persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau bersertifikat di industri maupun profesinya. Dosen dengan jabatan fungsional ini merupakan pengajar di kursi pendidikan tinggi yang telah mengantongi pengalaman minimal sebagai asisten ahli.



Peningkatan kualitas dosen akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat membantu Indonesia keluar dari *middle income trap* atau perangkap pendapatan menengah.

Selanjutnya, indikator ketiga merupakan dosen dengan sertifikat berkualifikasi S-3 atau telah memperoleh gelar doktor. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2020, jumlah dosen berkualifikasi S-3 baru mencapai 18 persen dari total persebaran pengajar tetap di perguruan tinggi. Meski tergolong rendah, angka ini meningkat ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan tiga indikator untuk mengukur sasaran kinerja peningkatan SDM tersebut, satu di antaranya belum mencapai target. Indikator yang belum menyentuh target ini adalah dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri maupun profesinya.

Bila mengacu pada data yang dihimpun sepanjang 2020, realisasi jumlah dosen dengan sertifikat pengalaman bekerja baru 68,74 persen atau sebanyak 168.070 dari total 244.687 dosen. Sementara, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan target dosen untuk kategori ini pada 2020 bisa mencapai 69 persen. Berdasarkan angka capaian itu, persentase dosen yang mengantongi sertifikat pengalaman bekerja berarti baru mencapai 99,62 persen dari target.

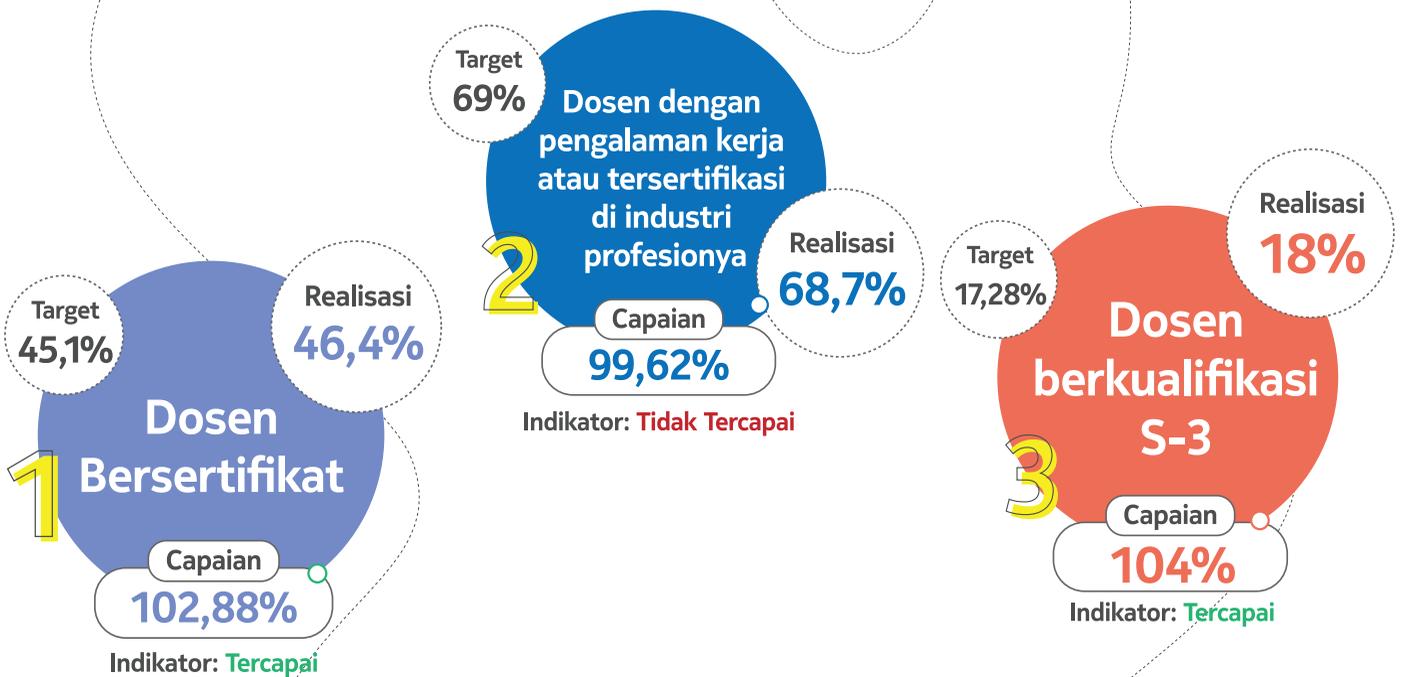
Sedangkan dua indikator lainnya tampak telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi persentase dosen bersertifikat, misalnya, telah menyentuh 102,88 persen. Persentase dosen yang bersertifikat sepanjang 2020 mencapai 111.017 orang dari total dosen tetap sebanyak 239.472 orang atau 46,4 persen. Jumlah itu melebihi target awal, yakni sebesar 45,1 persen.

Sedangkan realisasi persentase dosen berkualifikasi S-3 mencapai 104 persen. Semula, jumlah dosen berkualifikasi S-3 diproyeksikan sebesar 17,28 persen dari total dosen tetap. Namun realisasinya pada 2020 telah menyentuh 18 persen, sedikit lebih tinggi dari proyeksi yang ditetapkan.

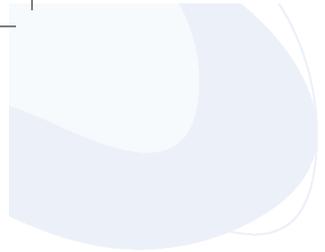
Ditjen Dikti terus menggenjot agar rasio kualitas dosen dan jumlahnya di seluruh perguruan tinggi meningkat sesuai dengan tren kebutuhan.

3 Indikator Pencapaian

Peningkatan Kualitas SDM Dosen 2020



Sumber:
Data Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi,
Data diolah



Persebaran Dosen Hingga ke Pelosok Negeri

Pergerakan jumlah dosen atau tenaga pendidik perguruan tinggi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Ditjen Dikti mencatat jumlah dosen yang mengantongi nomor induk per akhir Desember 2020 telah mencapai 312.890 orang. Angka ini melonjak dari dua tahun sebelumnya atau 2018 yang sebesar 247.157 dosen dan pada 2019 yang sebanyak 280 ribu dosen.

Berdasarkan kelompok usianya, porsi terbesar untuk dosen diisi oleh kategori milenial dengan rentang usia 26-35 tahun. Total dosen untuk kategori ini mencapai 91.934 orang. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh dosen dengan kelompok usia 36-45 tahun yang berjumlah 88.367 orang.

Secara berturut-turut, jumlah dosen terbanyak untuk urutan ketiga ditempati oleh pengajar dengan kelompok usia 46-55 tahun atau generasi X berjumlah 74.557 orang. Sedangkan kelompok dosen berusia 56-65 tahun tercatat sebanyak 48.805 orang.

Kelompok dosen usia lanjut di atas 65 tahun masih tersebar dengan total sebanyak 8.066 orang. Sedangkan porsi terkecil ditempati dosen usia muda kurang dari 25 tahun, yakni sebanyak 1.161 orang.

Berdasarkan nomor registrasinya, persebaran dosen di Indonesia dikuasai oleh kelompok yang memiliki Nomor Dosen Induk Nasional (NIDN) sebanyak 87,65 persen atau 274.252 orang. Sementara itu dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP) berjumlah 27.133 orang (8,67 persen) dan dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sebanyak 11.505 orang atau 3,68 persen.

Menurut status kepegawaiannya, dosen di Indonesia didominasi oleh non-Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah dosen non-PNS sebanyak 180.494 atau 67,36 persen. Hanya 87.446 dosen atau 32,64 persen yang tercatat sebagai PNS menurut data teranyar Ditjen Dikti.

Adapun menurut kelompok dosennya, sebanyak 25.987 orang merupakan dosen tetap atau 88,35 persen. Sisanya, yaitu sebanyak 37.951 orang (11,65 persen), merupakan dosen tidak tetap.

Diurai menurut bentuk perguruan tingginya berdasarkan data nasional, dosen per 2020 paling banyak tersebar di universitas. Jumlah dosen di universitas mencapai 186.982 orang. Sedangkan dosen di institut tercatat sebanyak 26.771 orang, di sekolah tinggi sebanyak 63.668 orang, di akademi 12.081 orang, dan politeknik 23.180 orang. Jumlah dosen paling sedikit tercatat bertugas di akademi komunitas sebanyak 208 orang.

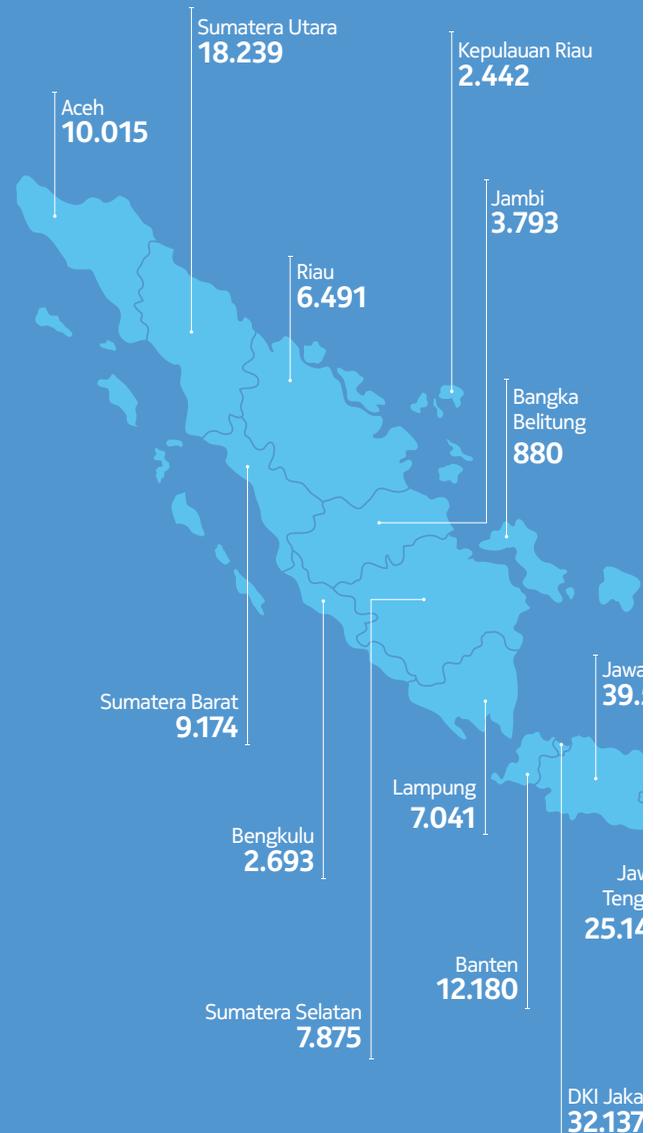
Ditjen Dikti juga mencatat jumlah dosen-dosen yang telah pensiun sepanjang 2020. Pada tahun lalu, 306 dosen dengan kelompok registrasi NIDN memasuki masa purnatugas. Menurut sebarannya, sebanyak 134 dosen yang pensiun memiliki jabatan sebagai lektor kepala. Kemudian 69 orang dosen memiliki jabatan sebagai lektor, dosen tanpa jabatan sebanyak 32 orang, asisten ahli 21 orang, dan dosen yang pensiun sebagai guru besar sebanyak 50 orang.

Dari total guru besar yang sudah pensiun, sebanyak 12 orang berjenis kelamin perempuan dan 38 lainnya adalah laki-laki. Sedangkan dosen yang telah pensiun yang tidak menyangkut status guru besar, 63 orang di antaranya berjenis kelamin perempuan dan 193 orang lainnya laki-laki.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perbandingan jumlah ideal dosen dengan mahasiswanya di perguruan tinggi swasta adalah 1:30 untuk ilmu eksakta dan 1:45 untuk ilmu sosial. Sementara itu, untuk perguruan tinggi negeri, perbandingan ideal dosen dengan mahasiswanya ialah 1:20 untuk eksakta dan 1:30 untuk ilmu sosial.

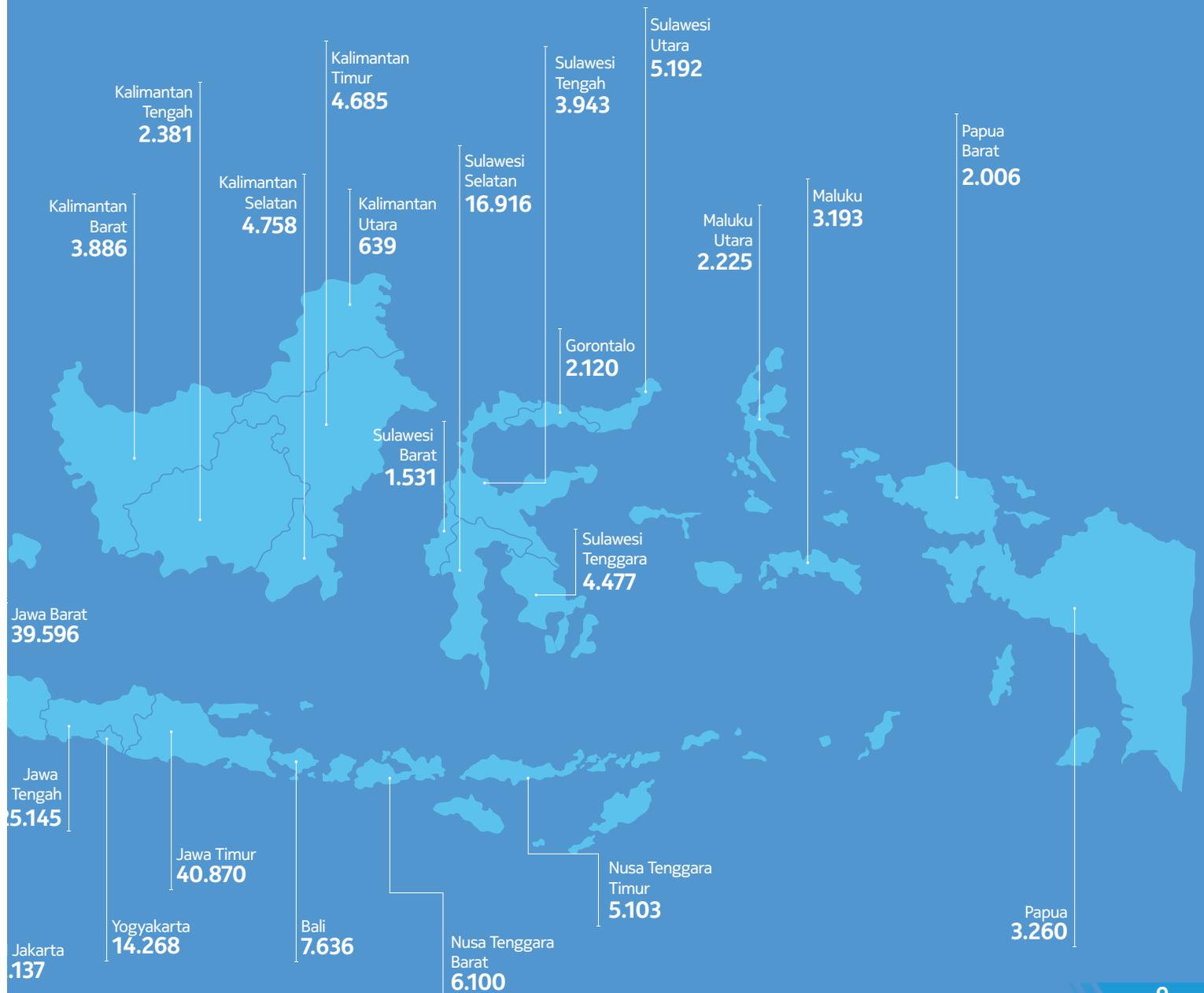
Persebaran D Secara Nasio

Jumlah dosen secara nasional pada 2020 tercatat berjumlah **312.890** orang.



Dosen Provinsial 2020

Berdasarkan provinsinya,
jumlah dosen terbanyak berada di Jawa Timur
dengan total **40.870** orang.



Angka Dosen Bersertifikat Makin Meningkat

Mimpi Indonesia membawa perguruan tinggi nasional menembus peringkat teratas di jajaran QS World University Ranking (WUR) tak terlepas dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas para tenaga pengajarnya. Sebagai garda paling depan di dunia pendidikan, dosen dipercaya untuk bisa mencetak SDM unggul di bangku-bangku kampus dan mendorong mahasiswa mampu bersaing di level internasional.

Salah satu upaya Ditjen Dikti untuk meningkatkan kemampuan SDM adalah melalui program sertifikasi.

Berjalan sejak 13 tahun lalu, sertifikasi dosen membuka peluang para tenaga pendidik untuk melambungkan mutu, baik bagi pengembangan diri maupun institusinya.

Klausul sertifikasi terhadap dosen pun termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Beleid itu menegaskan bahwa pengakuan dosen sebagai tenaga pendidik profesional dilakukan melalui pemberian sertifikat.

“Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” bunyi salah satu klausulnya.

Sertifikasi dosen memiliki tujuan untuk menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan para pengajar dalam melaksanakan tugas.

Program ini juga melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di perguruan tinggi, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, sertifikasi dosen digelar untuk meningkatkan kesadaran para pendidik terhadap kewajiban menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademis, terutama ihwal plagiasi.

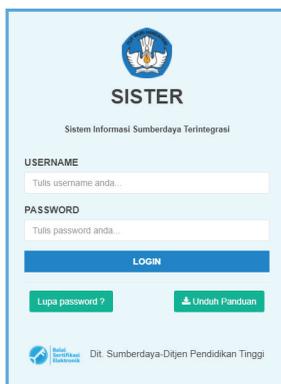
Sertifikasi dosen dapat ditempuh dengan syarat tertentu bila dosen ingin mengantongi kelulusan. Syarat tersebut meliputi kualifikasi akademik minimal S-2 atau setara dengan program studi pascasarjana yang terakreditasi. Mereka yang mendaftar harus tergolong dosen tetap di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Dosen Diperbantukan (DPK) di Perguruan Tinggi Swasta (PTS), serta dosen tetap di yayasan PTS yang telah memperoleh surat keputusan atau inpassing alias penyetaraan.

Dosen juga wajib memiliki NIDN; dinyatakan lulus TPA dan TOEFL; mengikuti sosialisasi sertifikasi dosen; dan memiliki masa kerja minimal 2 tahun sebagai dosen tetap. Syarat berikutnya, dosen harus mengemban jabatan akademik minimal asisten ahli dan melaksanakan tridarma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit setara 12 SKS. Dosen yang mengikuti tugas belajar pun layak diikuti sertifikasi bila memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Sejak 2011, pelaksanaan sertifikasi dosen bertransformasi dari sistem manual ke arah digital. Prosesnya pun memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada 2017, terjadi integrasi data dosen serta penyempurnaan untuk tahapan penilaian.

Seluruh penyusunan serta penilaian instrumen atau borang sertifikasi didorong lebih efektif menggunakan aplikasi **Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER)**. Digitalisasi ini menjamin pelaksanaan proses sertifikasi menjadi lebih akuntabel.

Perbaikan-perbaikan dalam proses sertifikasi dosen berimbas pada meningkatnya jumlah dosen yang tersertifikasi. Pada 2020, jumlah dosen yang telah mengantongi sertifikat mencapai 111.017 orang dari total dosen tetap sebanyak 239.472 orang. Angka ini setara dengan 46,4 persen.

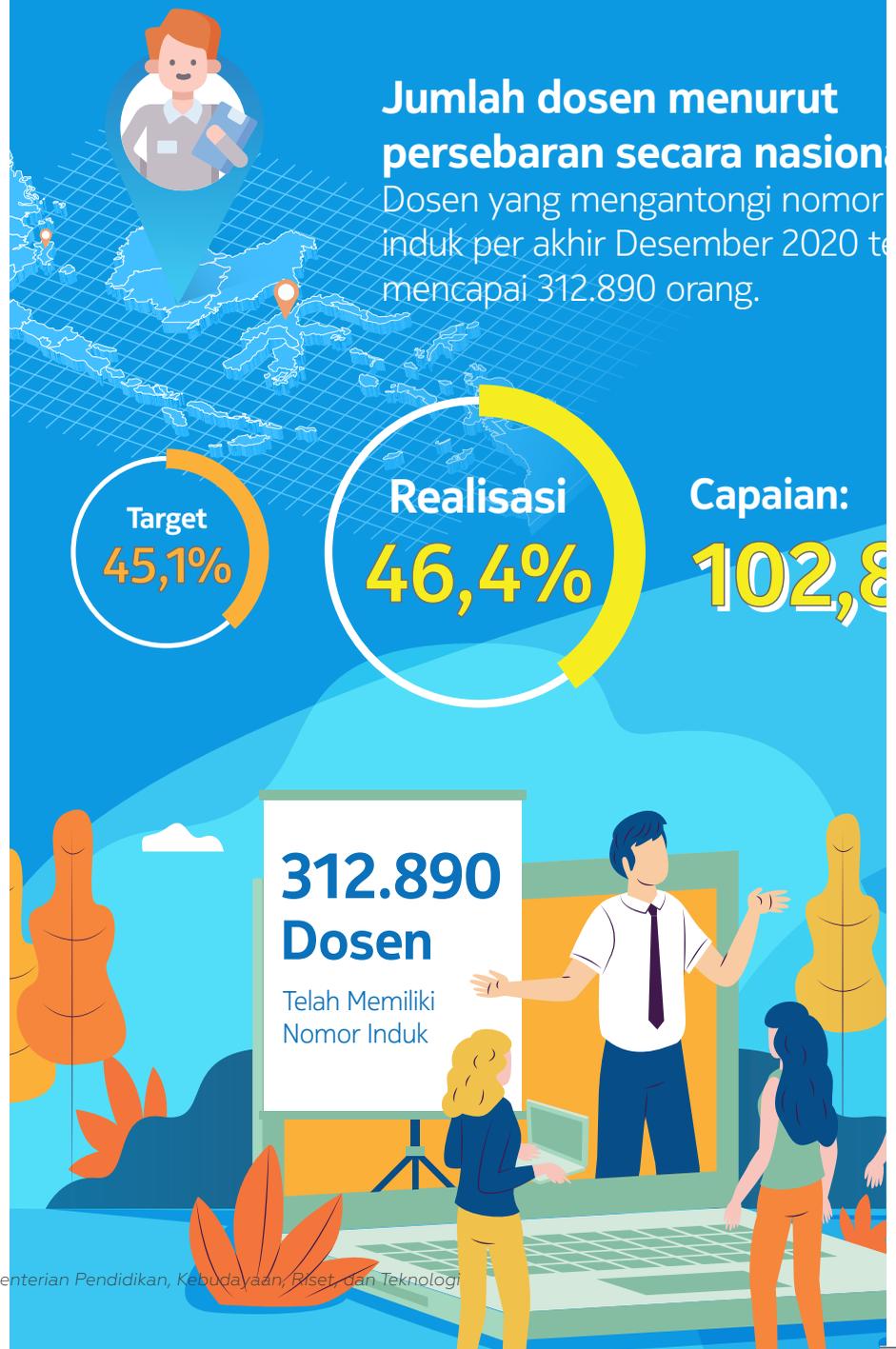


Ditjen Dikti mencatat capaian dosen tersertifikasi pada 2020 melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Pada tahun lalu, Ditjen Dikti mematok target sebesar 45,1 persen. Dengan demikian, realisasi dosen bersertifikat terhitung mencapai 102,88 persen dari target yang ditetapkan.

Kendati telah menyentuh target capaian, masih ada sejumlah tantangan yang menjadi pekerjaan rumah utama, seperti adanya masalah di bidang teknis serta ketidaksinkronan data di lingkup perguruan tinggi dan Ditjen Dikti. Karenanya, Ditjen Dikti terus melakukan sosialisasi ke kampus-kampus untuk melakukan sinkronisasi data secara rutin, membarui dan mengecek data agar selaras dengan pusat.

Persentase Dosen Bersertifikat

Indikator kinerja
satunya dari



kinerja utama atau IKU 2020 diukur salah satu dari persentase dosen bersertifikat.

onal:
hor
0 telah

,88%



1 Nilai jabatan akademik dan pendidikan



2 Nilai golongan atau ruang kepengamanan



3 Nilai persepsional



Nilai bahasa Inggris

5 Nilai kemampuan dasar akademis dan deskripsi diri berbasis Tridarma Perguruan Tinggi



5 Komponen Penilaian

untuk mengukur kelulusan sertifikasi dosen.

Kriteria kelulusan diberikan dalam tiga kategori:



Lulus Nilai Gabungan



Lulus Nilai Persepsional



Lulus Nilai Deskripsi Diri

Menggandeng Para Profesional di Industri

Ditjen Dikti telah membentuk dua program untuk meningkatkan persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau mengantongi sertifikasi di industri maupun profesinya. Dosen tersebut ialah pengajar pendidikan tinggi yang memiliki jabatan minimal asisten ahli. Adapun jenjang karier dosen mencakup tingkatan ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

Penilaian angka kredit bagi dosen berpangkat lektor kepala dan guru besar dilakukan melalui Direktorat Sumber Daya, Ditjen Dikti. Sedangkan dosen dengan jenjang lektor dan dan asisten ahli diproses melalui perguruan tinggi masing-masing untuk perguruan tinggi negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) bagi perguruan tinggi swasta.

Baru-baru ini, Ditjen Dikti meluncurkan aplikasi Sistem Pelacakan secara Mandiri Penilaian Angka Kredit (Selancar PAK) untuk membantu dosen dalam mengetahui usulan tentang kenaikan pangkat atau jabatan akademisnya. Selancar PAK akan menjamin transparansi proses kenaikan pangkat untuk jabatan lektor kepala serta profesor. Sebab, perjalanan prosesnya dapat dipantau mulai usulan pengajuan hingga penetapan PAK.

Program kedua yang disediakan Ditjen Dikti adalah magang dosen. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan merupakan kegiatan pembinaan yang dikelola secara terpusat. Pendidikan magang bagi para dosen dilaksanakan di perguruan tinggi pembina (PT Pembina) selama lebih kurang empat bulan. Meski *outputnya* bukan untuk pencapaian gelar lanjutan, magang dosen membuka peluang para pengajar untuk memperoleh akses pendidikan doktor.

Program ini membantu dosen memberikan kepastian atas jenjang karier yang akan dicapai. Adapun kedua program itu meliputi penilaian angka kredit dosen dan magang dosen.

Sepanjang 2020, capaian terhadap target dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri maupun profesinya nyaris tercapai. Realisasi dosen yang memiliki pengalaman bekerja adalah sebesar 99,62 persen atau di bawah target yang ditetapkan.

Dalam meningkatkan persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau diakui di industrinya, Ditjen Dikti menghadapi berbagai tantangan. Pertama, dosen kesulitan memublikasikan karyanya di jurnal internasional bereputasi. Padahal, publikasi ini merupakan salah satu syarat agar penilaian lolos.

Kedua, pandemi Covid-19 yang memporak-porandakan kegiatan ekonomi dan sosial secara global telah menghambat pelaksanaan penilaian angka kredit dosen. Musababnya, pandemi telah membatasi ruang gerak dan perjalanan.

Tantangan ketiga adalah adanya pemberlakuan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit 2019 (PO PAK 2019). Ini adalah aturan baru pengganti PO PAK 2014. Dalam pelaksanaannya, tim penilai dihadapkan dengan tantangan koordinasi dan komunikasi secara daring. Padahal masing-masing anggota tim harus berinteraksi secara lancar untuk menyamakan persepsi. Tantangan terakhir, pandemi membuat program magang dosen pada 2020 absen dilaksanakan.

Untuk mencegah hambatan-hambatan pada masa mendatang, Ditjen Dikti telah melakukan langkah antisipasi dalam upaya meningkatkan persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri maupun profesinya.

Optimalisasi penilaian angka kredit dosen juga perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada menggunakan sistem *online* atau daring. Sistem akan mengefektifkan serta mempercepat penyelesaian penilaian selama pandemi Covid-19. Selanjutnya, juga telah disediakan wadah diskusi pada platform aplikasi media sosial.

Sementara itu khusus program magang dosen, Ditjen Dikti akan segera menggantinya kembali pada 2021. Magang dosen digelar secara *hybrid* atau campuran, yakni dengan sistem daring maupun luring. Materi-materi yang diberikan secara daring meliputi pengenalan tugas dan fungsi pokok unit kerja, metode penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan materi yang harus diikuti dengan pertemuan tatap muka adalah pengenalan kampus.

Dosen perlu memperoleh bimbingan teknis penulisan karya ilmiah untuk meningkatkan kompetensi sehingga karyanya dapat dipublikasikan di jurnal internasional yang memiliki reputasi.

Indikator Capaian Dosen

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020 juga diukur melalui persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri maupun profesinya.

Jumlah Dosen
Menurut Persebaran
secara Nasional:



Total dosen tetap
239.472 orang

Persentase dosen dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri maupun profesinya per 2020:



Capaian:

99,62%

Status: belum memenuhi target

Payung Regulasi Jabatan Fungsional Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni melalui pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 juncto Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional

Kejar Kualifikasi, Para Dosen Meraih Mimpi

Tak sedikit dosen bermimpi meraih pendidikan doktoral untuk meningkatkan kompetensinya sebagai pengajar profesional. Melalui pelbagai cara, seperti mengikuti program beasiswa hingga mencari sponsor, tenaga pendidik di kampus-kampus berjerih payah mencapai derajat strata pendidikan tertingginya.

Gelar doktoral atau S-3 menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas, relevansi profesi, dan kuantitas dosen. Sejatinya, regulasi yang berlaku saat ini mematok standar minimal kualifikasi dosen ialah lulusan magister atau strata dua (S-2). Namun, gelar doktor tetap dikejar karena dianggap memiliki tingkat kualifikasi tertinggi yang telah melampaui standar minimal tersebut.

Data Ditjen Dikti menyebutkan jumlah dosen berkualifikasi S-3 telah mencapai 43.210 hingga akhir 2020. Sedangkan total dosen tetap di seluruh tanah air berjumlah 239.472 orang. Porsi dosen bergelar S-3 dari total keseluruhan tenaga pendidikan telah mencapai 18 persen atau melampaui target yang pemerintah sebesar 17,8 persen.

Ditjen Dikti melihat tren jumlah dosen bergelar S-3 meningkat karena didorong bertambahnya penawaran beasiswa, baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Ditjen Dikti sendiri telah memiliki program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) dan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPPLN).

Jumlah dosen yang menerima beasiswa dari Ditjen Dikti sepanjang 2016 hingga 2019 telah menembus lebih dari seribu orang per tahun. Pada 2016, jumlah dosen penerima beasiswa mencapai 1.354. Pada 2017, jumlahnya turun namun tetap terjaga di atas seribu, yakni 1.179 orang.

Jumlah dosen yang telah meraih gelar S-3 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Lalu pada 2018 meningkat sebesar 1.192 dan pada 2019 sebesar 1.056 dosen. Pada 2020, jumlah dosen peraih beasiswa S-3 dari Ditjen Dikti turun menjadi 213 lantaran adanya kebijakan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Instansi lainnya, seperti Kementerian Keuangan, juga telah membuka jalur beasiswa melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang rutin dihelat saban tahun. Selain itu dari luar negeri, pendanaan berupa pinjaman dan hibah untuk beasiswa doktoral pun semakin banyak. Tak hanya lewat jalur beasiswa, dosen yang melanjutkan studinya dengan biaya mandiri terekam meningkat jumlahnya.

Kendati persentasenya terus bertumbuh, rasio dosen yang memiliki jabatan fungsional sebagai guru besar masih terus didorong kecukupannya. Musababnya, angka guru besar menduduki porsi paling sedikit ketimbang jajaran jabatan fungsional dosen lainnya. Jumlah guru besar per 2020 tercatat 5.478 orang.

Guru besar terus berkurang karena banyak di antaranya yang memasuki masa purnatugas. Tahun lalu, guru besar yang tergolong kelompok registrasi NIDN dan memasuki usia pensiun mencapai 50 orang dengan 46 orang berstatus tidak tetap dan empat orang tetap.

Dari total guru besar yang pensiun, paling banyak terdapat di Jawa dengan jumlah 57,44 persen. Kemudian 17,94 persen berada di Sumatera; 3,23 persen di Kalimantan; 5,74 persen di Nusa Tenggara; 14,39 persen di Sulawesi; 0,88 persen di Maluku; dan 0,38 persen di Papua.

Hambatan peningkatan persentase dosen berkualifikasi S-3

Untuk meningkatkan persentase dosen dengan gelar doktor, terdapat sejumlah tantangan. Di antaranya, kebijakan untuk mengalihkan anggaran beasiswa ke LPDP sejak 2016 mengakibatkan hilangnya alokasi beasiswa S-3 bagi dosen angkatan baru dalam DIPA anggaran beasiswa Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti. Padahal, alokasi beasiswa yang disediakan LPDP tidak selalu terserap optimal karena terganjal kriteria persyaratan yang tak dapat dipenuhi dosen.

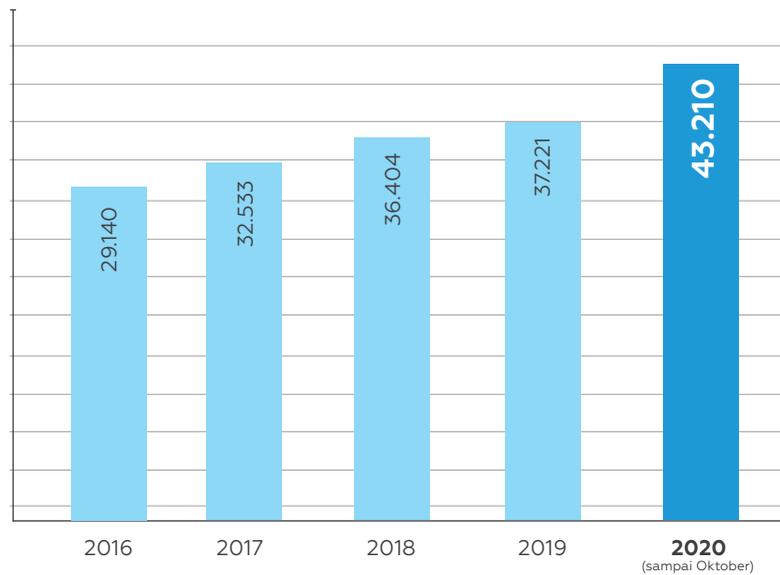
Kemudian, saat ini SDM pengajar dengan kualifikasi S-2 atau magister masih sangat dibutuhkan di perguruan tinggi. Karenanya, kebijakan pemerintah mengejar kecukupan rasio dosen menuntut perguruan tinggi tidak bisa melepas SDM-nya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi pendidikan doktor membutuhkan waktu studi lebih dari satu tahun. Menjamurnya dosen baru yang berkualifikasi S-2 pun turut memengaruhi persentase dosen S-3.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Ditjen Dikti mendorong tumbuhnya mekanisme pembiayaan untuk beasiswa melalui program sponsor, baik dengan swasta di luar negeri maupun dalam negeri.

Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti juga memiliki kebijakan izin bagi dosen untuk memperoleh skema beasiswa dari pemerintah. Terakhir, pemerintah akan tetap menghitung dosen yang sedang menempuh pendidikan S-3 masuk dalam rasio tenaga pengajar.

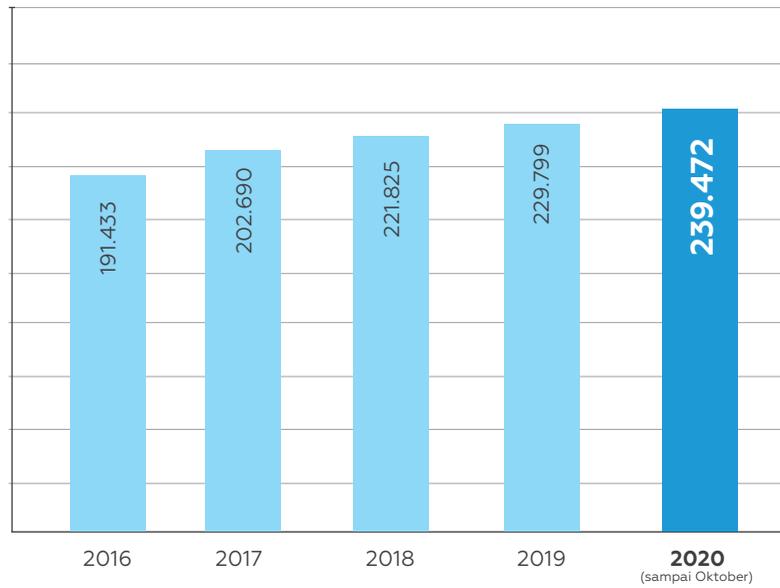
Persentase dosen berkualifikasi S-3 sepanjang 2015-2020

Grafik 1.1
Jumlah Dosen dengan Kualifikasi S-3



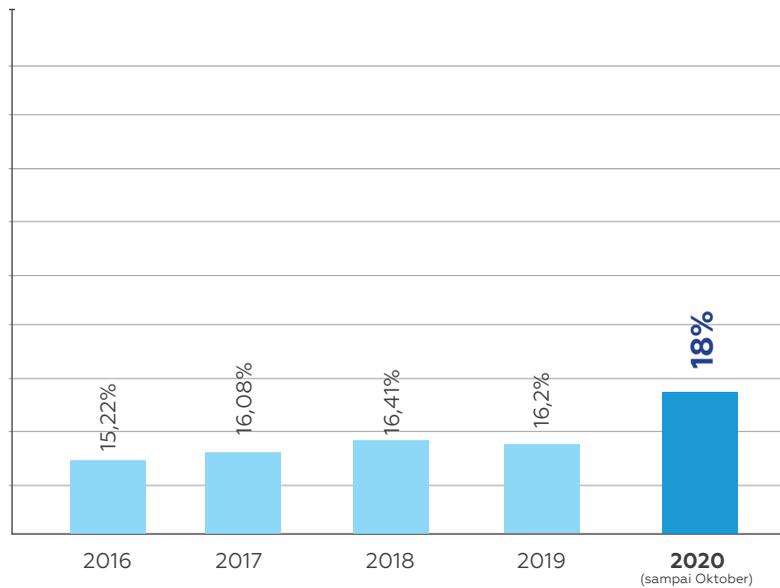
Sumber: Statistik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi | data diolah

Grafik 1.2
Total Jumlah Dosen Tetap



Sumber: Statistik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi | data diolah

Grafik 1.3
Rasio Dosen Berkualifikasi S-3



Sumber: Statistik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi | data diolah

Jumlah dosen teregistrasi NIDN dengan gelar S-3 berdasarkan jabatan fungsionalnya:



Sumber: Statistik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi | data diolah

Penting Siasat Mengejar Peringkat

Ditjen Dikti tengah fokus dalam menggeber peningkatan jumlah dosen bersertifikat. Program yang menjadi salah satu indikator penilaian profesionalisme ini telah memberikan kepastian terhadap kelayakan para pengajar di lingkup perguruan tinggi. Sertifikasi juga sekaligus merupakan jalan untuk membenahi kualitas SDM yang turut berperan mencetak generasi emas menuju Indonesia maju 2045.

Tak hanya memperbaiki kualitas SDM, sertifikasi dosen pun memberikan ruang bagi para pengajar di perguruan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tunjangan profesi dan finansial terhadap dosen-dosen yang telah dinyatakan lolos untuk program ini. Tak khayal sertifikasi dosen sedikit banyak memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi skala kecil.

Upaya meningkatkan jumlah dosen bersertifikat sudah kentara sejak 2020. Pada tahun lalu, jumlah dosen yang melaksanakan sertifikasi menurut data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mencapai 111.017 orang dari total dosen tetap sebanyak 239.472 orang atau setara dengan 46,4 persen.

Capaian dosen tersertifikasi itu melampaui target yang ditentukan sebelumnya, yakni 45,1 persen. Dengan realisasi tersebut, berarti jumlah dosen bersertifikat berarti mencapai 102,88 persen dari proyeksi target yang ditetapkan.

Kendati telah menyentuh target capaian, proses sertifikasi dosen masih memiliki tantangan yang menjadi pekerjaan rumah bagi Ditjen Dikti. Misalnya, perlunya integrasi data antara perguruan tinggi serta Ditjen Dikti agar mempercepat proses sertifikasi.

Ditjen Dikti akan terus berupaya melakukan pembaruan data secara rutin. Upaya ini dapat mengurangi hambatan-hambatan teknis yang dihadapi dosen saat mengurus dokumen sertifikasinya. Ditjen Dikti juga perlu memiliki bank data khusus untuk mempermudah pemetaan dosen-dosen yang belum dan telah bersertifikat di seluruh Indonesia.

Program sertifikasi dosen diharapkan nantinya dapat dibarengi dengan peningkatan kualitas intelektual dosen hingga kualitas emosionalnya.

Di sisi lain, Ditjen Dikti juga akan berupaya meningkatkan kualitas *output* dosen-dosen yang telah mengantongi sertifikat. Hal ini agar manfaat sertifikasi dosen dapat lebih dirasakan oleh para dosen. Dengan demikian, terdapat keluaran yang jelas yang menggambarkan bahwa sertifikasi dosen berdampak signifikan terhadap membaiknya sistem pendidikan di level perguruan tinggi.

Dengan begitu, sertifikasi dosen juga dapat menjaring kelompok yang benar-benar punya integritas untuk menjadi tenaga pendidik dan memiliki minat besar terhadap dunia pendidikan.

Ke depan Ditjen Dikti juga akan berupaya meningkatkan jumlah dosen yang telah memiliki pengalaman kerja atau tersertifikasi di industri profesinya. Pada 2020, angka dosen dengan pengalaman bekerja ini memang belum mencapai target, meski nyaris 100 persen.

Upaya untuk meningkatkan jumlah dosen dengan pengalaman kerja menjadi hal penting supaya para pengajar di perguruan tinggi bisa meningkatkan kompetensi kerjanya. Kompetensi kerja tersebut salah satunya diukur dari keterampilan atau keahlian yang secara efektif diterapkan dalam pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang disyaratkan.

Di tengah pandemi Covid-19 dengan keterbatasan ruang gerak, hal ini menjadi tantangan bagi Ditjen Dikti agar tren jumlah dosen dengan pengalaman bekerja dapat terus ditingkatkan. Hal lain yang perlu diantisipasi, agar program magang yang menjadi pendorong utama meningkatnya jumlah dosen berpengalaman tidak berhenti. Pada 2020, program ini sudah tidak dilaksanakan karena pembatasan mobilisasi dan kegiatan akibat wabah Covid-19.

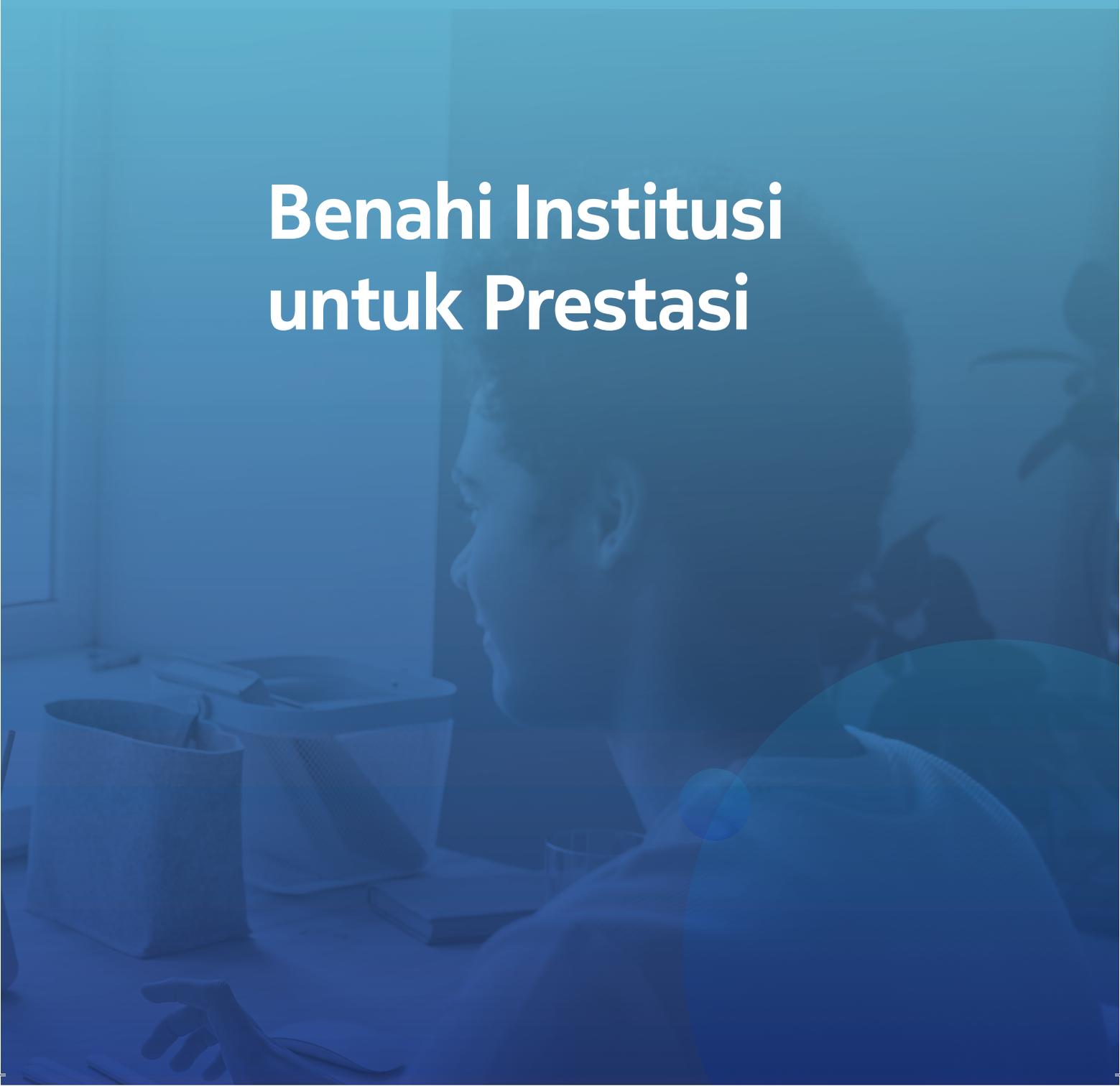
Selanjutnya, tantangan lainnya yaitu jumlah dosen dengan kualifikasi S-3. Dengan jumlah dosen pensiun bergelar doktor yang makin bertambah, upaya untuk mendorong dosen-dosen memperoleh tingkat pendidikan lebih tinggi mesti ditegakkan. Dosen dengan kualifikasi S-3 juga memiliki peran besar untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi dalam negeri di matra internasional.



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi





Benahi Institusi untuk Prestasi

Upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi tidak bisa dilepaskan dari dimensi proses di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Dimensi proses terkait aspek kualitas kelembagaan dan pembelajaran kampus. Perguruan tinggi dituntut untuk memiliki reputasi unggul baik di kancah nasional maupun internasional. Reputasi unggul di kancah nasional bisa tergambar dari akreditasi institusi maupun program studi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi (LAM-PT). Secara umum, jumlah perguruan tinggi Indonesia yang sudah terakreditasi unggul masih sedikit, hal ini menjadi pekerjaan rumah ke depan untuk perbaikan mutu kelembagaan. Hal senada juga terjadi pada akreditasi program studi, sebagian program studi perguruan tinggi masih terakreditasi C atau belum terakreditasi.

Pada tataran kompetisi global, mutu pendidikan di perguruan tinggi dapat dipotret dari jumlah perguruan tinggi dan program studi yang masuk peringkat *World Class University* (WCU). Program studi kita tergolong tidak kalah dibandingkan negara tetangga. Misalnya, IPB University yang telah menjadi terbaik di kawasan Asia Tenggara di bidang Pertanian dan Kehutanan (*Agriculture and Forestry*) dengan menduduki peringkat 62 dunia, lebih tinggi dibandingkan Kasetsart University (63), Nanyang Technological Singapore (71), University Putra Malaysia (80). Selain itu, sub bidang studi Geography Universitas Gadjah Mada (UGM) menduduki peringkat pertama di Indonesia sekaligus peringkat keempat terbaik di Asia Tenggara dan peringkat 25 di Asia.

Perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam 500 perguruan tinggi terbaik dunia saat ini hanya ada tiga yaitu ITB, UI, UGM.

Kondisi yang lebih baik pada *WCU by Subject* yang jumlahnya semakin bertambah dan pada beberapa bidang ilmu.



Platform digital antar perguruan tinggi itu kini telah memiliki 3.000 modul yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun dosen dalam kegiatan belajar mengajar secara daring.

Dimensi proses yang kedua terkait pembelajaran daring. Pandemi Covid-19, yang menerpa dunia sejak awal tahun 2020, telah berdampak signifikan pada segala aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Mudah-mudahan penularan virus corona dan dampak kematian tinggi bagi penderitanya telah mengubah cara pembelajaran di perguruan tinggi. Proses pembelajaran yang awalnya didominasi tatap muka, mau tidak mau harus dihentikan sementara waktu dan memaksa civitas academica untuk bermigrasi menggunakan pembelajaran berbasis jaringan internet. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran daring pun terkendala. Pertama, pembelajaran daring menghadapi kendala jaringan internet. Kedua, dari sisi budaya pembelajaran, masih banyak dosen maupun mahasiswa yang belum terbiasa menggunakan sistem pembelajaran daring. Ketiga, belum semua perguruan tinggi memiliki sistem pembelajaran daring. Kemendikbudristek berusaha memaksimalkan *platform* Sistem Pembelajaran Daring (SPADA).

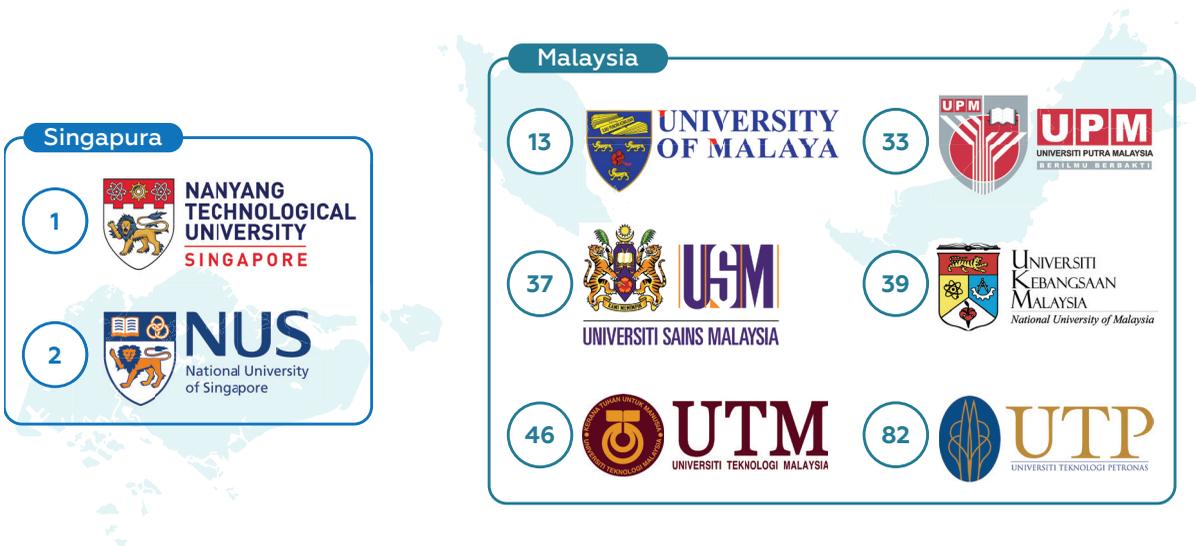
Dimensi proses ketiga terkait kerja sama perguruan tinggi. Perguruan tinggi bukanlah institusi sosial yang bisa berjalan sendirian tetapi perlu membangun kolaborasi baik dengan sesama perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. Kolaborasi ini sangatlah penting untuk menunjang fungsi tridarma maupun membangun kemandirian dalam hal pendanaan. Kerja sama ini perlu dibangun tidak hanya kancah nasional tetapi juga global sehingga terbangun jaringan akademis yang mumpuni.



Menjadi Universitas Bergengsi di Kelas Dunia

Menjadi universitas kelas dunia merupakan impian semua institusi perguruan tinggi di Indonesia. Namun sayangnya, saat ini Indonesia tergolong masih tertinggal dibandingkan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara khususnya Malaysia dan Singapura. Berdasarkan data *QS World University Rankings* terbaru, hanya 3 kampus nasional yang masuk 100 universitas terbaik di kawasan Asia yakni UI (59), ITB (66), dan UGM (70).

Peringkat perguruan tinggi menjadi potret reputasi perguruan tinggi di tingkat internasional. Bagi calon mahasiswa asing, secara naluriah akan memilih institusi perguruan tinggi yang dikenal luas secara internasional. Bagi komunitas akademisi luar negeri akan cenderung memilih kerja sama dengan perguruan tinggi yang bergengsi. Industri juga akan cenderung memilih lulusan dari kampus terbaik.



Grafik 2.1
Universitas Terbaik di Kawasan Asia

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia sebagai indikator kinerja untuk mengukur mutu dan tingkat daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat internasional.

Selain itu, membangun kesadaran akan pentingnya perguruan tinggi di Indonesia hadir dalam pemeringkatan perguruan tinggi dunia.

Persaingan untuk menjadi yang terbaik akan mendorong perguruan tinggi untuk selalu mengacu pada kriteria yang digunakan dalam menentukan pengembangan universitas dan programnya. Sehingga apapun kriteria yang digunakan oleh lembaga pemeringkat, secara otomatis akan diadopsi sebagai panduan dalam menyusun program kerja sekaligus sistem penilaian kinerja internal.

Sejalan dengan rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya perguruan tinggi berkualitas yang dikelola secara otonom dalam lingkungan organisasi yang sehat, sehingga mampu menghasilkan luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Secara khusus program ini ditujukan untuk mendorong peningkatan reputasi akademik perguruan tinggi menuju *World Class University* (WCU). Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini meliputi beberapa aspek: a) **Academic Reputation**; b) **Employer Reputation**; c) **Research and Publication**; dan d) **Internationalization**.



Peringkat Disiplin Ilmu Kelas Dunia

Selain pemeringkatan berdasarkan institusi perguruan tinggi, *QS World University Rankings* juga melakukan perangkaan perguruan tinggi berdasarkan bidang ilmu (*subject*). *QS World University Rankings by Subject* disusun setiap tahun untuk membantu calon siswa memetakan perguruan tinggi terkemuka dalam mata pelajaran tertentu. Pemeringkatan ini mencakup total 48 disiplin ilmu, yang dikelompokkan ke dalam lima bidang ilmu yang luas.

Terdapat empat kriteria utama yang mendasari pemeringkatan yang dilakukan oleh QS ini, yaitu meliputi aspek **reputasi akademik**, **reputasi lulusan**, **jumlah sitasi publikasi**, dan ***h-index*** atau tolok ukur produktivitas dan dampak dari hasil publikasi yang diterbitkan dosen dan peneliti. Penilaian terhadap reputasi akademik dan reputasi lulusan dilakukan melalui penelitian yang

ditujukan kepada mitra-mitra perguruan tinggi, seperti korporasi yang mempekerjakan mahasiswa lulusan perguruan tinggi. Nilai sitasi dan *h-index* diukur berdasarkan publikasi yang terindeks di pangkalan data Scopus. Untuk dapat berpartisipasi dalam pemeringkatan QS perguruan tinggi harus memenuhi *paper threshold* atau jumlah minimal artikel penelitian yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, sehingga publikasi ilmiah menjadi salah satu kriteria yang sangat penting.

Tahun 2020, terdapat 8 perguruan tinggi yang masuk *Top 500 World Class University by Subject*. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 4 perguruan tinggi. Delapan perguruan tinggi tersebut merupakan perguruan tinggi binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dari total 13 Perguruan Tinggi yang dibina.



15 Subject



15 Subject



14 Subject



5 Subject



2 Subject



1 Subject



1 Subject



1 Subject

Target jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia juga menghadapi sejumlah kendala. **Pertama**, kurangnya komitmen pemimpin perguruan tinggi dalam menaikkan peringkat dunia. Manajemen perguruan tinggi perlu mengubah pola pikir yang melihat tantangan tidak hanya berasal dari nasional tetapi juga internasional. Perubahan pola pikir ini akan mendorong komitmen rektor beserta jajarannya untuk mau bertarung di kancah internasional. **Kedua**, pendanaan program WCU di masing-masing perguruan tinggi masih sangat bergantung pada dana dari kementerian. Alokasi dana untuk internasionalisasi juga masih belum menjadi prioritas penting. Hal ini karena internasionalisasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Perguruan tinggi masih menunggu pendanaan dari pemerintah pusat. **Ketiga**, rasio dosen atau mahasiswa masih rendah, perguruan tinggi Indonesia masih cenderung mengandalkan jumlah mahasiswa dalam pendanaan sehingga jumlah mahasiswa menjadi tidak proporsional dibandingkan jumlah dosen. **Keempat**, jumlah publikasi terindeks dan sitasi yang amat rendah. Hal ini karena dosen masih cenderung fokus pada tugas pengajaran sehingga penelitian cenderung terabaikan. **Kelima**, jumlah dosen dan mahasiswa asing yang kecil, hal ini menggambarkan mahasiswa asing atau dosen asing belum melirik kampus nasional untuk menuntut ilmu atau bekerja. **Terakhir**, jejaring dengan pengguna global yang belum terbangun dan teridentifikasi dengan baik.

Untuk mendorong pencapaian kinerja perguruan tinggi untuk masuk dalam *World University Rankings by Subject*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan upaya melalui beberapa program. **Pertama, pendanaan BPPTNBH** untuk peningkatan program WCU di 11 PTN-BH. **Kedua, Academic Recharging**, yaitu program untuk mengirimkan dosen dari 5 perguruan tinggi WCU yang ditunjuk yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga ke institusi PT-LN (Perguruan Tinggi Luar Negeri) yang masuk dalam Top 100 *QS World University Ranking*. **Ketiga, pemberian beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)** sehingga mendorong jumlah mahasiswa asing yang mengambil studi di Indonesia. **Keempat, Bantuan Fasilitas Kerja Sama Internasional (BFKSI)**. Bantuan ini diperuntukan bagi perguruan tinggi yang mampu menunjukkan kinerja yang berkualitas dalam penyelenggaraan kerja sama internasional. Bentuk- bentuk yang difasilitasi berupa program bergelar (Program Gelar Bersama dan Program Gelar Ganda) dan program nongelar (Ambil Kredit atau Alih Kredit). **Terakhir, Penguatan Kelembagaan Kantor Urusan Internasional (PKKUI)**. Program ini disusun dengan tujuan utama untuk meningkatkan jumlah perguruan tinggi yang memiliki lembaga KUI dan memperkuat pengelolaan lembaga tersebut, salah satunya melalui penyelenggaraan program pengembangan kapasitas kelembagaan.

Transformasi Perguruan Tinggi untuk Mandiri

Ditjen Dikti Kemendikbudristek membagi tiga kategori manajemen Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yaitu PTN Badan Hukum (PTN-BH), PTN Badan Layanan Umum (BLU), dan PTN Satuan Kerja (Satker). Pengkategorian ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu.

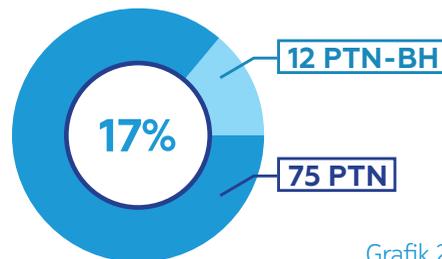
Saat ini, mayoritas PTN masih berkategori BLU dan Satker yang belum mandiri dalam pengelolaan akademik maupun nonakademik dibandingkan klaster PTN-BH.

Jumlah PTN-BH baru mencapai 12 perguruan tinggi atau 17 persen dari total PTN di bawah kelola Dikti yakni 75 PTN.



PTN-BH memiliki kemandirian baik akademik maupun nonakademik seperti kewenangan dalam membuka dan menutup program studi yang ada di lembaganya. PTN-BH juga memiliki kewenangan lebih luas dalam hal pengelolaan keuangan. Sedangkan PTN BLU memiliki kewenangan pengelolaan keuangan bersifat swakelola tetapi harus masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PTN BLU tidak memiliki kewenangan membuka dan menutup program studi.

Dengan status PTN-BH, kampus tersebut memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan akademik maupun nonakademik. Pengelolaan akademik meliputi penetapan norma, memutuskan kebijakan operasional dan melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Sedangkan otoritas nonakademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana. Dengan demikian kampus dapat secara penuh menjalankan visi dan misinya sehingga mestinya dapat lebih cepat berkembang dan kaya inovasi.



Grafik 2.2
Persentase PTN dan PTN-BH

Untuk mendorong peningkatan status kelembagaan PTN, melalui kebijakan Kampus Merdeka yang diprakarsai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberi kemudahan PTN untuk meningkatkan status menjadi PTN-BH. Kebijakan memudahkan perubahan PTN menjadi PTN-BH berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 88/2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Salah satu inti dalam kebijakan Kampus Merdeka adalah memfasilitasi kampus-kampus PTN yang belum berbadan hukum untuk bertransformasi menjadi PTN-BH.

Sebagai perguruan tinggi berbadan hukum, kampus dituntut untuk mampu melakukan **efisiensi, optimasi sumber daya, dan penguatan kelembagaan** yang bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan kemudahan aturan yang baru, akan mendorong PTN Satker dan BLU untuk bertransformasi menjadi PTN-BH. PTN Satker tidak memiliki keleluasan dalam bergerak, misalkan ingin bermitra dengan pihak dunia usaha dan dunia industri untuk mendapatkan pendanaan di luar APBN. Di samping itu, pengaturan tentang keuangan harus dilakukan secara detail per lini, sehingga PTN Satker tidak bisa melakukan perubahan secara cepat. Otonomi yang diberikan kepada PTN-BH supaya mendorong kampus agar bergerak lebih gesit dan cepat dalam mencapai tujuannya yaitu menghasilkan sumber daya manusia unggul dan sebagai episentrum dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Akreditasi Perguruan Tinggi Dalam Negeri

Parameter penting untuk mengukur kapasitas institusi perguruan tinggi adalah dengan melihat dimensi akreditasi institusi kampus tersebut. Akreditasi kelembagaan menjadi pijakan bagi masyarakat untuk menilai manajemen perguruan tinggi apakah telah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan BAN-PT.

Proses akreditasi memiliki sejumlah tujuan dan manfaat. **Pertama**, akreditasi perguruan tinggi memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi kriteria. **Kedua**, proses akreditasi diharapkan mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. **Ketiga**, hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

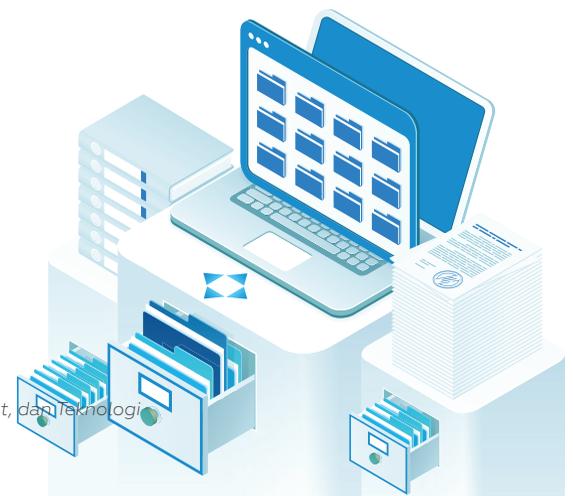
Proses akreditasi perguruan tinggi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*) syarat minimal semata yang harus dipenuhi, **namun juga dapat menilai kinerja** (*performance*) perguruan tinggi. Maka penilaian akreditasi perguruan tinggi wajib mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti.

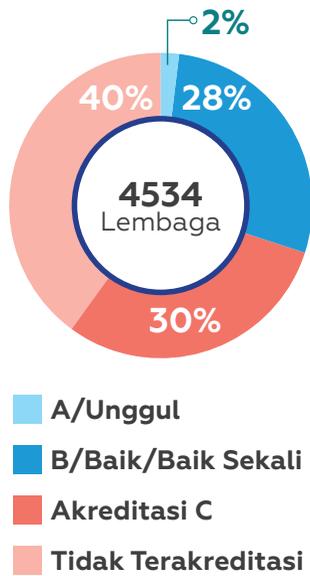
Berdasarkan laporan BAN-PT tahun 2020, sebagian besar perguruan tinggi masih belum terakreditasi 40 persen. Perguruan tinggi dengan akreditasi A atau Unggul, baru tercatat hanya 99 lembaga atau baru kurang lebih 2 persen dari keseluruhan. Perguruan tinggi dengan akreditasi B

Penilaian akreditasi dilakukan dengan menggunakan sejumlah data dan informasi yang tersedia pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).



PDDikti

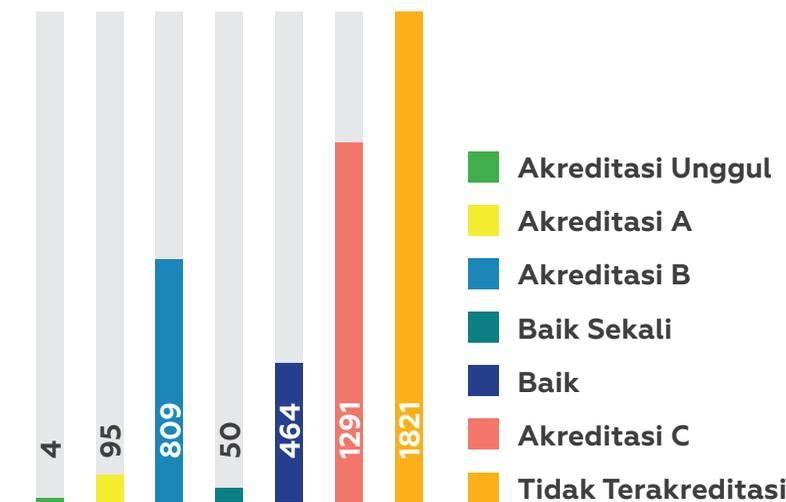




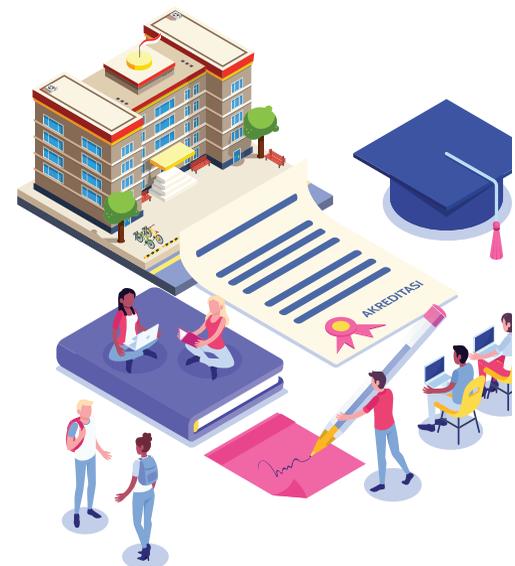
Grafik 2.3
Persentase Akreditasi Lembaga

atau Baik atau Baik sekali sebesar kurang lebih 28 persen. Sedangkan, perguruan tinggi dengan akreditasi C sebesar 28 persen. Masih besarnya jumlah perguruan tinggi yang belum terakreditasi akan menjadi tantangan tersendiri bagi BAN-PT sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan *assessment* maupun Ditjen Dikti Kemendikbudristek yang bertanggung jawab dalam kebijakan pendidikan tinggi secara umum. Hal ini mengingat undang-undang mewajibkan seluruh perguruan tinggi harus terakreditasi untuk dapat mengeluarkan ijazah. Dampaknya adalah lulusan yang berasal dari perguruan tinggi yang belum terakreditasi cenderung dirugikan.

Kondisi ini menjadi potret kualitas kelembagaan pendidikan tinggi nasional yang masih harus ditingkatkan di masa yang akan datang. Saat ini telah terjadi kompetisi yang sehat sehingga tidak ada perbedaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Namun secara umum, rendahnya kualitas kelembagaan memang lebih cenderung dihadapi PTS dibandingkan PTN. Berdasarkan data Ditjen Dikti 2020, perguruan tinggi yang belum mendapatkan akreditasi berasal dari PTS. Adapun yang sudah mendapatkan akreditasi, rata-rata PTS baru terakreditasi level C.



Grafik 2.4 Lembaga yang Terakreditasi

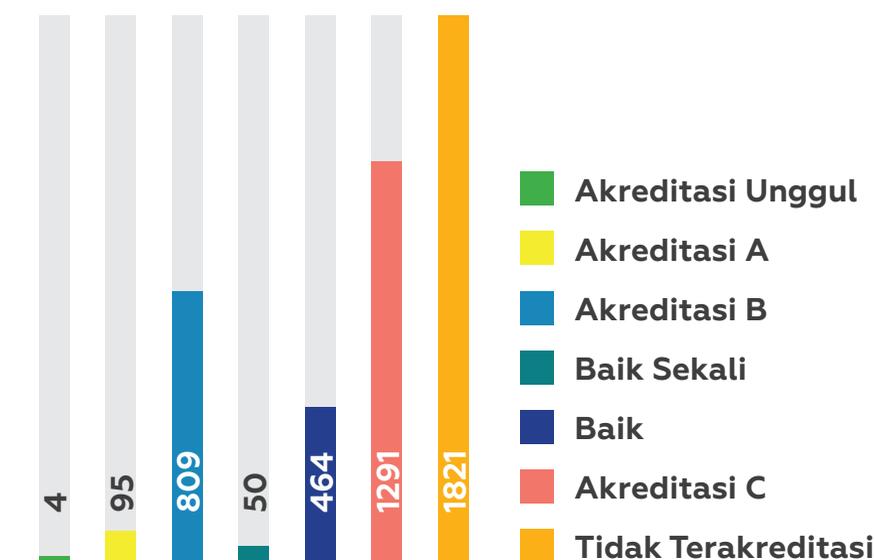


Akreditasi Program Studi Cermin Kualitas Perguruan Tinggi

Akreditasi merupakan sebuah proses penilaian program studi (prodi) sesuai kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hal ini untuk melihat kelayakan prodi atas dasar kriteria yang mengacu. Akreditasi ini juga sangat penting untuk bahan pertimbangan bagi calon mahasiswa maupun pengguna lulusan. Akreditasi sangat penting karena menjadi jaminan mutu bagi sebuah proses pembelajaran di sebuah program studi. Dengan begitu, cara termudah bagi publik untuk menilai sebuah program studi adalah lewat akreditasi. Misalnya, saat ini sejumlah institusi dalam perekrutan pegawai

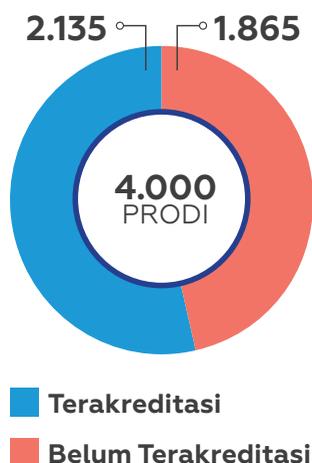
mensyaratkan akreditasi minimal B atau bahkan dalam penerimaan CPNS pun saat ini ada formasi *Cum Laude* yang salah satu syaratnya akreditasi prodi A atau unggul.

Pada 2020, **prodi berkategori unggul atau A baru mencapai 4.498 atau sekitar 15 persen. Prodi yang belum terakreditasi** masih relatif besar jumlahnya sekitar **5.722 atau sekitar 19 persen**. Ditjen Dikti juga memiliki pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan **prodi dari klaster C** yang jumlahnya masih tergolong besar **5167 atau 16 persen**.



Grafik 2.5 Program Studi yang Terakreditasi





Grafik 2.6
Persentase Akreditasi
Program Studi Kesehatan

Selain BAN-PT, akreditasi program studi juga dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Salah satu LAM yang telah mapan adalah LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes). Di Indonesia saat ini, ada hampir 4.000 program studi kesehatan, dan baru 2.135 program studi yang terakreditasi. Dengan banyaknya program studi kesehatan ini, maka harus ada akreditasi untuk menjamin mutu pendidikannya. LAM-PTKes saat ini membawahi 30 profesi tenaga kesehatan yang menjamin kualitas mutu program studi. Dengan mutu pendidikan yang baik, diharapkan lulusan tenaga kesehatan, baik itu perawat, dokter, apoteker atau bidan, bisa memenuhi standar yang dimiliki organisasi profesi masing-masing

Selain akreditasi nasional yang dikeluarkan BAN-PT maupun LAM PT, program studi kampus nasional juga didorong untuk mendapatkan rekognisi secara global. Sebagai tolok ukur kualitas perguruan tinggi, salah satunya ditandai dengan akreditasi dan atau sertifikasi internasional yang diraih oleh program studi yang diselenggarakan di perguruan tinggi tersebut. **Dengan akreditasi internasional, kampus mampu menunjukkan kualitas pendidikan tinggi telah setara dengan dunia internasional sehingga tercipta reputasi kelas dunia.** Akreditasi internasional program studi juga merupakan cara menunjukkan kualitas *outcome* pendidikan.

Berdasarkan data terakhir, baru 104 program studi yang telah mendapatkan akreditasi internasional. Jika menilik jumlah prodi yang lebih dari 23.000 maka jumlahnya masih tergolong relatif kecil. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar kita untuk

UGM dan ITB
menyumbang 60%
program studi yang
terakreditasi internasional.



terus mendorong praktik baik dalam meraih akreditasi internasional prodi. Untuk itu diperlukan sebuah langkah lanjut sehingga capaian akreditasi internasional yang telah diraih dapat ditularkan ke program studi nasional dan membangun *multitier* Lembaga Akreditasi Mandiri di Indonesia.

Nama Perguruan Tinggi	NPSN	Jumlah Akreditasi Prodi Internasional
Institut Pertanian Bogor	002003	1
Institut Teknologi Bandung	002001	30
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	002002	4
Universitas Airlangga	001004	8
Universitas Andalas	001006	3
Universitas Bina Nusantara	031038	6
Universitas Brawijaya	001019	1
Universitas Gadjah Mada	001001	30
Universitas Indonesia	001002	7
Universitas Islam Indonesia	051001	5
Universitas Mercu Buana	031019	1
Universitas Pendidikan Indonesia	001034	7
Universitas Sebelas Maret	001027	1
Grand Total		104

Tabel 2.1 Akreditasi Prodi Internasional

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menggulirkan Bantuan Program Fasilitasi Akreditasi Internasional Program Studi. Pada Bantuan Program Fasilitasi Akreditasi Internasional Program Studi tahun 2020 ini bantuan diberikan kepada program studi yang sedang dalam proses pengajuan akreditasi internasional. Lembaga akreditasi internasional yang dituju adalah sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.

Mendongkrak Mutu melalui Kolaborasi

Mulai tahun 2020, Ditjen Dikti menargetkan 1.000 perguruan tinggi Indonesia telah menjalin kerja sama baik dengan mitra nasional maupun internasional.

Setiap perguruan tinggi tidak hidup di dalam ruang hampa sendirian. Oleh karena itu, dalam peningkatan mutu penyelenggaraan dibutuhkan kolaborasi dengan mitra eksternal baik perguruan lain maupun dunia usaha dan industri. Target jumlah perguruan tinggi tersebut setiap tahunnya ditingkatkan hingga pada **tahun 2024 ditargetkan telah ada 1.200 perguruan tinggi** yang **telah aktif melakukan kegiatan kerja sama**.

Kerja sama juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kebijakan utama Kemendikbudristek yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program Kampus Merdeka tidak akan dapat tercapai jika tidak adanya kerja sama. Kerja sama perguruan tinggi juga menjadi salah satu Indikator Kegiatan Utama (IKU) Perguruan Tinggi. Dalam IKU 6 ditargetkan persentase program studi S-1 dan D-4 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. **Pencapaian IKU** ini juga **memiliki dampak terhadap bonus anggaran** yang dapat diraih oleh **perguruan tinggi**. Mitra kerja sama yang ditargetkan untuk mencapai IKU 6 ini adalah **perusahaan multinasional, perusahaan nasional berstandar tinggi, perusahaan teknologi digital, perusahaan startup kelas dunia, organisasi nirlaba kelas dunia, organisasi multilateral, perguruan tinggi QS 100, instansi pemerintah, BUMN atau BUMD dan rumah sakit**.

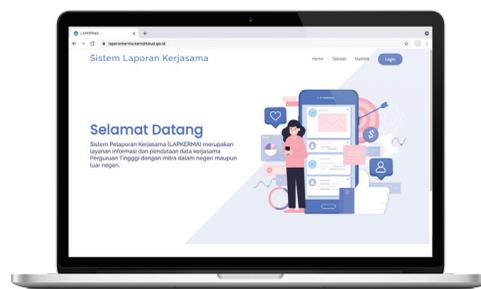
Dalam konteks Merdeka Belajar, perguruan tinggi bisa saja mencari kelompok kampus yang berada dalam klaster yang sama dan memiliki kebutuhan yang sama. Akan tetapi yang perlu ditekankan adalah kerja samanya tidak hanya sebatas di atas kertas saja. Kerja sama wajib dikembangkan pelaksanaannya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan.



Untuk menopang proses kerja sama di tingkat perguruan tinggi, Ditjen Dikti mendukung berbagai program seperti pembuatan sistem pelaporan kerja sama perguruan tinggi yang terintegrasi dengan PDDikti. Melalui laman ini, perguruan tinggi dapat sewaktu-waktu melaporkan kegiatan kerja samanya melalui pelaporan dokumen kesepahaman yang telah disepakati dengan mitranya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun

Sistem Laporan Kerja Sama ini dijalankan secara daring melalui laman laporankerma.kemdikbud.go.id.

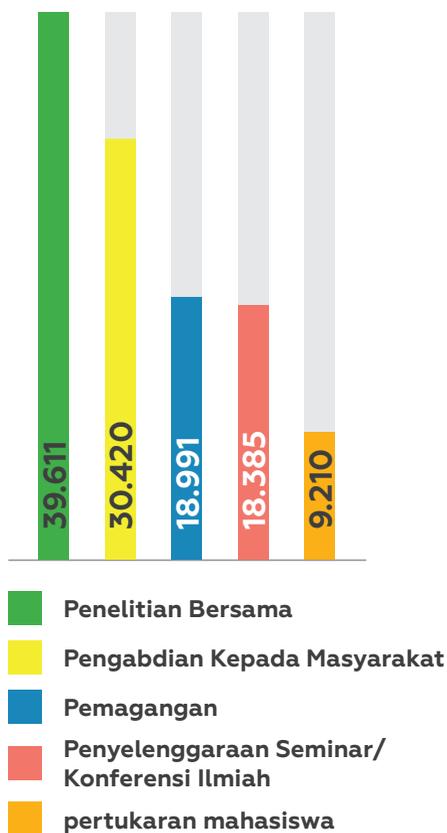


Jenis Kegiatan	Jumlah Kerja Sama
Penelitian Bersama	39.611
Pengabdian Kepada Masyarakat	30.420
Pemagangan	18.991
Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah	18.385
Pertukaran Mahasiswa	9.210
Pertukaran Dosen	6.262
Gelar Ganda	5.949
Penerbitan Berkala Ilmiah	4.566
Pengembangan Kurikulum/Program Bersama	4.043
Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan	3.278
Pengembangan Sistem/Produk	2.956
Pelatihan dosen dan instruktur	1.670
Gelar Bersama	1.622
Penelitian Bersama-Artikel/Jurnal Ilmiah	1.572
Penyaluran Lulusan	1.421
Pengiriman Praktisi Sebagai Dosen	815
Visiting Professor	798
Transfer Kredit	734
Penelitian Bersama-Prototipe	200
Penelitian Bersama-Paten	178

Tabel 2.2 Laporan Kerja Sama Perguruan Tinggi



Grafik 2.7
Persentase Perguruan Tinggi yang telah melakukan Kerja Sama



Grafik 2.8
Jenis Kerja Sama Terbanyak

melalui laman laporankerma.kemdikbud.go.id hingga bulan Desember 2020, terdapat 1.067 perguruan tinggi yang telah melakukan kerja sama. Dari 1.067 perguruan tinggi, sebanyak 90 perguruan tinggi merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 977 merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Total dari 1.067 perguruan tinggi yang melakukan kerja sama mencatatkan sebanyak **96.464 dokumen kerja sama dengan mitra baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri.**

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa IKK perguruan tinggi yang telah melakukan kerja sama pada **tahun 2020 dapat dicapai dengan baik dengan capaian 106 persen.** Namun demikian tentu capaian ini masih dapat dioptimalkan dengan berbagai skema kebijakan dari Ditjen Dikti. Dari data terlihat bahwa belum semua PTN di bawah koordinasi Kemendikbudristek yang telah melakukan pelaporan kerja sama. **Dari 122 PTN yang ada di bawah Kemendikbudristek, baru 73 persen PTN yang telah melakukan pelaporan dokumen kerja sama.** Jumlah ini dapat ditingkatkan melalui berbagai kebijakan afirmasi yang dapat dilakukan oleh Ditjen Dikti.

Selanjutnya, berdasarkan data laporan dapat disajikan bentuk kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh mitra. Seperti pada tampilan tabel 2.2, jenis kegiatan kerja sama yang paling banyak dilakukan yaitu penelitian bersama (39.611 kerja sama), pengabdian kepada masyarakat (30.420 kerja sama), pemagangan (18.991 kerja sama), penyelenggaraan seminar/konferensi ilmiah (18.385 kerja sama) dan pertukaran mahasiswa (9.210 kerja sama). Kegiatan kerja sama terkait tridarma perguruan tinggi masih menjadi fokus utama perguruan tinggi dalam menjajaki kerja sama dengan mitranya.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2020 juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai mitra baik dalam dan luar negeri yang dapat ditindaklanjuti pada level perguruan tinggi. Kebijakan pentahelix dimana terdapat sinergi yang kuat dari unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media sangat penting guna membangun ekosistem pendidikan tinggi yang produktif, inovatif dan solutif. Ditjen Dikti menjalin kerja sama dengan 13 mitra dalam negeri antara lain PT Telekomunikasi Indonesia, PT XL Axiata Tbk.,

PT Indosat Tbk., PT Hutchison 3 Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, Forum Dekan Teknik Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Kadin Jawa Barat, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, PT Swasembada Media Bisnis, Yayasan CEO Indonesia, Maarif Institute for Culture and Humanity, dan Indonesian International Education Foundation (IIEF). Kerja sama juga dijalin dengan mitra luar negeri yaitu PT Huawei Tech Investment, ARIA Japan, dan Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan.

MITRA KERJA SAMA DITJEN DIKTI TAHUN 2020

Dalam Negeri



PT. Telkom Indonesia



PT. Indosat Tbk.



PT. Hutchison 3 Indonesia



PT. XL Axiata Tbk.



Persatuan Insinyur Indonesia



Forum Dekan Teknik Indonesia



KADIN DKI Jakarta



KADIN Jawa Barat



Himpunan Pengusaha Muda Indonesia



PT. Swasembada Media Bisnis



Yayasan CEO Indonesia



Maarif Institute for Culture and Humanity



Indonesian International Education Foundation

Luar Negeri



Ministry of Internal Affairs and Communications, JAPAN
Mitra ARIA Jepang



HUAWEI
PT. Huawei Tech Investment

40

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Adaptasi Pembelajaran Berbasis Jaringan

Memasuki era digital, kemampuan sumber daya dalam menguasai literasi baru menjadi hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Digitalisasi dan otomatisasi dalam di berbagai aspek kehidupan, mendorong kita untuk wajib beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. Kompetensi baru diperlukan untuk mampu bersaing di era digital juga perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Sumber daya manusia Indonesia dituntut untuk mampu beradaptasi dan melakukan peningkatan kapasitas untuk mampu menguasai literasi-literasi baru, di antaranya adalah literasi teknologi dan literasi digital.

Salah satu bentuk pergeseran adaptasi yang terjadi di dalam praktik pendidikan tinggi adalah makin pentingnya pembelajaran daring dalam proses alih pengetahuan di kampus. Namanya sayangnya, **pembelajaran daring di kampus belum berjalan secara ideal**. Kondisi ini dilatarbelakangi sejumlah faktor. **Pertama, dari sisi budaya pembelajaran**, sebagian besar pendidik maupun mahasiswa cenderung belum terbiasa menggunakan sistem pembelajaran daring. Kondisi ini menjadi potret terjadinya kesenjangan digital atau literasi digital. Dosen dan mahasiswa

perlu bekerja keras untuk kompeten dalam menggunakan pembelajaran daring. **Kedua, pembelajaran daring menghadapi kendala jaringan internet**. Indonesia saat ini masih menghadapi kendala kesenjangan digital antar wilayah dalam akses internet. Masalah ketiga, belum semua perguruan tinggi memiliki sistem pembelajaran daring, baik secara infrastruktur maupun *platform* pembelajaran.

Terlebih lagi di 2020, pembelajaran kampus menghadapi tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya yaitu wabah Covid-19 yang memaksa pembelajaran tatap muka seminimal mungkin dihindari untuk mitigasi dampak pandemi. Kampus "dipaksa" untuk menjalani pembelajaran daring. **Masa pandemi yang belum menentu kapan berakhir menjadi tantangan berat bagi perguruan tinggi ke depan**. Kita semua berharap perguruan tinggi mampu adaptif untuk menghasilkan kualitas pembelajaran daring setara seperti layaknya sebelum pandemi menerpa. Mahasiswa menyerap ilmu dengan baik sehingga pembelajaran daring diharapkan tidak serta merta mengorbankan kualitas lulusan.

Selain mempercepat pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh di kampus-kampus Indonesia, pandemi menjadi sebuah ujian dan tantangan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seluruh civitas academica di Indonesia mencoba sebuah konsep pembelajaran yang bersifat mandiri.

Untuk menyasiasi sejumlah masalah di atas, Ditjen Dikti telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong transformasi pendidikan digital serta menjaga keberlangsungan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. **Pertama**, Ditjen Dikti memfasilitasi perguruan tinggi untuk dapat melakukan perubahan paradigma pembelajaran modern di perguruan tinggi dan menerapkan inovasi-inovasi pembelajaran digital (berbasis ICT) serta menerapkan prinsip-prinsip implementasi sistem pendidikan jarak jauh atau modus pembelajaran jarak jauh (*e-learning* dalam arti yang seluas-luasnya seperti *online learning*, *blended learning*, *flipped learning*, dan lain-lain).

Pada tahun 2020 Ditjen Dikti proaktif menyiapkan pelatihan pembelajaran daring bagi 100 ribu dosen. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya penyegaran dan peningkatan keterampilan para dosen dalam menyampaikan materi melalui berbagai *platform* dan teknologi pendukung pembelajaran daring. Pelatihan ini juga memperhatikan ketersediaan akses internet. Ditjen Dikti pun menyusun modul digital untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). **Materi dalam modul digital tersebut mencakup lima sektor penggerak ekonomi di Indonesia, yakni agribisnis, pariwisata, layanan kesehatan, penjualan daring, dan ekspor tenaga kerja.** Terdapat sekitar 600 modul terkait penggerak ekonomi tersebut. Modul ini nantinya dapat dimanfaatkan dosen maupun mahasiswa.

Pembelajaran di masa akan datang memungkinkan terbentuk sebuah normal baru di mana akan sangat bergantung pada penggunaan gawai dan layar komputer alih-alih tatap muka.

Pembelajaran daring bagi
100 ribu
dosen



600 modul
Penggerak Ekonomi



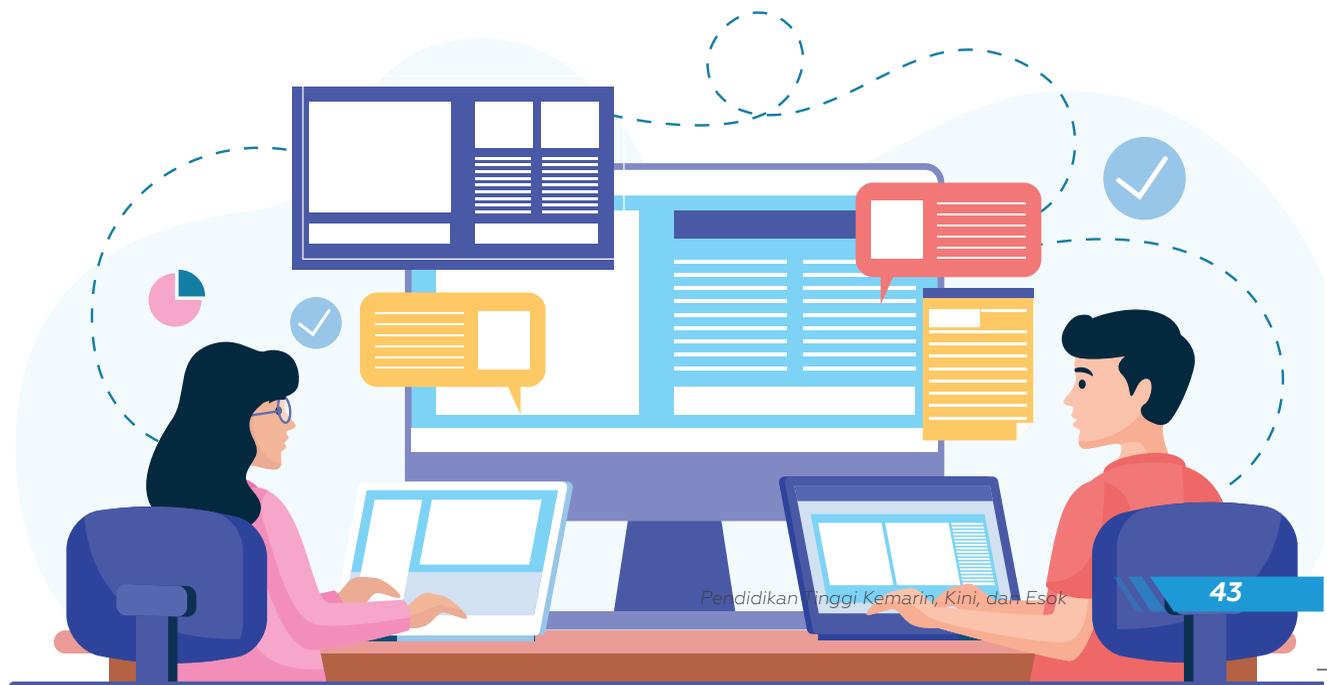
Kedua, Ditjen Dikti juga telah memberikan Bantuan Dana Inovasi Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital, Bantuan Dana Inovasi Pengembangan Modul Digital, Inovasi Modul Digital *Problem Based Learning* dan *Project Based Learning*, dan pembekalan atau pelatihan pembelajaran daring secara daring dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Ketiga, untuk mendukung pembelajaran daring, Ditjen Dikti telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk penyediaan internet di daerah blank spot.

Keempat, Ditjen Dikti memiliki berbagai program kegiatan terkait pendidikan berbasis teknologi informasi ini, seperti upaya memaksimalkan *platform* Sistem Pembelajaran Daring (SPADA). *Platform* digital antarperguruan tinggi itu kini **telah memiliki 3.000 modul yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun dosen dalam kegiatan belajar mengajar secara daring.**

Dosen dan mahasiswa dapat mengakses langsung sumber pembelajaran dari perguruan tinggi lain di www.spada.kemdikbud.go.id. Sementara, bagi perguruan tinggi dengan keterbatasan sumber daya pembelajaran daring, Ditjen Dikti menyediakan kuliahdaring.kemdikbud.go.id.

Terakhir, kerja sama dilakukan dengan berbagai *platform* swasta untuk menyediakan aplikasi pembelajaran daring seperti Google, Huawei, Microsoft. Terakhir, pendidikan daring membutuhkan jaringan internet yang seringkali biayanya mahal sehingga memberatkan kalangan mahasiswa. Ditjen Dikti dan berbagai perguruan tinggi mengupayakan pengurangan beban ekonomi mahasiswa untuk mengeluarkan biaya kuota internet tersebut dengan subsidi kuota dan/atau pulsa. **Semangat gotong royong sangat terasa, ketika sejumlah penyedia layanan telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, XL melalui program tanggung jawab perusahaan turut berpartisipasi memberikan akses internet gratis**



Benahi Strategi Kejar Prestasi

Kualitas kelembagaan pendidikan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang dibutuhkan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi institusi pendidikan tinggi nasional tidak hanya bersaing dengan sesama perguruan tinggi nasional tetapi juga suatu keharusan untuk melebarkan sayapnya ke dunia internasional.

Namun kondisi perguruan tinggi Indonesia masih belum optimal, terlihat dari kualitas kelembagaan di kancah internasional masih tertinggal dalam peringkat *World Class University*. **Indonesia di tahun 2020 menelurkan tiga perguruan tinggi ITB, UI, dan UGM yang sudah masuk liga 500 perguruan tinggi terbaik di dunia.** Apa yang dicapai mereka patut menjadi praktik baik bagi institusi perguruan lainnya sehingga perguruan tinggi nasional lainnya juga memacu dirinya untuk berkompetisi. Sedangkan bagi ITB, UI dan UGM juga harus terus meningkatkan kualitasnya sehingga dapat mengungguli perguruan tinggi lain di atasnya.

Dorongan untuk terus berkompetisi di kancah global perlu semakin diinternalisasikan. **Untuk itu, dalam jangka pendek, perlu adanya fokus pada penguatan kapasitas dalam standar nasional yaitu akreditasi institusi.** Sementara itu, internasionalisasi perguruan tinggi dapat menjadi fokus bagi PTN-BH atau PTS yang sudah mapan yang memiliki sumber daya dan jaringan internasional lebih baik.

Indonesia memiliki 4.000 lebih perguruan tinggi, namun kualitas perguruan tingginya masih perlu ditingkatkan.

Kualitas kelembagaan perguruan tinggi ke depan dapat diakselerasi dengan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sejumlah kebijakan seperti kemudahan dalam sistem akreditasi perguruan tinggi, dorongan untuk menjadi PTN-BH, dapat menjadi katalis untuk mendorong perbaikan kapasitas kelembagaan perguruan tinggi nasional.

Ke depan, kinerja kelembagaan di perguruan tinggi diharapkan dapat bergerak semakin baik. Semakin bertambahnya jumlah perguruan tinggi yang masuk klaster PTN-BH maupun perguruan tinggi yang masuk klaster I pemeringkatan akan menjadi tolok ukur makin membaiknya kualitas mutu perguruan tinggi Indonesia. Ditjen Dikti terus berupaya untuk memberikan dukungan baik dari sisi hibah anggaran maupun pendampingan untuk mempercepat penguatan kapasitas mutu kelembagaan perguruan tinggi. Gotong royong antara Ditjen Dikti dan perguruan tinggi sangat diperlukan sehingga saling menopang dalam perbaikan mutu kelembagaan.





DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



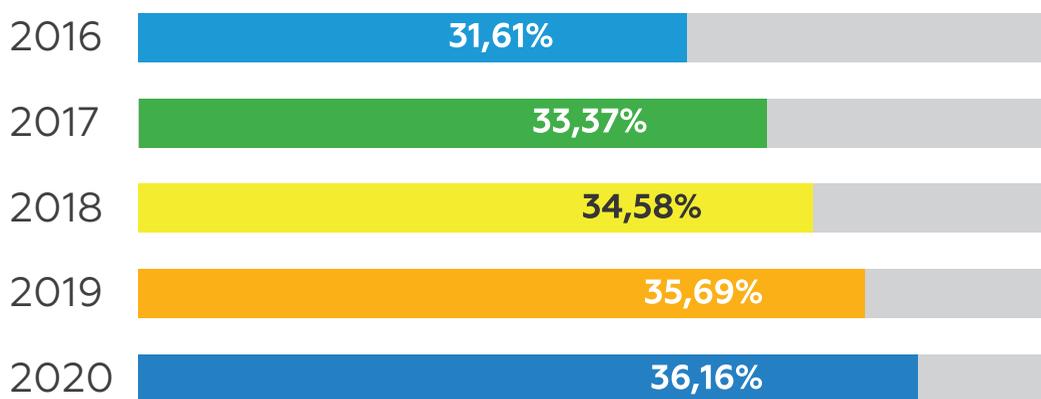


SDM Profesional untuk Bonus Demografi

Melihat angka partisipasi kasar (APK) lima tahun terakhir, terjadi peningkatan persentase penduduk yang kuliah ke perguruan tinggi untuk jenjang diploma dan sarjana. **Di tahun 2020, tercatat 36,16 persen penduduk usia 19-23 tahun dari total 22.120.400 jiwa yang bisa menikmati pendidikan tinggi. APK ini perkembangan dari tahun 2016 yang jumlahnya 31,61 persen.**

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek, untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi semua anak muda hingga daerah 3T, mampu meningkatkan APK pendidikan tinggi. Terbukanya peluang bagi anak muda untuk masuk ke perguruan tinggi, tentunya meningkatkan jumlah SDM Indonesia yang berpendidikan tinggi.

Perguruan tinggi berperan membekali mahasiswa selama 1-4 tahun untuk jenjang diploma dan sarjana dengan membangun karakter, *softskill*, dan *hardskills* yang dibutuhkan sehingga mereka siap memasuki dunia usaha/industri, baik sebagai profesional maupun wirausaha. Peningkatan SDM yang berkelanjutan juga disediakan dengan melanjutkan pendidikan di jenjang profesi, magister (S-2), hingga doktor (S-3).



Grafik 3.1 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Nasional dari Tahun 2016-2020.

Keluaran atau *output* perguruan tinggi yang salah satunya dilihat dari jumlah lulusan PT yang terus bertambah, di satu sisi menggembirakan. Namun, ada tantangan yang harus dipastikan perguruan tinggi bahwa mahasiswa lulusan PT memang harus mencapai kualitas sebagai kaum intelektual yang memiliki karakter baik serta memiliki kecakapan **hardskills** dan **softskills** yang membuat mereka mampu jadi sosok SDM unggul di bidang masing-masing. Tak sekadar PT menunjukkan mahasiswa yang lulus tepat waktu atau tidak putus kuliah (**drop out**).

Aspek relevansi lulusan dengan dunia kerja ataupun lulusan yang mampu membuka peluang kerja bagi dirinya dan masyarakat luas harus dikedepankan. Jadi, perguruan tinggi tak sekadar berlomba-lomba menghasilkan banyak lulusan. Perguruan tinggi harus fokus menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu berkompetisi secara positif.

Dengan demikian, bangsa ini akan menikmati bonus demografi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Sebab, berlimpah lulusan dengan relevansi yang rendah hanya akan menjadi bencana.

Tanpa jaminan PT yang berkomitmen menyiapkan lulusan yang mumpuni, bertambahnya sarjana hingga doktor, bisa jadi beban. Sebab, data dari Badan Pusat Statistik yang memotret angkatan kerja berdasarkan pendidikan, jumlah pengangguran terdidik dari lulusan PT (diploma/sarjana) juga cukup tinggi. Padahal, jumlah pekerja dengan status lulusan diploma/pendidikan tinggi masih kurang

dibanding yang sekolah menengah ke bawah, namun sumbangan pada pengangguran terbuka sudah nyata.

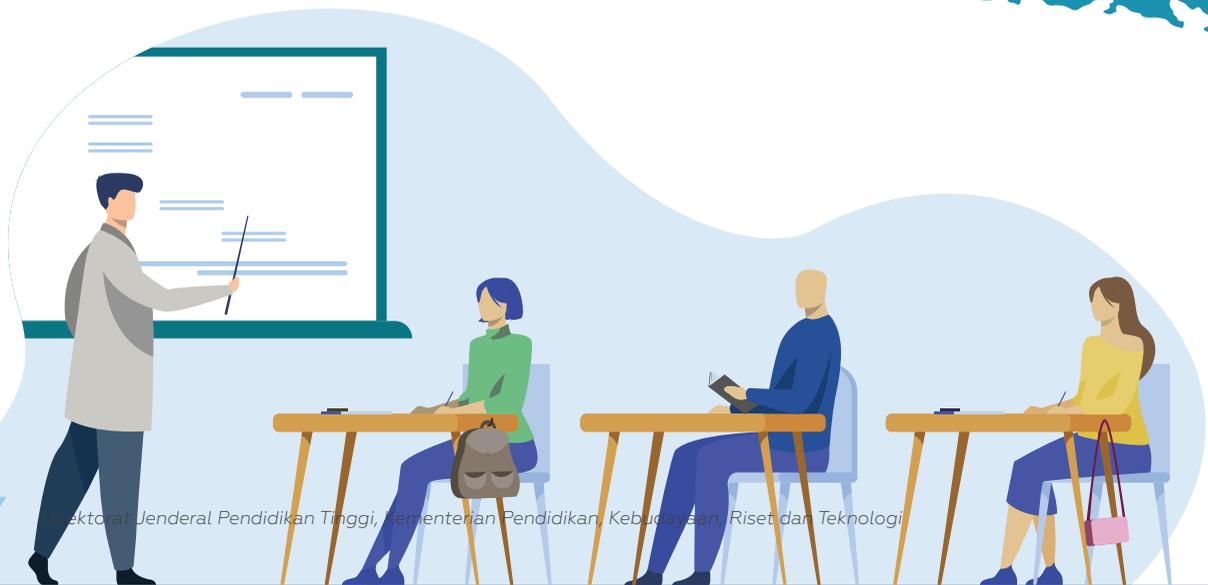
Mayoritas penduduk yang bekerja diidentifikasi sebagai tenaga produksi, operator, alat-alat angkutan dan pekerja kasar. Sementara yang masuk dalam kategori tenaga profesional, teknisi, dan yang sejenis berkisar 6,97 persen. Apalagi yang di kategori tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan di angka 1,15 persen.

Kebutuhan tenaga kerja dari lulusan PT semakin dibutuhkan untuk membuat dunia usaha/industri Indonesia kompetitif. Namun, tingkat pengangguran terbuka (survei angkatan kerja nasional) sekolah tinggi harus jadi perhatian. **Output** PT yang dilihat dari jumlah lulusan yang dihasilkan jadi komponen kunci keberlanjutan suatu pendidikan tinggi. Tentu saja kesuksesan PT menghasilkan lulusan menjadi SDM handal perlu didukung dengan produk akademik lain yang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

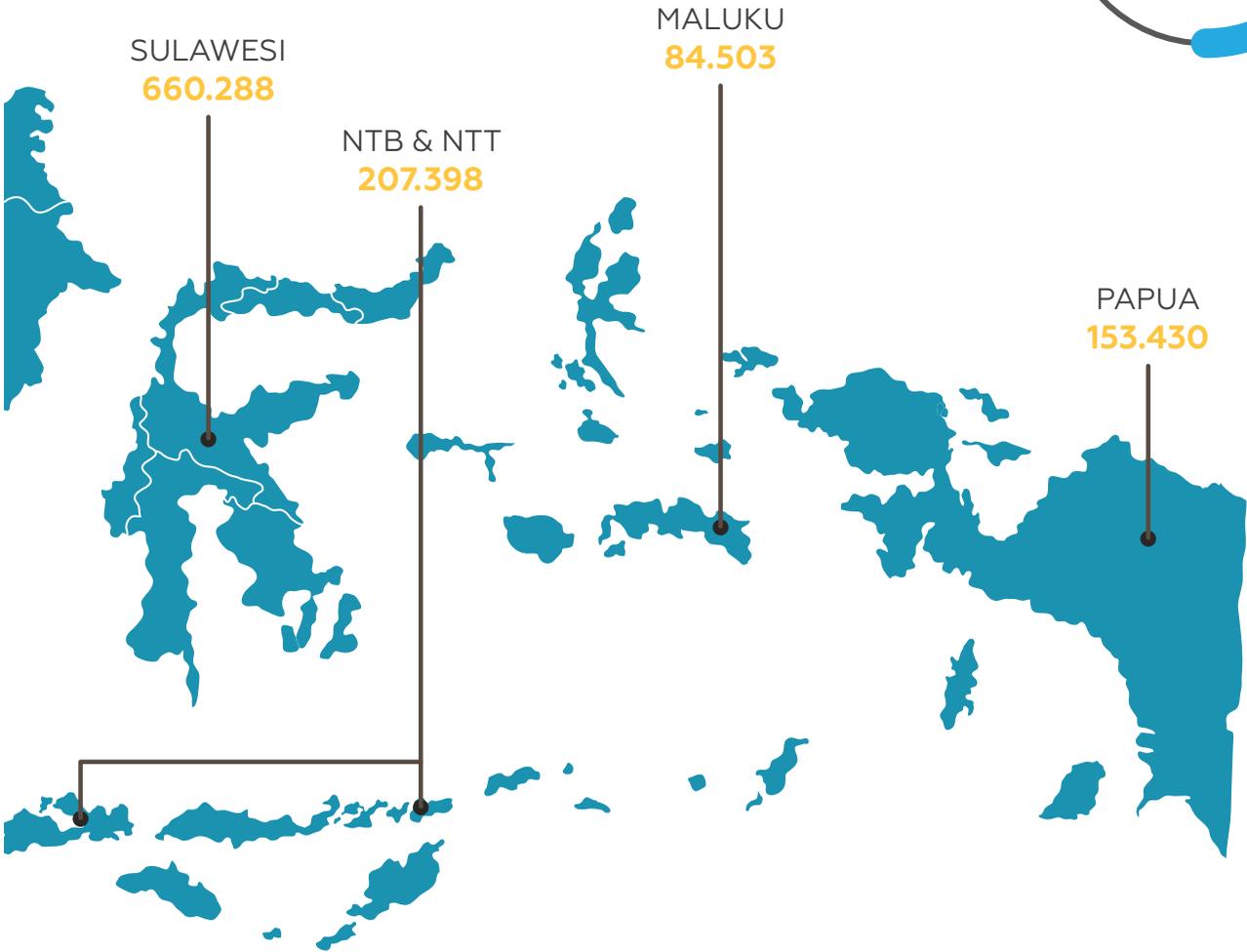
Di Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (Keadaan Pekerja di Indonesia, Agustus 2020) tahun 2018 mencapai 5,91 persen, tahun 2019 ada 5,71 persen, di tahun 2020 mencapai 7,51 persen.

PERKEMBANGAN MAHASISWA TERDAFTAR

Jumlah Mahasiswa Terdaftar
Perguruan Tinggi Nasional
di 34 Provinsi.



TAHUN
2019/2020
MENCAPAI TOTAL
7.369.009

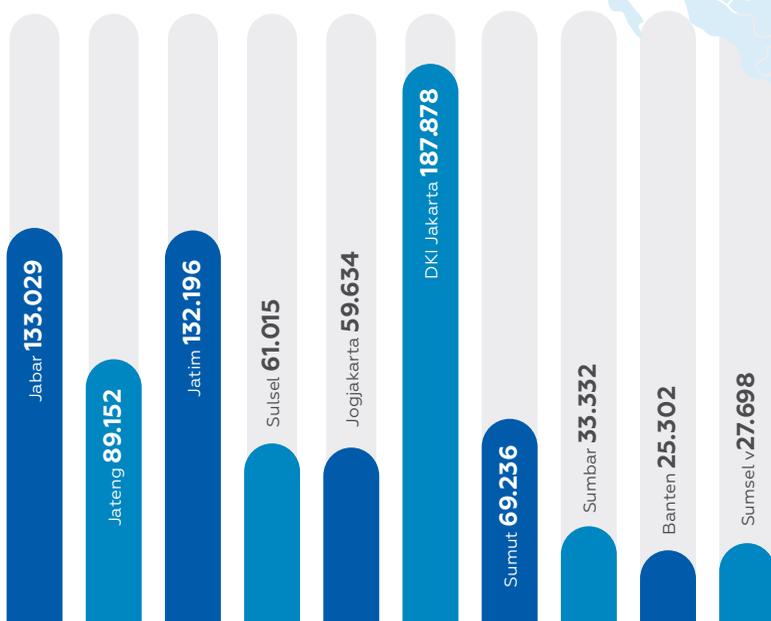


JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR



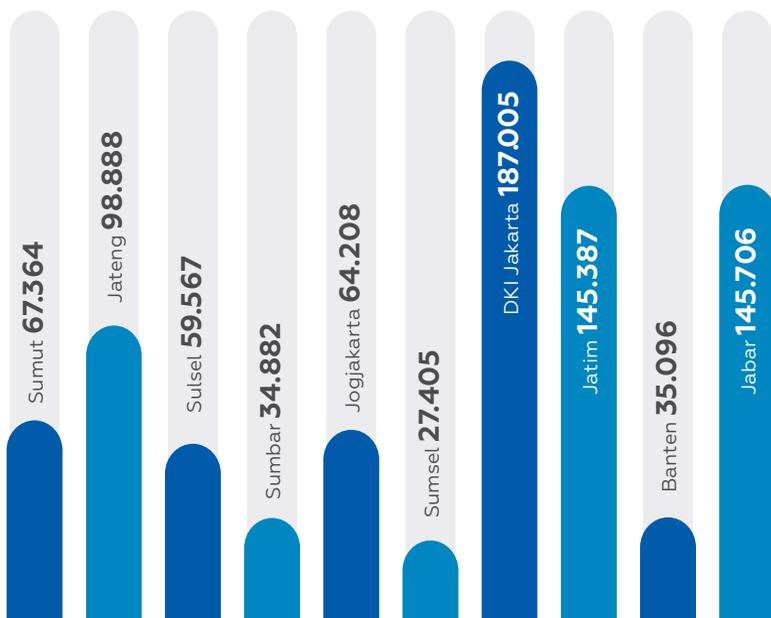
Grafik 3.2 Perkembangan Jumlah Mahasiswa Terdaftar Perguruan Tinggi Nasional Tahun 2016-2020.

PERKEMBANGAN JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI TIAP PROVINSI 2016-2020



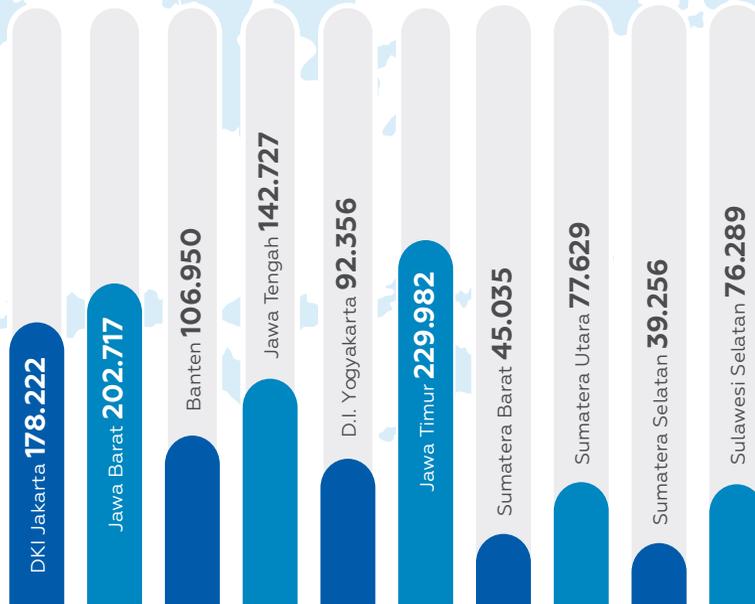
Perkembangan
Jumlah Lulusan
Perguruan Tinggi (PT)
2016/2017

TOTAL
1.046.141



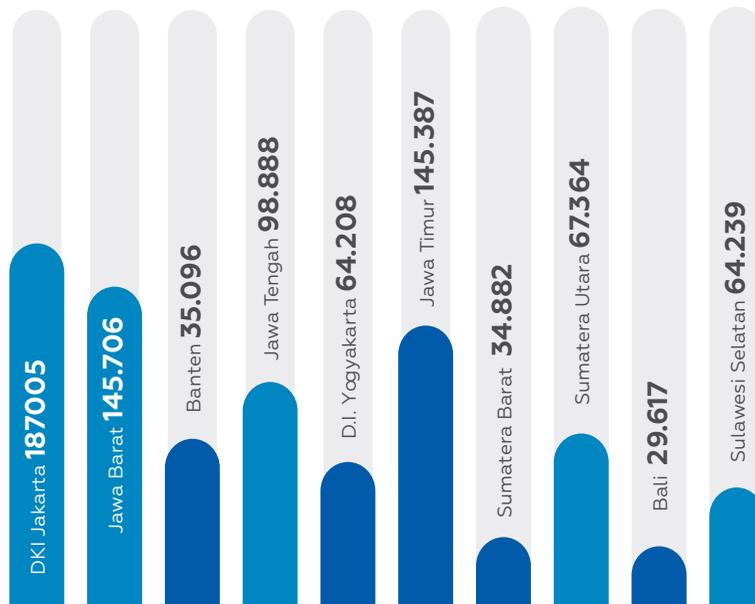
Perkembangan
Jumlah Lulusan
Perguruan Tinggi (PT)
2017/2018

TOTAL
1.113.375



**Perkembangan
Jumlah Lulusan
Perguruan Tinggi (PT)
2018/2019**

TOTAL
1.521.834



**Perkembangan
Jumlah Lulusan
Perguruan Tinggi (PT)
2019/2020**

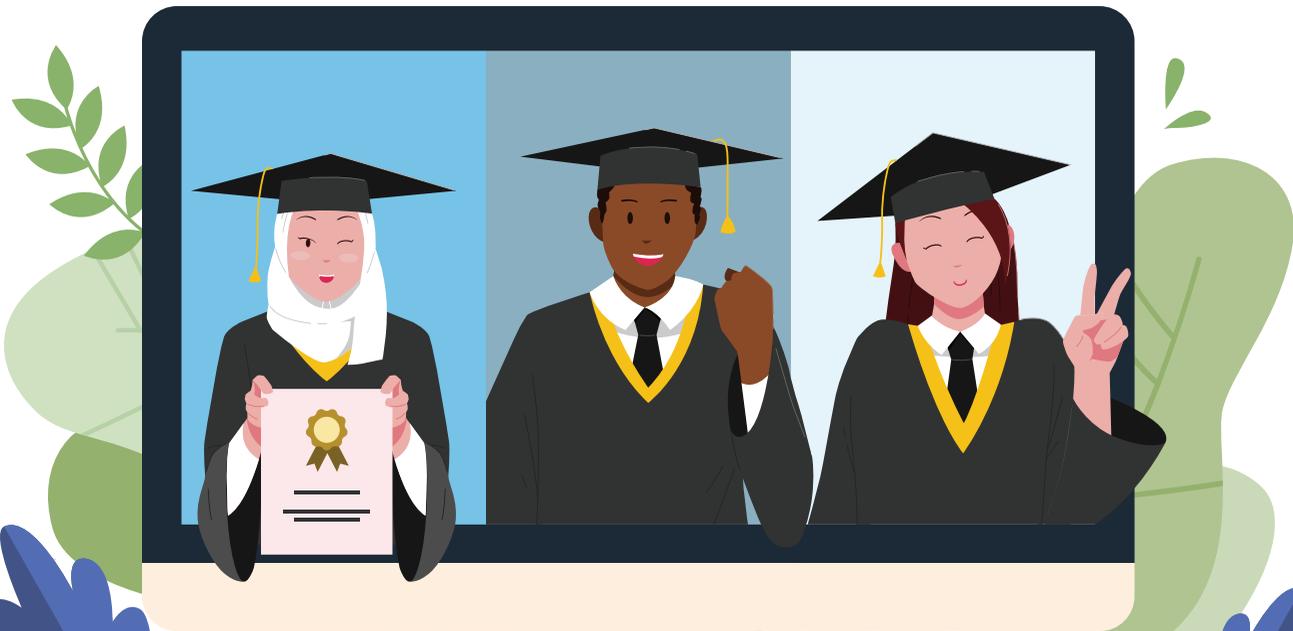
TOTAL
1.330.864

Grifik 3.3 Perkembangan Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi Tiap Provinsi Secara Nasional Tahun 2016-2020.

Tridarma perguruan tinggi yang berkualitas tentunya akan menghasilkan lulusan PT yang menopang kemajuan bangsa.

Lulusan PT yang jadi SDM unggul tak lepas dari sentuhan pendidikan tinggi berkualitas yang didukung dengan dosen produktif. Perguruan tinggi sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan sejatinya mampu menghasilkan produk akademik yang berkualitas tinggi yang mampu mengantisipasi tantangan zaman. Untuk itulah, kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat tak kalah penting dikembangkan, selain akademik.

Geliat penelitian tentunya mendorong peningkatan publikasi ilmiah para dosen yang bisa jadi rujukan dalam pengembangan iptek di tanah air dan dunia. Kebijakan pemerintah untuk mengucurkan anggaran riset dan pengembangan yang makin tinggi, masih harus dibuktikan dengan semangat para dosen berkarya menghasilkan pemikiran ilmiah lewat publikasi ilmiah bermutu. Peningkatan publikasi ilmiah dari perguruan tinggi sudah dirasakan, namun dengan pekerjaan rumah untuk terus meningkatkan mutu, yakni citasi terhadap publikasi ilmiah yang dihasilkan para dosen.



TAHUN	DESIGN	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PROTOTYPE	TEKNOLOGI TEPAT GUNA	GRAND TOTAL
2013	17	197	48	293	555
2014	37	424	122	513	1.096
2015	54	677	210	720	1661
2016	67	894	666	956	2.583
2017	53	917	662	677	2.309
2018	160	2.774	8168	1.366	5.116
2019	162	1.720	578	8341	2.801
GRAND TOTAL	550	7.603	3.102	4.866	16.121

Tabel 3.1 Capaian Hasil Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2013-2019.

Upaya peningkatan pengembangan dan riset perguruan tinggi harus mengejar kuantitas sekaligus kualitas. Berdasarkan penilaian Scientific Journal Ranking, produktivitas penelitian dilihat dari jumlah dokumen (publikasi), jumlah publikasi yang layak kutip, jumlah kutipan, jumlah kutipan sendiri, dan jumlah kutipan per dokumen.

Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memiliki kesadaran untuk mewujudkan janji yang telah diberikan kepada masyarakat dan bangsa guna menghasilkan lulusan yang berkualitas. Perguruan tinggi berperan penting dalam menghasilkan intelektual berkualitas yang dapat menghargai orang lain dan memiliki semangat untuk berkontribusi memajukan bangsa dan negara.

Perguruan tinggi punya peran penting untuk menopang produktivitas iptek bangsa. Maka, penelitian dan pengembangan mutlak dilakukan, bahkan perguruan tinggi terus didorong menjadi universitas riset. Hal ini ditunjukkan dengan publikasi ilmiah dan paten.

Namun, di laporan tahun 2018, sekitar 90 persen permohonan paten ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pengajuan paten didominasi dari luar negeri yakni 90 persen, sisanya 10 persen paten domestik Indonesia. Data ini mengindikasikan Indonesia masih tergantung dan dikuasai teknologi dari luar dibandingkan dalam negeri.

Anak Muda Mengenyam Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi menjadi harapan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia yang unggul guna memasuki dunia kerja, baik sebagai profesional maupun wirausaha. Penambahan lulusan pendidikan tinggi dari jenjang diploma/sarjana, profesi, magister, dan doktor tiap tahunnya memberikan harapan perubahan struktur tenaga kerja di Indonesia yang masih didominasi berpendidikan sekolah menengah ke bawah.

Upaya untuk meluaskan akses pendidikan tinggi yang jadi salah satu fokus Ditjen Dikti mampu membuat kesempatan kuliah bagi semua anak bangsa terbuka. Jumlah mahasiswa terdaftar tiap tahunnya bertambah, yang juga membuat jumlah lulusan perguruan tinggi di bidang akademik maupun vokasi bertambah.

Komposisi mahasiswa terdaftar di Indonesia hingga tahun 2020 dari jenjang diploma, S-1, S-2, S-3, spesialis, dan profesi, mencapai 8.483.213 orang. Jumlah ini masih didominasi mahasiswa yang berkuliah di PT akademik (Dikti) sebesar 88,35 persen, sedangkan vokasi (Diksi) berkisar 5,92 persen. Lulusan perguruan tinggi terbanyak bergelar sarjana, lalu sarjana terapan (D-4) dan D-3, hingga D-1.

Anak muda yang mengenyam pendidikan tinggi di rentang usia 19-24 tahun dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Sejak 2016, peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi naik bervariasi dari rentang sekitar 0,5 % - 1,7 %.



Jumlah Mahasiswa Terdaftar Berdasarkan Program Pendidikan Nasional Tahun 2020

Diploma

885.273

Sarjana

7.112.432

Magister

318.723

Doktor

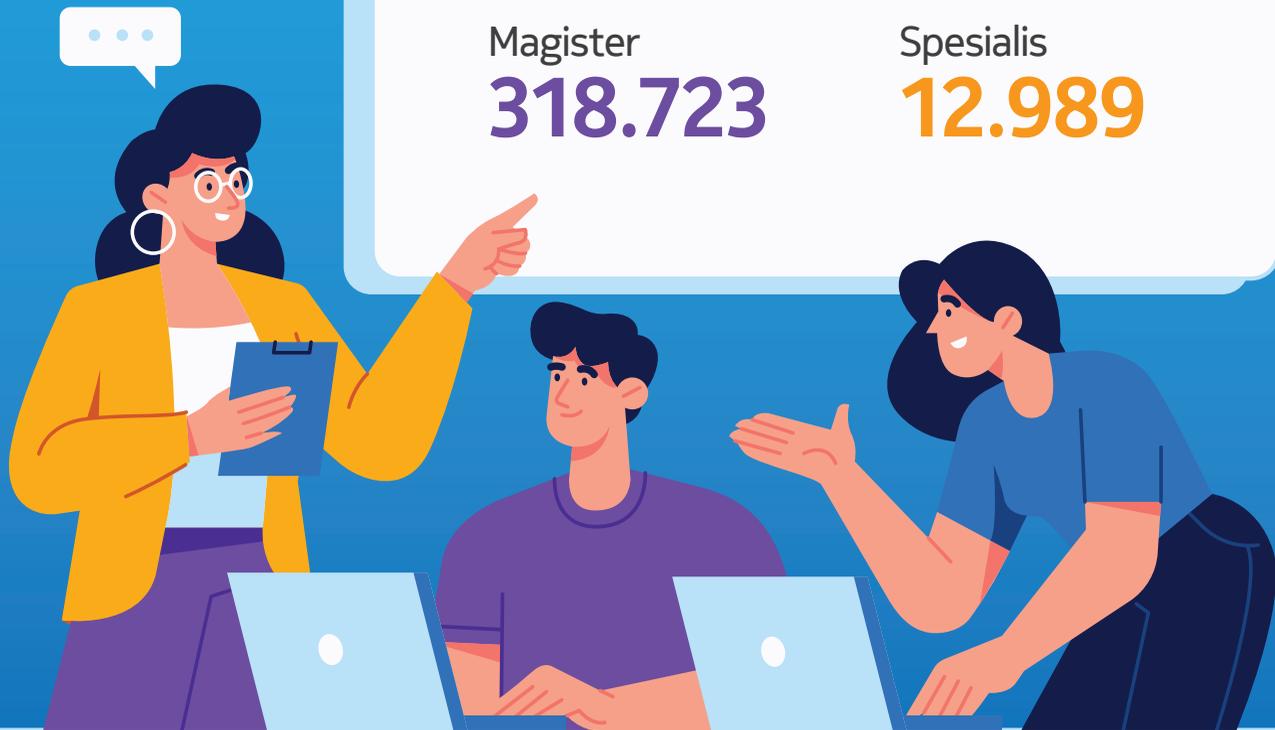
44.081

Profesi

108.340

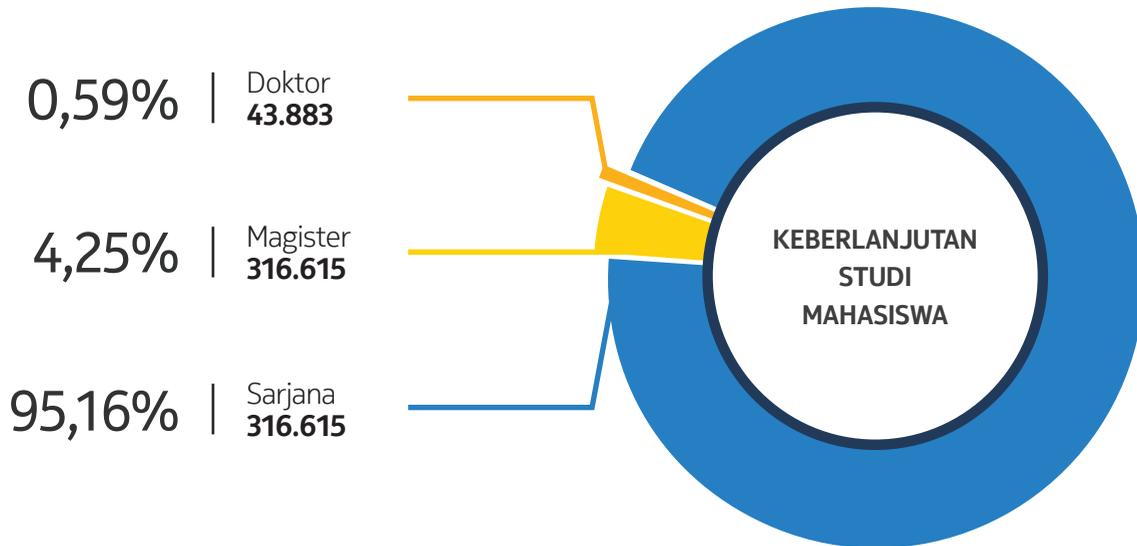
Spesialis

12.989



Total Mahasiswa Terdaftar

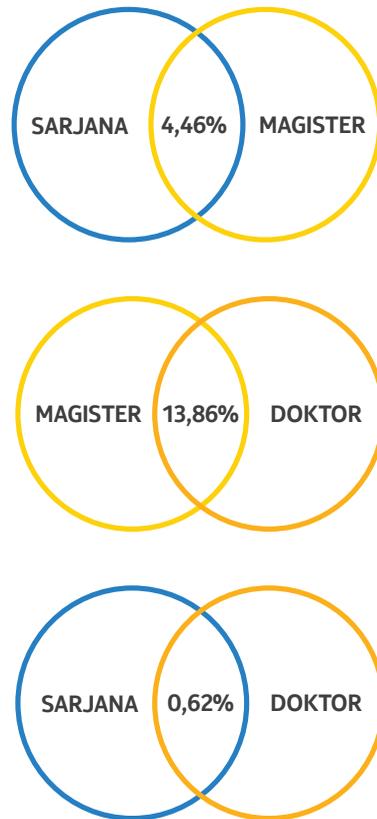
8.481.838 Orang



Kebutuhan tenaga kerja yang profesional juga mendorong kebutuhan untuk pendidikan lanjutan pascasarjana. Terlihat adanya tren, lulusan sarjana yang memilih untuk langsung melanjutkan kuliah ke jenjang magister (S-2).

Namun, lulusan sarjana yang terus bertambah tiap tahunnya masih minim yang melanjutkan pendidikan ke magister hingga mencapai gelar doktor. Lulusan sarjana yang mencapai gelar doktor jumlahnya di bawah 1 persen. Tingkat keberlanjutan yang cukup tinggi terjadi dari jenjang magister ke doktor.

Dari komposisi mahasiswa yang terdaftar, perguruan tinggi negeri dan swasta, tiap tahun meluluskan 1.535.074 diploma/ sarjana. Dari total lulusan ini di tahun 2020, PT akademik menyumbang 89,02 persen lulusan, sedangkan vokasi 10,98 persen. Tentu saja, penyumbang lulusan dari PTS lebih besar dibandingkan PTN yakni 56,41 persen dan 30,29 persen.



Grafik 3.4 Perbandingan Keberlanjutan Studi Mahasiswa.

PROVINSI	UNIVERSITAS	INSTITUT	SEKOLAH TINGGI	AKADEMI	AKADEMI KOMUNITAS	POLITEKNIK	JUMLAH
DKI Jakarta	131.121	8.975	25.460	4.286	-	8.487	178.329
Jawa Barat	100.440	25.226	45.915	5.047	100	15.915	192.643
Banten	96.004	910	10.387	1.155	-	5.767	114.223
Jawa Tengah	98.070	8.459	16.920	5.015	22	13.687	142.173
D.I. Yogyakarta	68.877	4.124	10.482	2.253	30	2.299	88.065
Jawa Timur	150.377	22.804	33.865	3.958	211	16.479	227.694
Aceh	18.882	2.184	4.625	1.742	77	4.608	32.118
Sumatera Utara	46.835	6.787	13.997	3.275	-	6.236	77.130
Sumatera Barat	27.581	5.197	8.372	1.384	-	3.132	45.666
Riau	23.765	354	7.156	974	-	1.176	33.425
Kepulauan Riau	4.751	-	2.221	76	-	1.165	8.213
Jambi	7.457	473	3.869	732	-	805	13.336
Sumatera Selatan	19.597	79	8.710	1.253	-	4.678	34.317
Bangka Belitung	890	372	784	180	31	599	2.856
Bengkulu	8.725	1.442	1.157	333	21	1.518	13.196
Lampung	16.621	3.221	4.774	870	-	3.261	28.747
Kalimantan Barat	9.577	2.619	3.229	1.220	-	4.564	21.209
Kalimantan Tengah	4.767	482	1.976	299	-	713	8.237
Kalimantan Selatan	13.950	-	7.067	748	-	2.229	23.994
Kalimantan Timur	10.507	2.292	4.065	163	-	3.161	20.188
Kalimantan Utara	1.184	-	805	-	-	142	2.131
Sulawesi Utara	11.620	430	1.860	896	-	2.195	17.001
Gorontalo	4.878	933	257	-	-	870	6.938
Sulawesi Tengah	8.523	303	1.834	482	-	901	12.043
Sulawesi Selatan	44.481	2.305	18.424	2.899	-	7.219	75.328
Sulawesi Barat	766	732	1.207	59	-	209	2.973
Sulawesi Tenggara	7.635	62	2.008	753	49	1.231	11.738
Maluku	2.921	822	1.752	274	-	1.752	7.521
Maluku Utara	3.484	329	833	126	-	914	5.686
Bali	22.294	1.878	4.195	224	230	2.467	31.288
Nusa Tenggara Barat	13.869	1.445	4.725	227	229	815	21.310
Nusa Tenggara Timur	12.901	250	3.548	298	-	3.826	20.823
Papua	4.373	523	1.907	254	-	1.870	8.927
Papua Barat	3.644	-	807	-	-	1.157	5.608
INDONESIA	1.001.367	106.012	259.193	41.455	1.000	126.047	1.535.074

Tabel 3.2 Jumlah Lulusan Menurut Bentuk Perguruan Tinggi Tahun 2020 Nasional.

JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT PROGRAM PENDIDIKAN

Di tingkat pendidikan tinggi, kesetaraan gender terbuka. Jumlah mahasiswa perempuan justru lebih banyak dari mahasiswa laki-laki. Komposisi mahasiswa perempuan yang lebih dominan dibandingkan mahasiswa laki-laki ini mulai dari jenjang diploma/sarjana lalu profesi/magister. Namun, untuk jenjang doktor mulai terlihat mahasiswa laki-laki lebih tinggi dari mahasiswa perempuan.

DIPLOMA

♂ 373.394

♀ 511.879

DOKTOR

♂ 28.200

♀ 15.881



TAHUN 2020

SARJANA

♂ 3.432.258
♀ 3.680.174

MAGISTER

♂ 177.440
♀ 141.283

PROFESI

♂ 32.388
♀ 75.952

SPESIALIS

♂ 6.543
♀ 6.446

JUMLAH TOTAL

♂ 4.050.223 ♀ 4.431.615

8.481.838

Grafik 3.5 Jumlah Mahasiswa Terdaftar Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Program Pendidikan Nasional Tahun 2020.

Sebaran Bidang Keilmuan

Keilmuan di perguruan tinggi sejatinya dinamis, dikembangkan sesuai kebijakan pembangunan nasional/daerah hingga tren/perubahan yang terjadi di dunia usaha dan industri. Tentunya, di tengah upaya meningkatkan struktur tenaga kerja Indonesia yang semakin terdidik, minimal sekolah menengah hingga perguruan tinggi, jangan sampai justru tercipta pengangguran tinggi terdidik.

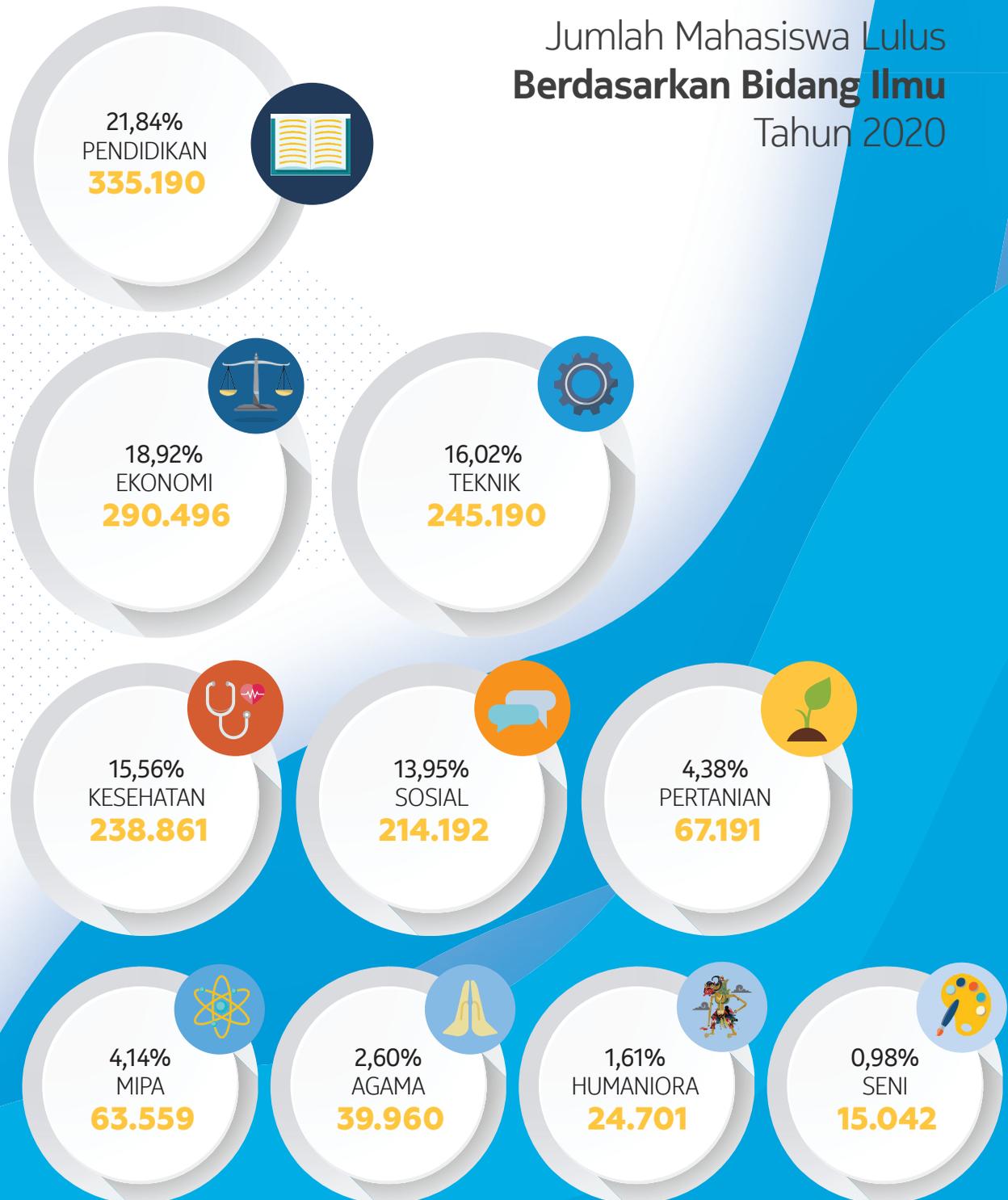
Namun, mahasiswa terdaftar masih meminati bentuk pendidikan akademik mencapai 88,35 persen dan vokasi 5,92 persen. Ada perbedaan bidang ilmu yang diminati untuk pendidikan akademik dan vokasi.

Mahasiswa bidang akademik mayoritas memilih bidang ilmu pendidikan, ekonomi, dan sosial, dan teknik. Namun, bidang teknik yang butuh tenaga kerja banyak, misalnya, tidak sampai separuh peminatnya dari gabungan bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Mahasiswa D-3 kebanyakan memilih di bidang ilmu akuntansi, keperawatan, kebidanan, manajemen informatika, dan farmasi. Ketika di jenjang D-4 pilihan didominasi di bidang ilmu keperawatan, kebidanan, teknik informatika, perhotelan, dan teknologi laboratorium medis.



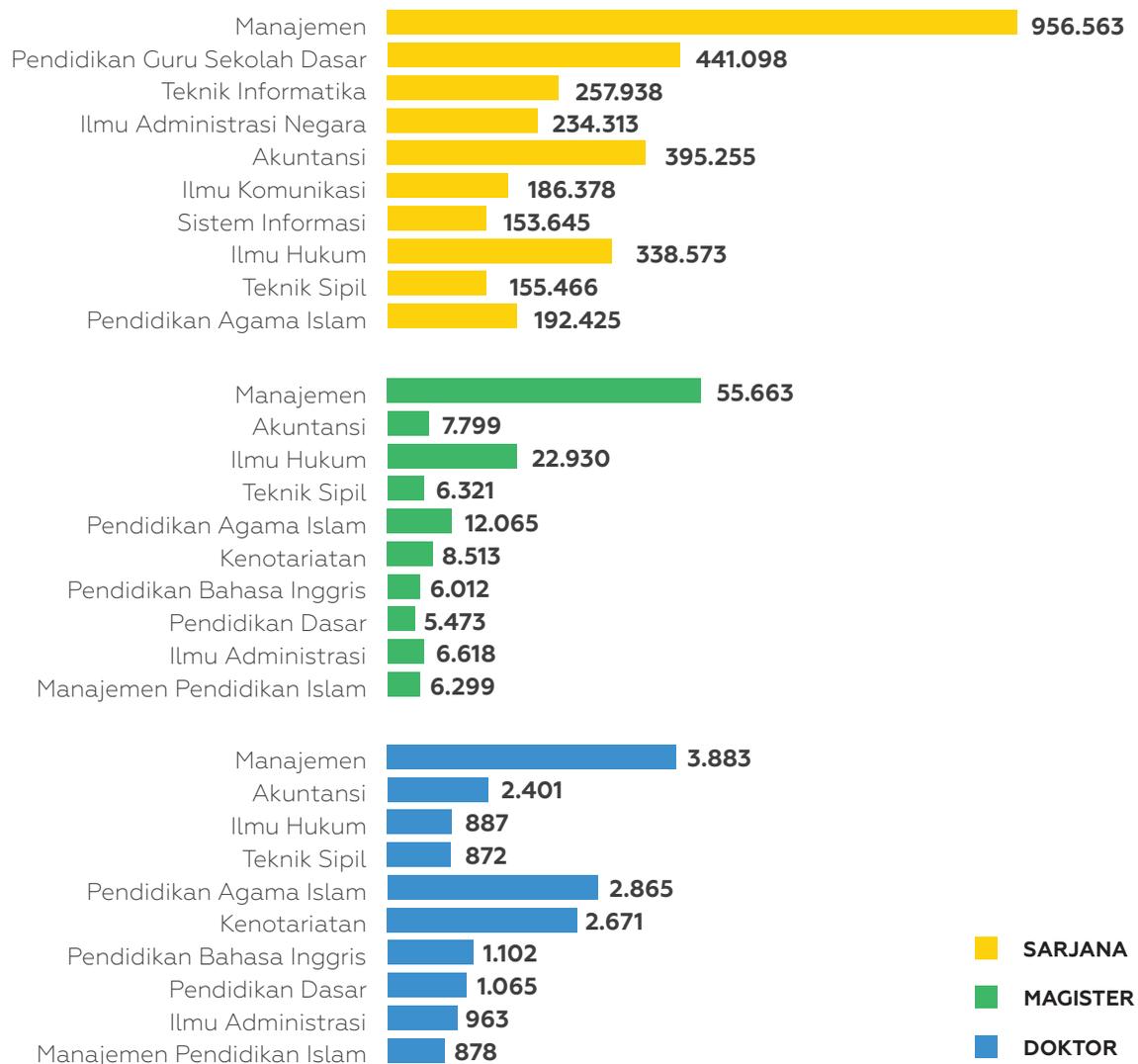
Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan Bidang Ilmu Tahun 2020



Grafik 3.6 Jumlah Mahasiswa Lulus Berdasarkan Bidang Ilmu Tahun 2020.

Ketika di S-2, kuliah manajemen masih diminati. Ilmu lainnya yakni akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, pendidikan agama islam, Ilmu administrasi, dan ilmu ekonomi. Saat hendak ke jenjang S-3, terlihat manajemen tak lagi jadi minat utama. Bidang ilmu yang dipilih S-3 yang tertinggi yakni ilmu hukum, pendidikan, dan agama islam.

Secara singkat, lulusan mahasiswa Indonesia dari sekolah tinggi, politeknik, dan akademi didominasi bidang kesehatan. Untuk lulusan dari universitas dan institut didominasi ilmu pendidikan. Adapun lulusan dari akademi komunitas didominasi bidang teknik.



Grafik 3.8 Sepuluh Prodi Dengan Jumlah Mahasiswa Terbanyak Tiap Jenjang.

Meningkatkan Darma Penelitian di Kampus

Perguruan tinggi Indonesia harus menjalankan tridarma perguruan tinggi dalam mengemban tugasnya untuk mencerdaskan bangsa. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat seharusnya berjalan seimbang untuk membuat mutu dan relevansi perguruan tinggi tak diragukan. Sayangnya, cukup lama satu darma yakni penelitian terpinggirkan. Akibatnya, penguatan ekosistem budaya ilmiah dan budaya penelitian/riset di perguruan tinggi, utamanya oleh para dosen, terlupakan. Sumbangsih perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi pun tak secemerlang yang diharapkan.

Padahal, perguruan tinggi menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang penting bagi negara, di samping lembaga riset lainnya. Di dunia akademik, riset dasar dan terapan punya peluang sama untuk dikembangkan. **Perguruan tinggi seharusnya jadi tempat berpaling pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha/ industri untuk menemukan solusi berbasis iptek dalam mencari solusi dari dinamika perubahan zaman yang terjadi.**

Penguatan riset dan pengembangan dalam dunia pendidikan tinggi, terus menjadi fokus Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi Ditjen Dikti, juga sebagai strategi untuk menambah PT bermutu kelas dunia, salah satunya dalam kinerja penelitian. **Strategi yang ditempuh, antara lain ada diferensiasi misi PT dengan mendorong fokus PT dalam mengembangkan tridharma PT yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*.**

Meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/Hak Kekayaan Intelektual, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, hingga meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional.



Strategi lainnya yakni meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta dunia usaha/industri untuk penguatan *knowledge/innovation based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan. Membangun *science techno park*, mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri.



Klaster Riset Perguruan Tinggi

Kinerja penelitian perguruan tinggi jadi salah satu indikator penting dalam pemeringkatan atau klasifikasi perguruan tinggi. Penilaian kinerja penelitian dimulai di masa perguruan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) mulai tahun 2016 maupun Kementerian Riset dan Teknologi /Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek/BRIN) pada tahun 2019. Berdasarkan kapasitas risetnya, perguruan tinggi dibagi dalam klaster mandiri, utama, madya, dan binaan. Kebijakan ini mulai mendorong kesadaran perguruan tinggi bahwa pengembangan budaya ilmiah dan riset di kalangan mahasiswa dan dosen jadi penting, jadi barometer yang membuat perguruan tinggi bermutu menuju *world class university*.

Berdasarkan pengumuman kinerja penelitian perguruan tinggi oleh Kemristek/BRIN Tahun 2019, kegiatan penelitian di PT terlihat terus bergeliat. Perguruan tinggi melaporkan kinerja penelitian lewat Sistem Manajemen Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Simlitabmas) setiap tahun.

Di tahun 2019, terdata kinerja penelitian yang dilaporkan dari 1.977 PT sehingga dapat diklasifikasikan kelompok PT berdasarkan klaster mandiri, utama, madya, binaan (periode penilaian tahun 2016-2018). Padahal, jumlah PT secara nasional mencapai lebih dari 4.500 PT. Adapun di periode penelitian tahun 2013-2015, kinerja penelitian hanya dilaporkan 1.447 PT.

Komponen yang dievaluasi meliputi sumber daya penelitian (30%), manajemen penelitian (15%), luaran/output (50%), dan revenue generating (5%).

PERIODE	KONTRIBUTOR PERGURUAN TINGGI	KLASTER			
		MANDIRI	UTAMA	MADYA	BINAAN
2007-2009	394	10	22	71	291
2013-2015	1.447	25	73	160	1.219
2016-2018	1.977	47	146	479	1.305
2020-2021	901	14	36	79	772

Tabel 3.3 Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi

10 BESAR

Meningkatkan Darma Penelitian di Kampus

PERGURUAN TINGGI DENGAN KINERJA PENELITIAN TERTINGGI DI TAHUN 2019



1. UNIVERSITAS GADJAH MADA



2. INSTITUT PERTANIAN BOGOR



3. UNIVERSITAS DIPONEGORO



4. UNIVERSITAS ANDALAS



5. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



6. UNIVERSITAS AIRLANGGA



7. UNIVERSITAS PADJAJARAN



8. UNIVERSITAS HASANUDDIN



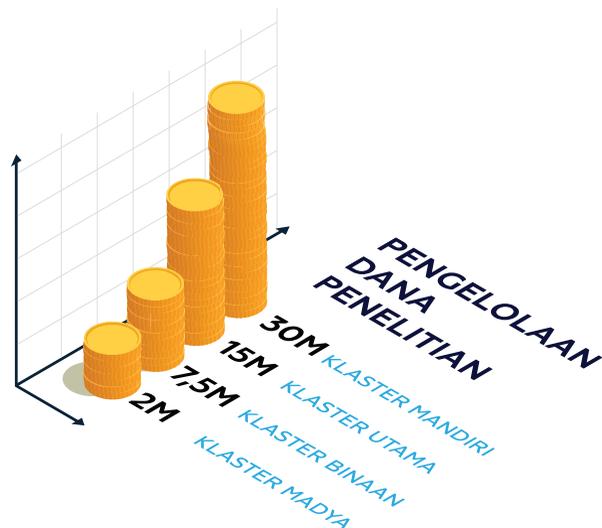
9. INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER



10. UNIVERSITAS UDAYANA

Penilaian kinerja penelitian PT ini berdampak kepada kuota anggaran penelitian, pengelolaan dana desentralisasi sesuai dengan rencana induk penelitian masing-masing perguruan tinggi, peta kebutuhan program penguatan kapasitas per klaster, dan mekanisme pengelolaan penelitian.

Perkembangan kinerja penelitian PT terlihat di tahun 2019 ada 21 PT yang meningkatkan klaster penelitiannya hingga masuk klaster mandiri. Semakin bertambah kapasitas perguruan tinggi untuk mengelola riset di kampus maupun berkolaborasi dengan institusi dalam dan luar negeri, tentunya dapat menopang produktivitas iptek nasional. Hal ini menunjukkan dukungan untuk melahirkan inovasi yang dibutuhkan bangsa dapat dikonstruksikan perguruan tinggi. Terlihat dalam menghadapi pandemi Covid-19, perguruan tinggi begitu aktif untuk melakukan riset dan menjadikan inovasi yang dapat memberikan solusi mengatasi penyebaran virus Corona di Indonesia.



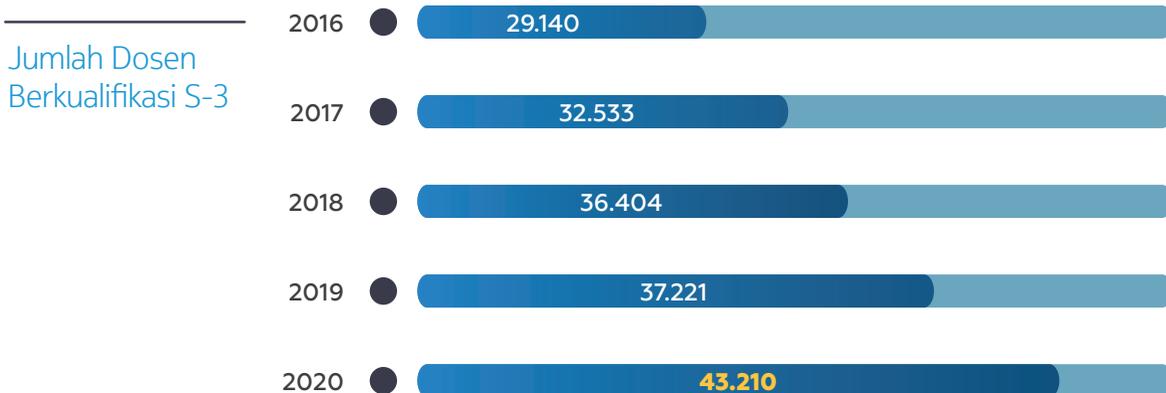
Grafik 3.9 Pengelolaan Dana Penelitian.



Kinerja penelitian tak hanya ditunjukkan dari kuantitas riset yang semakin meningkat, namun juga harus dibarengi kualitas. Ini dapat dilihat dari sumbangan jumlah publikasi ilmiah yang juga terus bertambah dari hasil riset dosen dan mahasiswa.

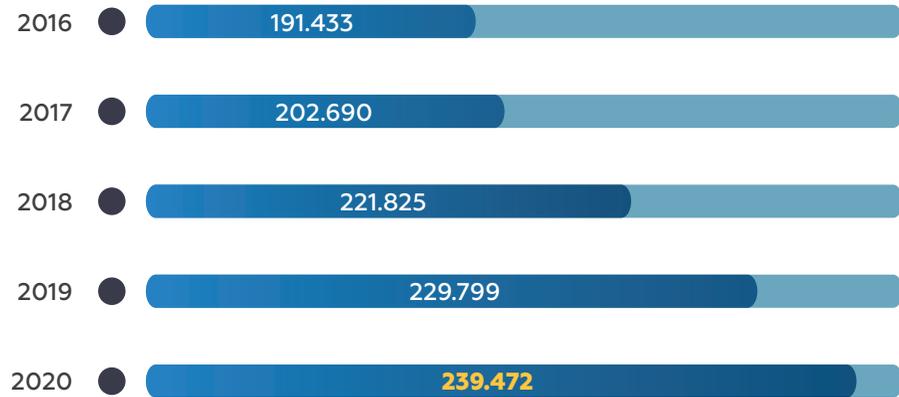
Potensi sumber daya riset di PT yang besar, dari jumlah mahasiswa terdaftar di jenjang diploma hingga pascasarjana yang mencapai 8 juta lebih, juga dosen yang secara nasional berjumlah lebih dari 312.000, dapat diberdayakan untuk terus membuat kinerja penelitian perguruan tinggi membaik dari segi kuantitas dan kualitas. Dengan bertambahnya kualifikasi dosen berpendidikan S-3 (dokter), kompetensi riset pun semestinya meningkat. Ditambah lagi dengan bertambahnya guru besar, iklim riset di PT seharusnya terus bergeliat meningkat. Dengan kebijakan hilirisasi riset yang dibuktikan dengan berbagai insentif dan birokrasi terkait riset yang makin kondusif, terlihat pergerakan yang makin baik untuk meningkatkan produktivitas iptek nasional, yang dapat meningkatkan daya saing inovasi Indonesia secara global.

Jumlah Mahasiswa Magister Dan Doktor Terdaftar Tahun 2016-2020 Mencapai Total 362.804.



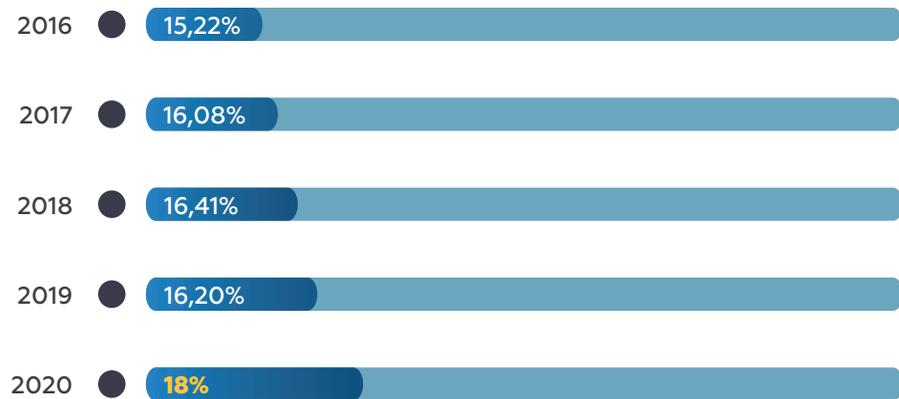
Grafik 3.10 Jumlah Dosen Berkualifikasi S-3.

Total Jumlah Dosen Tetap



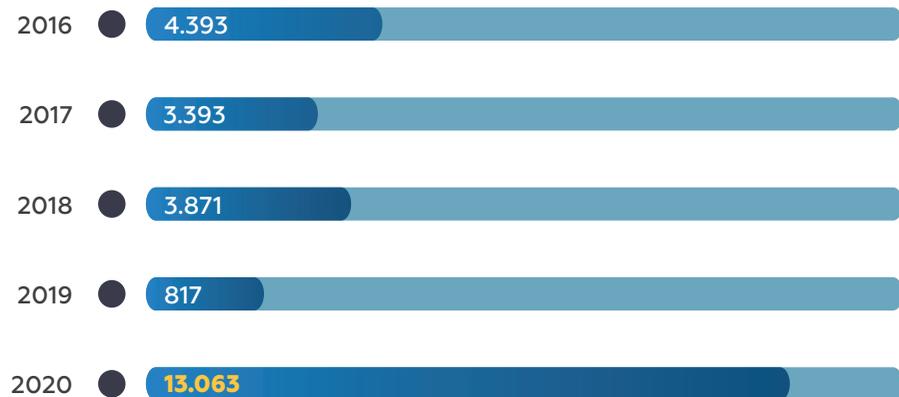
Grafik 3.11 Total Jumlah Dosen Tetap.

Persentase Dosen Berkualifikasi S-3

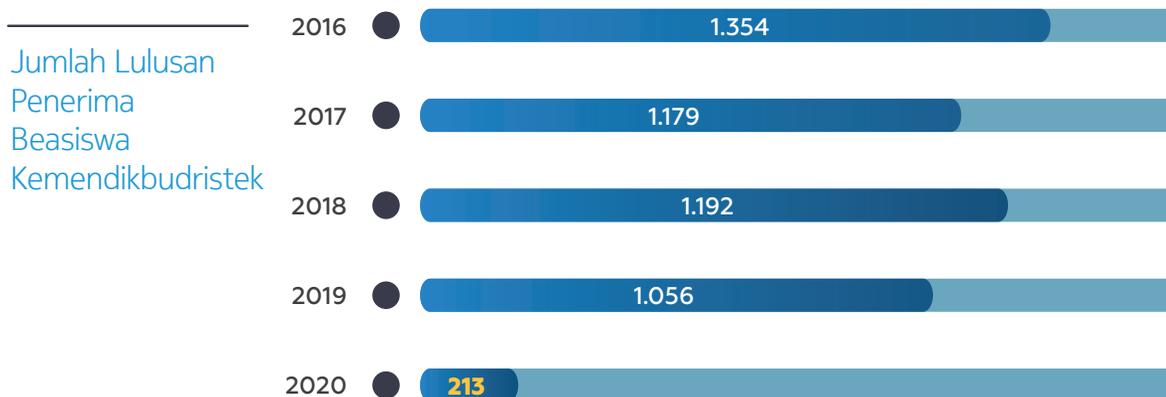


Grafik 3.12 Persentase Dosen Berkualifikasi S-3.

Penambahan Jumlah Dosen S-3



Grafik 3.13 Penambahan Jumlah Dosen S-3.



Grafik 3.14 Jumlah Lulusan Penerima Beasiswa Kemendikbudristek.

Jumlah Jabatan
Guru Besar Nasional
Tahun 2020
Mencapai
6.625



Komponen
jumlah
seluruh
publikasi
internasional
tahun 2020
mencapai
45.727

Dilihat dari jumlah publikasi ilmiah, Indonesia di tahun 2020 ini sudah menunjukkan peningkatan. Terus bertambahnya jumlah publikasi internasional ini juga dapat mengindikasikan kuantitas dan kualitas penelitian yang dijalankan institusi riset, termasuk perguruan tinggi.

Sejak dikeluarkannya Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kemenristek/BRIN, telah memfasilitasi dosen pembimbing mahasiswa S-2 dan S-3 untuk dapat mengajukan dana penelitian melalui skema pascasarjana. Luaran yang diwajibkan dalam skema penelitian ini adalah artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Mahasiswa harus menjadi penulis utama dan dosen pembimbing sebagai *corresponding author*.

Selain memfasilitasi mahasiswa S-2 dan S-3 dalam melakukan penelitian yang dapat menghasilkan artikel ilmiah di jurnal nasional maupun di jurnal internasional, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat juga memfasilitasi dosen pemula (dosen yang belum memiliki jabatan fungsional dan yang memiliki jabatan fungsional paling tinggi asisten dosen) untuk dapat mengajukan dana penelitian sebesar Rp 20 juta per penelitian. **Tujuan dari skema ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian dan menulis artikel ilmiah karena luaran wajib dari skema ini adalah menghasilkan publikasi ilmiah baik di jurnal nasional atau internasional.**

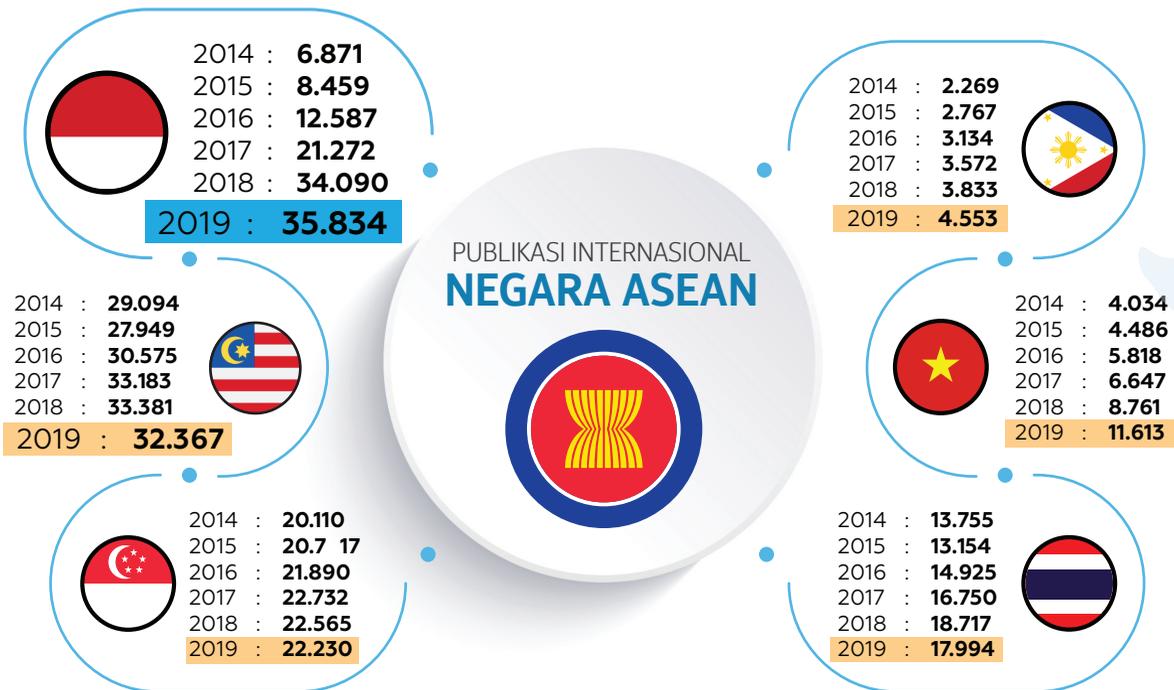
Menumbuhkan ekosistem riset dengan memperkuat tridarma pendidikan yang saling mendukung akan mendorong potensi riset PT yang terus tumbuh. Dengan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, kreativitas perguruan tinggi untuk mengelola sumber daya dan sumber daya manusia di institusi masing-masing semakin dibutuhkan. Dengan demikian, perguruan tinggi sebagai institusi yang unik mampu menopang lahirnya riset-riset dasar dan terapan yang bermutu, sekaligus menghasilkan generasi masa depan dengan kemampuan iptek yang makin gemilang untuk menjawab tantangan zaman.

Membangun Reputasi Penelitian Internasional

Publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi berperan sebagai media aktualisasi diri para dosen, peneliti, dan perekayasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara nasional maupun internasional. Publikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi merupakan salah satu alat untuk membangun reputasi individu sekaligus reputasi lembaga dan bangsa. Kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah internasional juga berperan meningkatkan kebanggaan dan daya saing suatu negara di bidang iptek.

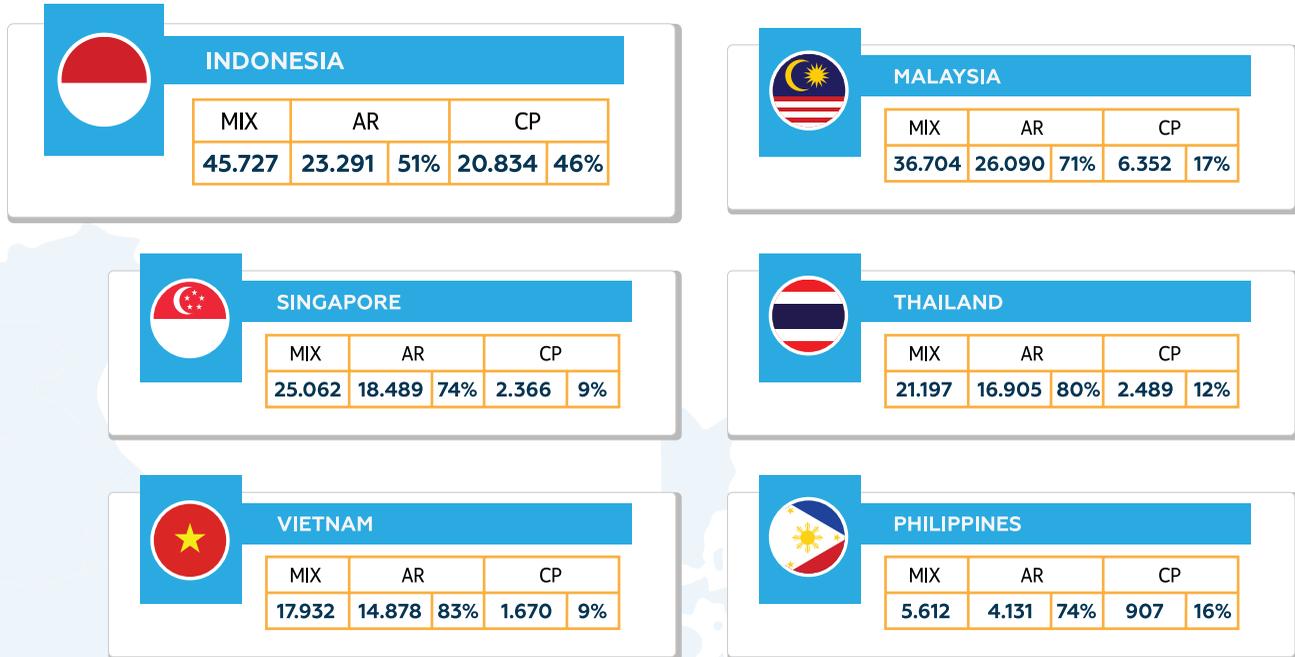
Dari kurun 2013-2017, terlihat publikasi ilmiah internasional Indonesia tertinggal dari negara-negara ASEAN. Berbagai upaya mendukung peningkatan publikasi ilmiah internasional dari perguruan tinggi dan lembaga litbang dilakukan pemerintah. Perkembangannya terus membaik hingga di tahun 2020 Indonesia tetap bertengger di urutan pertama.

Di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, akhirnya pada tahun 2018 jumlah publikasi Indonesia mulai menggeser Malaysia yang berada di urutan teratas.



Grafik 3.15 Publikasi Internasional Negara Asean Tahun 2014-2019.

Publikasi internasional Negara ASEAN Tahun 2020



- MIX : Dokumen.
- AR : Artikel.
- CP : Conference Paper.

Grafik 3.16 Publikasi Internasional Negara Asean Tahun 2020.

Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di jurnal bereputasi dan terindeks dianggap penting untuk menunjukkan produktivitas riset dan pengembangan suatu bangsa. Sebab, jumlah publikasi ilmiah suatu negara mengindikasikan kuantitas dan kualitas kegiatan riset di negara bersangkutan. Tingginya publikasi ilmiah juga berkorelasi dengan kinerja riset dan kemajuan negara.

Berdasarkan data Scopus 4 Januari 2021, publikasi internasional Indonesia berada di urutan 1. Dilihat dari data mix (artikel dan conference paper) jumlahnya 45.727 dokumen, dengan rincian 23.291 artikel (51 persen) dan conference paper 20.834 (46 persen). Meskipun Malaysia di nomor 2 dari keseluruhan dokumen yakni 36.704 dokumen, namun jumlah artikel lebih banyak dari Indonesia yakni 26.090 artikel.

PENDANAAN PENELITIAN KEMENRISTEK/BRIN YANG MENGHASILKAN LUARAN WAJIB BERUPA PUBLIKASI.

JENIS PUBLIKASI	TERINDEKS BEREPUTASI	TIDAK TERINDEKS	TOTAL
Prosiding internasional	1.554	1.364	2.918
Artikel Ilmiah Internasional	2.115	3.250	5.365
TOTAL	3.669	4.614	8.283

Tabel 3.4 Pendanaan Penelitian DRPM luaran Yang Menghasilkan Publikasi

Jumlah publikasi ilmiah Indonesia tahun 2020 ini sudah menunjukkan peningkatan dibanding konferensi/seminar. Dukungan pendanaan penelitian Kemenristek/BRIN menuntut luaran publikasi internasional. Di tahun 2020, diperoleh 8.283 publikasi internasional yang terdiri dari 3.250 artikel di jurnal internasional tidak terindeks dan 2.155 artikel di jurnal internasional terindeks bereputasi (Scopus, *Web of Science/WoS*, dsb). Adapula prosiding internasional tidak terindeks dan terindeks berjumlah 2.918 dokumen.

Secara signifikan terlihat kinerja perguruan tinggi untuk menyumbang publikasi internasional membaik setiap tahun. Namun, masih ada tantangan agar peningkatan ini bisa lebih menambah banyak jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.

Posisi Indonesia di *Scientific Journal Ranking* (SJR) pada tahun 2019 naik 4 peringkat ke posisi 48 dengan H-Indeks sebesar 214 dibandingkan tahun 2018 di peringkat ke-52 dengan H-Indeks sebesar 196. H-Indeks ini merupakan indeks komposit dari 5 indikator: (1) jumlah dokumen atau publikasi, (2) jumlah publikasi yang layak dikutip (*citable document*), (3) jumlah kutipan (*citation*), (4) jumlah kutipan sendiri (*self citations*) dan (5) jumlah kutipan per dokumen (*citation per documents*). Di antara negara-negara ASEAN, posisi Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam dan Filipina.

Inovasi Program Peningkatan Publikasi Ilmiah

Sejak tahun 2017, ada aplikasi SINTA (Scientific and technology index) berisi pengukuran kinerja iptek, antara lain kinerja peneliti, jurnal, institusi iptek, dan penulis jurnal.

Di masa Kemenristekdikti sudah mulai ditetapkan luaran dari semua kegiatan penelitian sekurang-kurangnya menghasilkan publikasi di jurnal ilmiah. Tuntutan ini untuk memacu semangat para akademisi untuk mulai serius mengerjakan riset dan menghasilkan publikasi ilmiah berkualitas. Selama ini, minimnya publikasi dari dosen dan mahasiswa, antara lain, karena terbatasnya akses dan pengetahuan kepada referensi yang berbayar serta cara pengelolaannya.

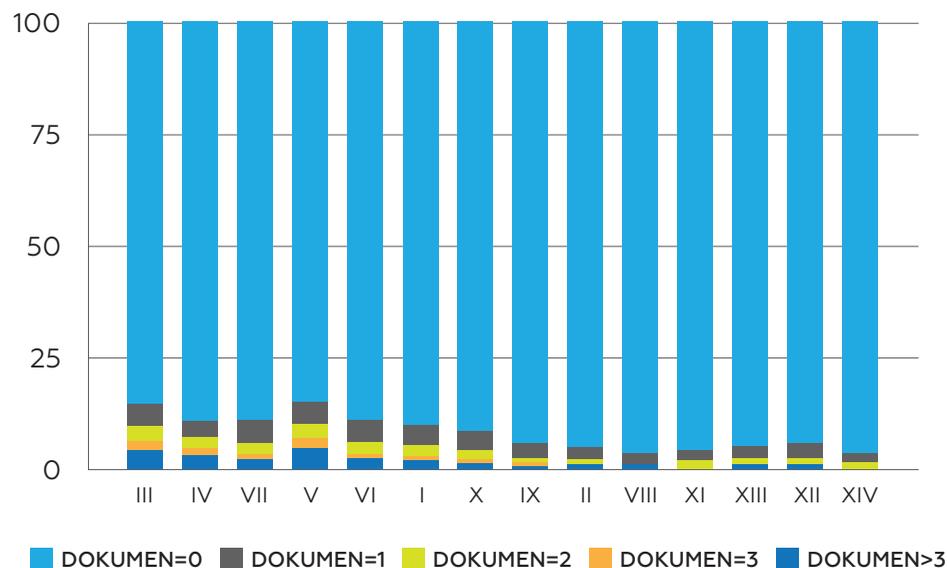
Oleh karena itu, inovasi program untuk mendorong peningkatan publikasi ilmiah internasional dari perguruan tinggi dikembangkan. Inovasi penting terus dilakukan untuk mendorong peningkatan publikasi ilmiah internasional yang merupakan salah satu indikator produktivitas riset dan pengembangan suatu bangsa.

Program untuk mendukung peningkatan jumlah publikasi ilmiah dilakukan dengan memperluas pelatihan penulisan. Sebagai contoh, sebelumnya program Klinik Penulisan Artikel Ilmiah Nasional/ Internasional hanya dilakukan secara langsung bersifat tatap muka. Pada tahun 2019 dengan memanfaatkan unsur teknologi, telah dikembangkan *Platform* Penulisan Artikel Ilmiah Online.

Dikembangkan pula *platform* idMenulis, proses bimbingan teknis penulisan ilmiah dapat menembus keterbatasan ruang, sehingga dapat menjangkau seluruh dosen dan peneliti di Indonesia. Pengguna Kelas idMenulis di aplikasi Ruang Kerja Per 29 November 2019 yaitu: 11.745 pendaftar kelas idMenulis, 1.967 peserta melihat video dan ikut tes, dan 395 peserta lulus.

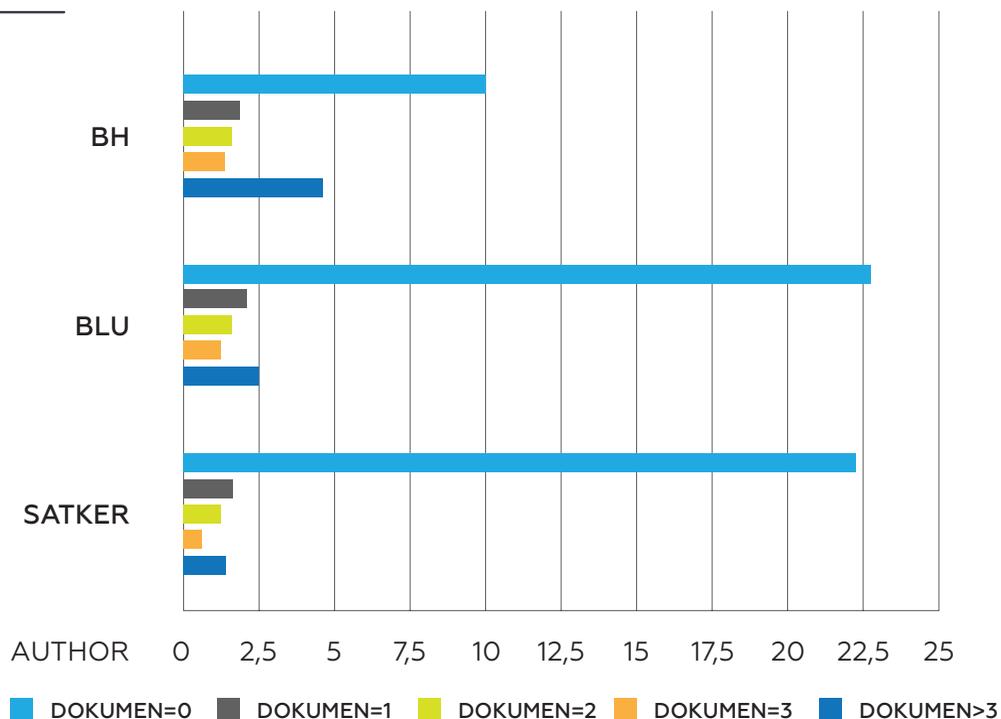
Selama ini dirasakan masalah dan kendala dalam publikasi ilmiah antara lain belum meratanya publikasi ilmiah di jurnal berkualitas, baik nasional maupun internasional pada sebagian perguruan tinggi dan institusi penelitian. Dengan demikian, diperlukan upaya lebih komprehensif untuk mempercepat capaian indikator kualitas publikasi ilmiah hasil penelitian agar dapat bersaing di tingkat internasional dengan tidak mengabaikan diseminasi keilmiah di tingkat nasional agar dapat berdampak kepada peningkatan daya saing bangsa.

LLDIKTI
wilayah I s.d. XIV



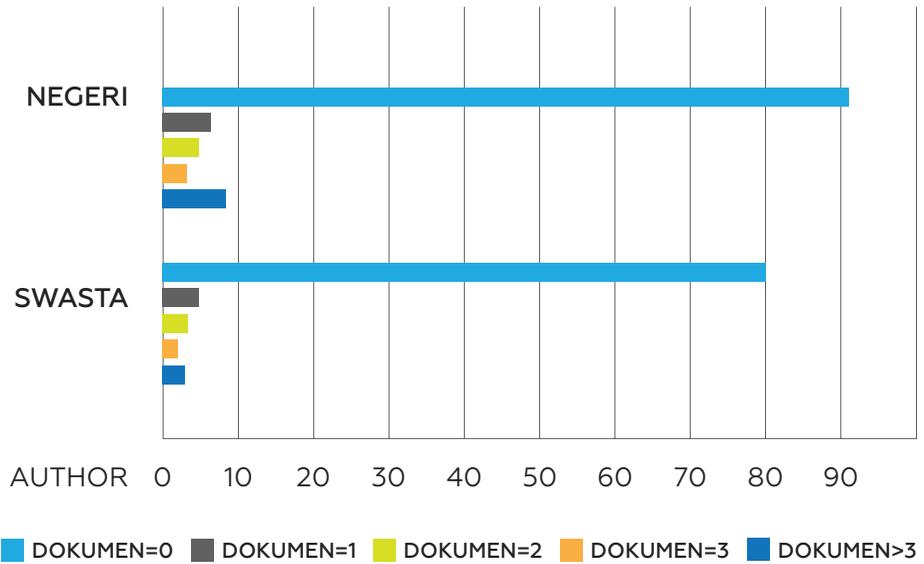
Grafik 3.17 Produktivitas dan Sebaran Publikasi Menurut LLDIKTI Wilayah I-XIV.

Status
Perguruan
Tinggi Negeri



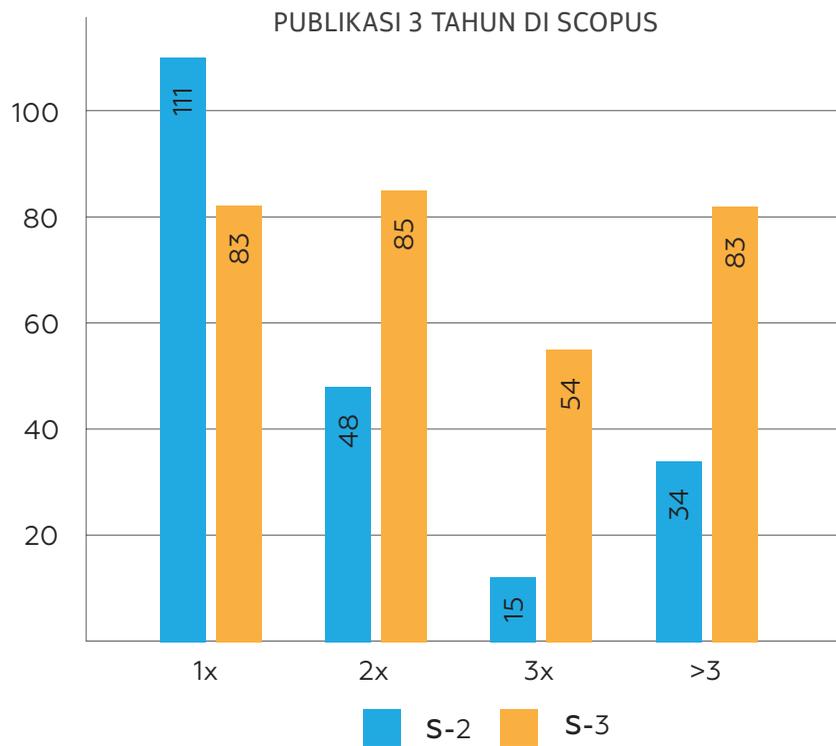
Grafik 3.18 Produktivitas dan Sebaran Publikasi Menurut Status Perguruan Tinggi Negeri.

Jenis Perguruan Tinggi Laporan Kondisi Tahun 2020



Grafik 3.19 Produktivitas dan Sebaran Publikasi Menurut Jenis Perguruan Tinggi Laporan Kondisi Tahun 2020.

Produktivitas Publikasi (Hasil Survei Tahun 2020)



Grafik 3.20 Produktivitas dan Sebaran Publikasi Menurut Hasil Survei Tahun 2020.

Produktivitas publikasi ilmiah dosen/peneliti pada beberapa institusi masih rendah, ditandai dengan sebaran publikasi yang tidak merata, yakni didominasi oleh beberapa institusi saja. Banyak dosen/peneliti yang belum pernah menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi internasional dan/atau jurnal terakreditasi nasional. Untuk itu diperlukan upaya akselerasi guna mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi melalui program yang terencana dan dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian jumlah publikasi internasional di antaranya karena motivasi melakukan penelitian belum diimbangi dengan tanggung jawab moral sebagai peneliti untuk menyebarkan hasil-hasil penelitiannya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu, kurang berkembangnya budaya menulis di perguruan tinggi, dan/atau rendahnya kemauan dan kemampuan menulis hasil-hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal bermutu.

Tantangan saat ini, relevansi antara hasil riset—berupa publikasi dan inovasi—dan realitas kebutuhan pengguna masih belum terbangun. Akibatnya, hasil riset sekadar berakhir di perpustakaan dan buku laporan kinerja. Untuk itu, peningkatan mutu dan relevansi perguruan tinggi lewat penelitian dan pengemabangan harus dilakukan dengan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas, serta potensi untuk menjadi inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa berbasis iptek.



Harapan Menuai Bonus Demografi

Komposisi jumlah mahasiswa yang mayoritas memilih pendidikan akademik lebih dari 88 persen, dibandingkan dengan yang vokasi hanya berkisar 6 persen.

Pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia terampil serta inovasi teknologi yang dibutuhkan masyarakat, membuat bangsa ini akan menikmati bonus demografi sebagai berkah untuk mendorong kemajuan bangsa di kancah global. Generasi muda sebagai bagian besar dari penduduk produktif untuk mengisi dunia kerja/industri sebagai profesional maupun wirausaha harus dalam kondisi prima, sehat, cerdas, dan produktif, untuk membuat bonus demografi yang puncaknya tahun 2030, memberi hasil yang menggembirakan.

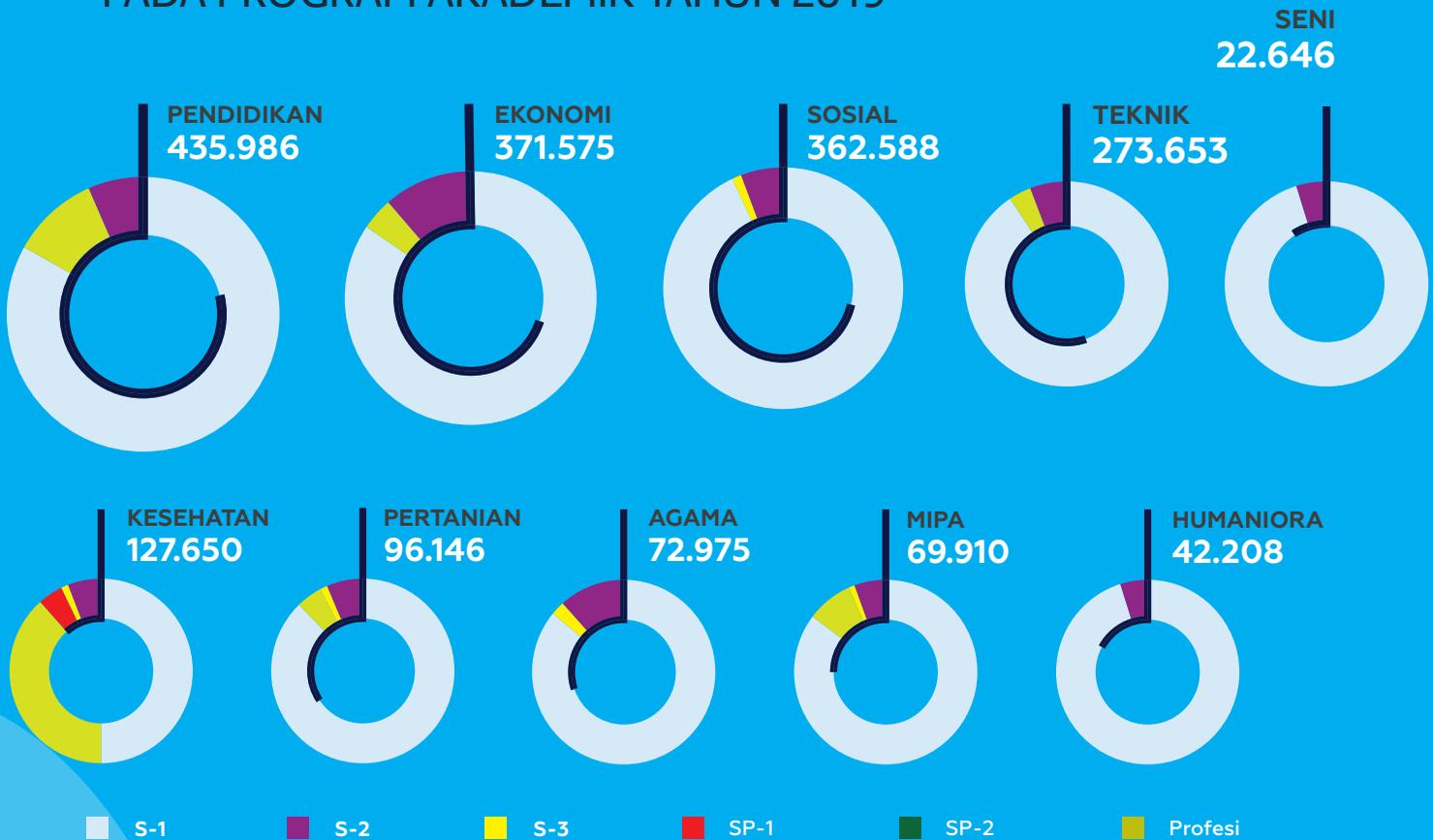
Kebijakan yang terus meningkatkan akses generasi muda pada pendidikan tinggi bermutu, jadi secercah harapan untuk menyiapkan SDM yang semakin berdaya saing di masa depan. Namun, anak-anak muda ini perlu dibuka wawasannya tentang bidang ilmu atau program studi yang mendukung mereka untuk mampu berkiprah optimal dalam kemajuan bangsa.

Terlihat dari lulusan perguruan tinggi dari tahun ke tahun, tak terlihat perubahan signifikan tentang minat mahasiswa mendalami bidang ilmu untuk masa depan mereka. Ajakan untuk mendalami pendidikan vokasi di jenjang diploma juga perlu semakin disosialisasikan untuk meningkatkan tenaga kerja terampil yang mampu mendukung kebutuhan dunia usaha/industri.

Dari total jumlah mahasiswa terdaftar tiap tahun berdasarkan kelompok bidang ilmu, terlihat belum strategis untuk menopang kebutuhan SDM mumpuni bagi bangsa, terutama untuk mendukung kebijakan pembangunan yang dinilai strategis. Apalagi dalam perubahan dunia yang semakin cepat dengan hadirnya teknologi digital serta pandemi Covid-19, kebutuhan memperkuat SDM yang menguasai iptek semakin dibutuhkan.

Padahal, Indonesia sebagai negara agraris, juga membutuhkan SDM

JUMLAH MAHASISWA BARU DALAM BIDANG ILMU TERBANYAK PADA PROGRAM AKADEMIK TAHUN 2019



Grafik 3.21 Mahasiswa Baru Dan Bidang Ilmu Akademik Tahun 2019.

Dengan potret mahasiswa baru yang juga lebih memilih **keilmuan pendidikan (435.986), ekonomi (371.575), dan sosial (362.588), sebagai bidang ilmu yang paling banyak dipilih**, harus dicermati kontribusinya untuk menopang tenaga kerja profesional sesuai perkembangan pembangunan bangsa dan dinamika dalam dunia usaha/industri.

Sementara bidang teknik (273.653), dan seni (22.646). Selain itu, jumlah mahasiswa baru pada bidang sains dan teknologi sejumlah 343.563. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa baru pada bidang pendidikan dan ekonomi (807.561).

yang memiliki kompetensi handal di bidang pertanian agar dapat mengelola potensi pertanian di Indonesia. Namun, perbandingan mahasiswa baru pada kelompok bidang ini dengan kelompok bidang pendidikan dan ekonomi sekitar 11 persen. **Pada kelompok bidang pertanian mahasiswa baru pada jenjang S-2 dan S-3 hanya berkisar 4,9 persen dan 0,9 persen dari total mahasiswa bidang tersebut.**

Dengan kebijakan Merdeka Belajar yang di perguruan tinggi diimplementasikan dengan Kampus Merdeka, dinamika dalam mengembangkan program studi yang adaptif dengan perkembangan seharusnya jadi peluang perguruan tinggi untuk menghasilkan SDM yang dibutuhkan. Ditjen Dikti yang mengawali kebijakan Kampus Merdeka dengan empat hal yakni pembukaan program studi baru, hak belajar di tiga semester di luar program studi, sistem akreditasi perguruan tinggi, dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum, menjadi langkah untuk mendorong mahasiswa mampu memilih jurusan atau program studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

Ditopang dengan perguruan tinggi yang benar-benar menjalankan tridarma secara berkualitas, membuat harapan untuk hadirnya SDM yang cemerlang dalam karakter dan *hardskills* dan *softskills*, dapat terwujud. Kebijakan yang sudah diambil dan dijalankan, jika secara konsisten dilakukan semua *stakeholder* pendidikan tinggi, pada masanya akan menuai hasil yang baik.

Kinerja penelitian di perguruan tinggi juga menunjukkan perkembangan yang baik. Semakin bertambah perguruan tinggi yang masuk klaster mandiri untuk mampu membangun ekosistem riset dan pengembangan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan dunia usaha/industri. Dukungan dan intensif yang tepat membuat gairah untuk berkarya dalam pengembangan iptek terus meningkat di kalangan *civitas academica*. Perguruan tinggi pun akan mampu mendukung peningkatan produktivitas iptek bangsa untuk menghasilkan inovasi, yang dimulai dari kinerja penelitian yang terus membaik hingga menghasilkan publikasi ilmiah internasional di jurnal bereputasi.



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi





Kontribusi Perguruan Tinggi untuk Daya Saing Bangsa

Esensi dari sebuah perguruan tinggi yang baik tentu saja adalah kemampuannya dalam memberikan nilai tambah yang bersifat publik dan personal (*public and private*). Dampak pada publik dan personal itu, tentu saja merupakan sebuah keuntungan ekonomi dan sosial. Pada aras publik misalnya luaran perguruan tinggi bisa menyumbang bagi penerimaan pajak, produktivitas yang tinggi, penelitian dan inovasi, menekan angka kriminalitas, mempererat kohesi sosial, dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Hal ini tentu saja tergantung kepada bagaimana perguruan tinggi mampu mengelola input melalui proses tridarma yang berkualitas. Termasuk dalam proses ini adalah kemampuan perguruan tinggi untuk menyelaraskan proses pembelajaran dan penelitian dengan dunia kerja serta lingkungan yang sangat dinamis, sehingga diharapkan luaran perguruan tinggi, SDM profesional atau pengusaha/wirausahawan dan termasuk karya cipta berupa ilmu pengetahuan-teknologi itu relevan dengan kebutuhan.

Kemendikbudristek memberikan perhatian khusus terkait dampak perguruan tinggi secara publik dan personal ini. **Kemendikbudristek memantau kinerja dan kontribusi perguruan tinggi terkait penguatan inovasi nasional dan struktur tenaga kerja terdidik.** Tentu saja kalau berbicara tentang *outcome* dan dampak perguruan tinggi, kita harus memberikan *caveat*, yaitu dampak jangka panjang dan dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali perguruan tinggi, misalnya kondisi politik dan ekonomi makro.

Kendatipun demikian, kalau lihat indeks kinerja inovasi kita bergerak positif, tinggal pengakselerasian. Covid-19 tidak menghalangi civitas academica untuk tetap berkarya bahkan semakin memacu kreativitas dan inovasi mereka. Hampir semua indikator produktivitas inovasi melebihi target yang telah direncanakan baik itu artikel ilmiah, kekayaan intelektual (KI) yang didaftarkan, dan prototipe penelitian dan pengembangan dan lain sebagainya. **Harapannya adalah geliat inovasi ini semoga memberikan pengaruh pada rapor *Global Innovation Index (GII) Indonesia* yang saat ini masih dibawah pencapaian negara tetangga.**

Khusus untuk karya ilmiah kita harus memberikan catatan. Kuantitas saja tentu tidak cukup. Hal yang juga penting adalah dampaknya terhadap pengembangan tubuh ilmu pengetahuan. Indikator yang disepakati oleh ilmuwan dunia untuk menakar *impact* sebuah karya adalah pengutipan atau sitasi. Menurut

Perguruan tinggi tentu saja memberikan dampak dan keuntungan bagi individu pembelajar. Lulusan perguruan tinggi diharapkan akan menikmati gaji yang kompetitif, mobilitas profesional, status, meningkatnya angka harapan hidup, dan kualitas hidup keluarga.

Menghasilkan lulusan yang siap bekerja adalah bentuk pertanggung-jawaban publik suatu kampus.

data Ditjen Dikti 2020, jumlah publikasi kita belum sesuai dengan target yang diharapkan. Lagi-lagi tentu kita harus menggarisbawahi pengutipan tergantung kepada kualitas dan reputasi sebuah jurnal tempat di mana artikel dipublikasikan. Semakin memiliki reputasi tinggi semakin besar kemungkinan untuk disitir.

Memperhatikan data persentase lulusan PT yang bekerja dalam waktu satu tahun ada tren yang menggembirakan. **Data menunjukkan kenaikan persentase lulusan yang bisa langsung bekerja. Ditargetkan sebanyak 66.77 persen, realitasnya adalah sebanyak 75.4 persen lulusan tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk langsung bekerja.**

Setelah menjadi tenaga kerja profesional, lulusan tentu saja mendambakan tingkatan upah yang memadai. Tentu saja tidak ada peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur gaji berdasarkan strata pendidikan. **Ditjen Dikti menggunakan ukuran daya saing dan kualitas lulusan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR). Lebih spesifik lagi, Dikti memanfaatkan persentase lulusan PT dengan gaji minimum sebesar 1.5 x UMR sebagai parameter.** Semakin banyak proporsi lulusan yang menerima di atas UMR, berarti lulusan memiliki daya saing dan selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

Dalam rencana strategis 2020-2024, ditargetkan bahwa pada tahun 2020, untuk persentase lulusan pendidikan tinggi yang telah bekerja dan mendapatkan gaji minimum sebesar 1,5 x UMR ditetapkan sebesar 30 persen. Seperti terlihat dari grafik, target belum terealisasi seperti yang diharapkan. Pada tahun 2020 persentase capaian lulusan pendidikan tinggi yang telah bekerja dan mendapatkan gaji minimum sebesar 1,5 x UMR hanya sebesar 28,1 persen. Berarti hanya pencapaiannya hanya 93,6 persen.

Kebijakan ini tentu saja terkait dengan dukungan kebijakan lain, semisal mahasiswa difasilitasi dan didorong untuk mengenyam berbagai pengalaman belajar di luar kampus untuk memperkuat kompetensi sebelum memasuki dunia kerja. Dari data ditunjukkan bahwa walaupun baru pada tahap inisiasi awal, sudah banyak mahasiswa yang mengikuti kegiatan mobilitas ini. Sekarang, mobilitas mahasiswa ini menjadi hak mahasiswa dan dibenarkan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang baru diluncurkan pada 2020 awal.

Membangun Reka Cipta Indonesia

Kita semua sepakat bahwa reka cipta atau inovasi adalah kata kunci untuk kesuksesan pembangunan negara dan bangsa. Begitu sentralnya, inovasi menjadi kosakata dan konsep penting yang ada dalam setiap lembaran perencanaan pembangunan. Rapor kinerja inovasi negeri ini memang belum sebaik yang dimimpikan, namun selalu ada geliat untuk menggelorakannya.

Tentu yang dimaksudkan inovasi di sini adalah dalam perspektif inklusif, luas dan tidak semata bermakna penciptaan teknologi baru. Sesuatu produk dikatakan sebagai sebuah hasil inovasi manakala sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dan biasanya memiliki nilai ekonomi.

Indonesia dikategorikan dalam deretan negara berkembang. Indonesia selalu berupaya naik ke posisi yang lebih tinggi, sehingga kelak dapat menyusul Malaysia yang sudah berada di nomor 33 dunia dan tergabung dalam grup negara berkembang kategori atas. Bahkan, Vietnam (42) dan Filipina (50) bergerak naik secara signifikan pada 2020 ini.

Data ini tentu saja menjadi basis informasi berharga untuk memacu kapasitas dan produktivitas inovasi nasional. **Tujuannya jelas yaitu agar Indonesia semakin berdaya saing secara global dan keluar dari kategori sebagai negara berkembang (*middle income trap*).** Caranya adalah semua aktor terkait, berkolaborasi untuk menghasilkan produk nasional yang inovatif dan tidak terus mengandalkan bahan dasar/teknologi dari luar (impor).

Pada matra internasional, *Global Innovation Index (GII)* setiap tahun merilis rapor semua negara terkait kinerja inovasi. Dalam rapor *GII 2020*, Indonesia masih bertengger di urutan 85 dari 131 negara yang dinilai.





Dua hal tersebut, kapasitas dan produktivitas inovasi termasuk yang dihasilkan kampus, dipotret dengan baik dalam laporan kinerja Kementerian Ristek/Brin 2020. Nilai kapasitas dan produktivitas inovasi disatukan menjadi indeks kinerja inovasi. **Secara keseluruhan, kinerja inovasi Indonesia berkembang. Dari target 26,35 persen terealisasi 27,73 persen artinya secara relatif pencapaiannya adalah 105,21 persen.**

Jurnal Bereputasi Internasional



Dari grafik ini terlihat bahwa walaupun dalam kondisi pandemi, produktivitas ilmuwan Indonesia tidak surut. Bahkan hampir semua indikator produktivitas inovasi melebihi target yang telah direncanakan. Dari 20.500 artikel ilmiah yang ditargetkan untuk dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional, akhirnya berhasil dicapai sebanyak 23.291 artikel. Jumlah kekayaan intelektual (KI) yang didaftarkan pencapaiannya juga di atas target. Demikian juga jumlah prototipe *Research and Development* (R&D) dan jumlah prototipe industri jauh melampaui target.

Pendidikan tinggi adalah tulang punggung dari inovasi nasional. **Hal ini karena perguruan tinggi adalah institusi pendidikan yang misi utamanya adalah menghasilkan luaran Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan (Iptek).** Lulusan PT akan mengisi sektor tenaga kerja terdidik dan sebagian menjadi para wirausahawan yang akan membuka lapangan pekerjaan baru. Termasuk dalam misi perguruan tinggi adalah produksi ilmu

pengetahuan dan teknologi yang bisa menjadi produk inovasi. Luaran yang berkualitas dan relevan pasti akan menggeret daya saing dan perekonomian bangsa.

Kualitas dari institusi perguruan tinggi itu sendiri termasuk luarannya ini adalah menjadi penanda dan penentu daya saing suatu negara. Seperti terlihat misalnya dari berbagai pilar inovasi yang diadopsi oleh metrik perangsangan inovasi, status, dan reputasi perguruan tinggi selalu menjadi indikator utama. Karena biasanya perguruan tinggi bereputasi dunia adalah perguruan tinggi yang juga merajai dalam sektor-sektor terkait inovasi seperti ilmu Teknik, alam, manufaktur, dan konstruksi.

Dalam konteks ini, perguruan tinggi harus berinteraksi dan berkolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha dunia industri atau yang lazim atau lazim kita kenal dengan *triple helix of innovation* seperti diperkenalkan oleh Etzkowitz (2003).

Interaksi ini diperlukan supaya terjadinya proses apa yang disebut dengan *knowledge spillover* atau sebaran pengetahuan dan komersialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Sehingga karya cipta perguruan tinggi tidak hanya berhenti sekedar hasil penelitian, tapi mengalir manfaatnya untuk masyarakat luas. Kalau ini terjadi perguruan tinggi menjadi katalisator pembangunan ekonomi dan sosial di daerah dan nasional.

Alih teknologi dan hilirisasi hasil riset perguruan tinggi ini memerlukan ekosistem inovasi yang kondusif. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan kapasitas inovasi di perguruan tinggi dan termasuk juga fasilitasi kolaborasi dengan *triple helix*. **Di level institusi perguruan tinggi, pemerintah mendorong, dan memberikan fasilitas, misalnya menguatnya manajemen inovasi.** Perguruan tinggi yang memiliki contoh baik dalam manajemen inovasi diberi insentif dan didiseminasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

Dalam konteks inovasi, perguruan tinggi secara institusi dituntut untuk tidak hanya sekedar menghasilkan ilmu pengetahuan melalui riset dan konservasi, serta mentransmisikannya melalui pengajaran. Perguruan tinggi harus juga menggunakan luarannya tersebut lebih bermanfaat untuk pembangunan sosial dan ekonomi.



Pada aras nasional, Kemendikbudristek memberikan fasilitas untuk manajemen inovasi yang disebut dengan Kedaireka. Kedaireka muncul untuk menjawab tantangan inovasi seperti permasalahan diskonektivitas antara perguruan tinggi dan pemangku kepentingan. Lebih spesifiknya, selama ini belum ada pemerataan akses bagi perguruan tinggi untuk berdialog dengan industri. Akibatnya, minimnya informasi terkait produk/jasa dari kampus yang diketahui oleh industri. Maka, layaknya sebuah kedai, maka Kedaireka berperan sebagai titik pertemuan antara dunia industri dengan perguruan tinggi.

Di platform Kedaireka ini diharapkan dari pertemuan ini terjadi akselerasi proses inovasi. Di Kedaireka semua katalog produk kampus tersedia. Sehingga industri memiliki opsi dan alternatif terbaik sesuai kebutuhan inovasi industrinya.

Untuk itu pemerintah menyediakan dana insentif kolaborasi atau *matching fund* sebesar 250 miliar rupiah. Hibah diberikan bagi proposal kolaborasi terbaik dari perguruan tinggi.

Termasuk dalam fasilitasi ini adalah pemerintah membantu untuk memastikan bahwa produk inovatif perguruan tinggi memiliki kesiapan yang cukup sebelum dikomersilkan. Dalam pengukuran tingkat kesiapan inovasi ini sebuah produk harus mempunyai Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) level tertentu. Agar siap memasuki pasar, bertahan dan berkelanjutan, TKT yang diharapkan harus lebih besar dari 7 (TKT >7).

Kebijakan ini merupakan satu terobosan yang patut diapresiasi. Perguruan tinggi diharapkan lebih masif bertegur sapa dengan mitra *triple helix* maupun *penta helix* dan melakukan kerja sama. Perguruan tinggi cenderung bak institusi yang asyik dengan dirinya sendiri bagaikan menara gading. Dengan fasilitasi kerja sama ini, semoga perguruan tinggi bisa menjadi tulang punggung inovasi nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan MBKM mobilitas akademik mahasiswa untuk belajar tiga semester di luar prodinya juga akan berdampak pada inovasi. Mahasiswa mendapatkan pengalaman luar dan ril seperti pertukaran ide dan keahlian. Pengalaman ini, membuka cakrawala berpikir dan memperkaya keahlian mahasiswa. Pada gilirannya, hal tersebut akan menyumbang pada penguatan kapasitas mereka dalam penciptaan inovasi, ketika lulus kelak.



Menakar Daya Serap Lulusan

Perguruan tinggi sebagai pusat penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan produsen lptek dan Inovasi dituntut untuk semakin berkualitas dan relevan. Pemerintah menilai kualitas perguruan tinggi tidak hanya dari sisi input dan proses tapi juga dari mutu luarannya. Perguruan tinggi dengan luaran yang berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dimana hasilnya digunakan oleh masyarakat dan lulusannya tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum diserap oleh dunia kerja disebut sebagai kampus berkualitas.

Khusus untuk SDM yang berkualitas dan kreatif nampak dari daya saing lulusan di dalam dunia kerja, domestik maupun internasional. SDM yang berkualitas adalah SDM yang sudah dibekali dengan kemampuan *hard skill* dan *soft skill* yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Mereka juga disiapkan dengan kompetensi global. Dinilai semakin berkompeten bila lulusan bisa memenangkan persaingan dalam bursa tenaga kerja terdidik. Tentu saja kualitas lulusan ini bisa dilihat dari kreativitasnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan atau berwirausaha.

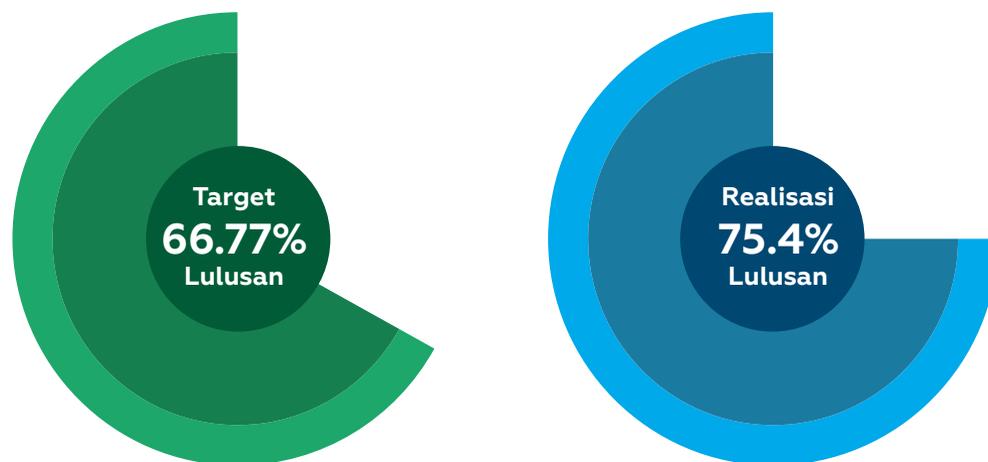
Ditjen Dikti mengembangkan alat ukur kualitas dan relevansi lulusan tersebut. Salah satu indikatornya adalah persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu satu tahun. Daya serap ini menjadi *proxy* untuk menyatakan bahwa proses pendidikan perguruan tinggi sudah sesuai dengan kebutuhan kerja (*link and match*). Lebih spesifiknya dalam dokumen perencanaan strategis Ditjen Dikti, indikator ini dijadikan sebagai ukuran kinerja sasaran strategis kualitas pembelajaran dan relevansi perguruan tinggi.

Menghasilkan lulusan yang siap bekerja adalah bentuk pertanggungjawaban publik suatu kampus. Kampus yang baik akan selalu memperbaiki proses pendidikan dan pembelajaran berdasarkan data serapan lulusan. Selain itu, perguruan tinggi mendengarkan kepuasan pemakai lulusan. Peluang kerja akan menjadi pertimbangan bagi calon mahasiswa untuk memilih suatu Program Studi (Prodi) dan termasuk juga perguruan tinggi, karena ini menyangkut karir dan masa depan mereka. Setali tiga uang, nasib suatu kampus akan ditentukan oleh kinerja daya serap lulusannya di dunia kerja.

Pendidikan tinggi memiliki mandat untuk mencetak SDM Indonesia yang unggul. Ini adalah salah satu misi utama dari perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi diharapkan menjadi warga negara terdidik, pemimpin bangsa dan sumber daya manusia yang berkualitas dan kreatif.

Memperhatikan data persentase lulusan PT yang bekerja dalam waktu satu tahun ada tren yang menggembirakan. Data menunjukkan kenaikan persentase lulusan yang bisa langsung bekerja. Ditargetkan pada 2020 lulusan yang bisa langsung berkiprah dalam dunia kerja sebanyak 66,77 persen. Realitasnya adalah sebanyak 75,4 persen lulusan tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk langsung bekerja.

LULUSAN YANG LANGSUNG BEKERJA PADA 2020



Tracer Study ini adalah kebijakan baik yang harus dikerjakan perguruan tinggi. Hasil dari studi ini bisa menjadi masukan bagi satuan pendidikan tinggi untuk memperbaiki kualitas proses pendidikan.

Pencapaian ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari andil intervensi kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan penelusuran lulusan Tracer Study (TS). Perguruan tinggi diamanahkan untuk memantau lulusannya, dua tahun setelah kelulusan. Upaya tersebut dilakukan secara sistematis dan hasilnya dilaporkan ke Ditjen Dikti. Kampus harus melihat bagaimana profil lulusannya, kesesuaian antara pekerjaan dengan latar belakang ilmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum mereka bekerja dan termasuk umpan balik dari pengguna lulusan.

Tentu saja, **informasi TS bisa menjadi panduan untuk memperkecil gap antara kompetensi yang disiapkan dan kebutuhan skill di dunia kerja.** Sehingga, transisi mahasiswa memasuki dunia kerja bisa dipantau. Ringkasnya, relevansi satu perguruan tinggi akan terpotret dari bukti empiris hasil TS ini.

Untuk turut memperkuat struktur ekonomi dan mengurangi pengangguran terdidik, pemerintah memfasilitasi munculnya wirausaha-wirausaha muda dari kalangan mahasiswa dengan menyelenggarakan program kewirausahaan mahasiswa. Kesungguhan untuk melahirkan wirausaha baru ditunjukkan dengan adanya pendampingan melekat oleh praktisi/pengusaha sebagai mentor dan *coach bisnis*. Program ini kini menjadi salah satu program MBKM.

Selain itu mahasiswa harus kreatif dan inovatif. Kreativitas ini merupakan penjelmaan dari matangnya tiga faktor utama dalam diri mahasiswa yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mengasah kreativitas ini, Ditjen Dikti mempunyai program kegiatan yang sangat terkenal yaitu Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai kematangan kreativitasnya.

Intervensi kebijakan lain adalah pengembangan program kegiatan kewirausahaan mahasiswa, kreativitas mahasiswa, bahkan untuk perguruan tinggi di daerah tertinggal diselenggarakan program *Recognition of Prior Learning* (RPL).



Kesejahteraan Lulusan Perguruan Tinggi

Menjadi sarjana diyakini sebagai jalan untuk memperbaiki taraf kehidupan. Berbagai studi memang menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara tingkat pendidikan tinggi dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi upah yang diterimanya. Tentu ada variasi pendapatan antara berbagai pilihan jurusan dan lulusannya.

Tentu saja tidak ada peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur gaji berdasarkan strata pendidikan. Upah Minimum Regional (UMR) biasanya dijadikan sebagai acuan bagi pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan gaji kepada para pegawai. Undang-undang menjamin hak buruh memperoleh kehidupan yang layak melalui instrumen UMR ini.

Pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang yang memberikan nilai balik. Selama di bangku kuliah, ada pengorbanan dana dan kesempatan memperoleh penghasilan yang hilang. Adalah wajar jika lulusan mengharapkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Lulusan perguruan tinggi adalah aset bangsa dan tenaga kerja terampil. Mereka adalah bagian kecil dari populasi angkatan kerja yang beruntung mengenyam pendidikan tinggi. Jika disiapkan dengan baik, perusahaan dan perekrut lainnya tidak perlu lagi melakukan *re-training*.

Jika menilik data survei angkatan kerja nasional (Sakernas yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun mengafirmasi hubungan positif antara tingkatan pendidikan dan jumlah upah.

Ditjen Dikti menggunakan ukuran daya saing dan kualitas lulusan berdasarkan UMR. Lebih spesifiknya Ditjen Dikti memanfaatkan persentase lulusan PT dengan gaji minimum sebesar 1.5 x UMR sebagai parameter. Semakin banyak proporsi lulusan yang menerima di atas UMR, berarti lulusan memiliki daya saing dan selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertanyaannya adalah apakah gaji lulusan perguruan tinggi sudah di atas UMR. Dalam rencana strategis 2020-2024, ditargetkan bahwa pada tahun 2020, untuk persentase lulusan pendidikan tinggi yang telah bekerja dan mendapatkan gaji

Data Sakernas 2020, misalnya, menunjukkan bahwa upah buruh/pekerja berpendidikan tinggi masih di atas buruh/pekerja berpendidikan di bawah perguruan tinggi.

minimum sebesar 1,5 X UMR ditetapkan sebesar 30 persen. Seperti terlihat dari grafik, target hampir terealisasi seperti yang diharapkan. Pada tahun 2020, persentase capaian lulusan pendidikan tinggi yang telah bekerja dan mendapatkan gaji minimum sebesar 1,5 X UMR baru sebesar 28,1 persen. Berarti pencapaiannya telah mencapai 93,6 persen.



Informasi mengenai persentase lulusan pendidikan tinggi yang telah bekerja dan mendapatkan gaji minimum sebesar 1,5 X UMR tersebut berdasarkan Laporan Tracer Study (TS) perguruan tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan TS (Periode TS-2).

Informasi ini juga menunjukkan bahwa masih terjadinya ketimpangan antara profil kompetensi lulusan PT dengan kebutuhan dunia kerja yang sangat dinamis. Fakta ini seharusnya mendorong perguruan tinggi untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan dan pengajarannya agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu, tidak ada pilihan kecuali perguruan tinggi harus bertegur sapa dengan dunia usaha dan dunia industri, termasuk juga dengan pemerintah sebagai pemakai luaran.

Untuk menyiasatinya, pemerintah mengamanahkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan uji kompetensi lulusan. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa lulusannya harus memiliki kompetensi yang memiliki standar kompetensi kerja.

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara, harus menjalin kerja sama dengan Lembaga profesi, Lembaga pelatihan, dan Lembaga sertifikasi. Mahasiswa yang lulus mendapatkan sertifikat uji kompetensi.

Menimba Pengalaman di Luar Kampus

Hak ini menjadi salah satu bagian dari kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Secara resmi kebijakan ini diluncurkan pada 24 Januari 2020.

Dulu tak terbayangkan salah satu jawaban persoalan relevansi perguruan tinggi adalah keluwesan belajar bagi mahasiswa di luar almamaternya. Kini, itu menjadi hak mahasiswa untuk merasai belajar selama tiga semester di luar Program Studi (Prodi) dan kampusnya. Beberapa perguruan tinggi bahkan menjadikan hak ini sebagai kewajiban. Mahasiswa difasilitasi dan didorong untuk mengenyam berbagai pengalaman belajar di luar, untuk memperkuat kompetensinya sebelum memasuki dunia kerja.

Dari berbagai rujukan peraturan perundangan yang mengatur, kita jadi mengerti nalar dari kebijakan ini. Saat ini, dunia berubah sangat cepat dan perubahannya mendisrupsi segala sendi kehidupan termasuk dunia kerja. **Dunia kerja industri 4.0 mewajibkan semua lulusan harus punya kesadaran akan teknologi dan digital literasi. Beberapa profesi pekerjaan akan hilang dan persaingan akan sangat ketat di bursa kerja.**

Kampus sebagai “Kawah Candradimuka” yang mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) harus menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif dan fleksibel. Salah satunya adalah memberi kesempatan mahasiswa selama tiga semester belajar di luar Prodi. Paling tidak, ada delapan kegiatan MBKM yang akan memperkaya pengalaman dan menambah kompetensi mahasiswa.

Delapan kegiatan tersebut adalah magang/praktek kerja; proyek di desa; mengajar di desa; pertukaran pelajar; penelitian atau riset; kegiatan wirausaha; studi atau proyek independen; dan proyek kemanusiaan. Jika kita perhatikan seksama kebijakan MBKM ini, esensinya secara institusi adalah kerja sama dan kolaborasi. Perguruan tinggi dituntut untuk bertegur sapa dan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lain.

Mendapatkan pengalaman di luar prodi dan kampus diatur dengan prinsip fleksibilitas dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Ini adalah unsur esensialnya. Tentu saja kebijakan ini juga berpusat kepada mahasiswa bukan tanpa arah. Mahasiswa didampingi oleh dosen mentor yang siap memandu. Antara perguruan tinggi atau pemangku kepentingan lain yang terlibat, harus saling bekerja sama dalam menjamin kualitas pembelajaran merdeka belajar ini.

Ditjen Dikti menargetkan pada 2020, sebanyak

30%

lulusan mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus.

Penelusuran dan sumber datanya adalah berdasarkan analisis hasil *Tracer Study (TS)* kampus. Secara logika sederhana, tentu saja kita jadi mafhum bahwa pemerintah belum menargetkan terlalu tinggi, karena kebijakan ini sebelumnya masih bersifat sukarela. **Namun sejak beberapa tahun lalu, program rintisan Kampus Merdeka mulai marak diselenggarakan. Saat ini, baru diperkuat dengan kebijakan MBKM.**

Untuk program baru, angka capaiannya cukup memuaskan,

26%

Lulusan telah berpengalaman belajar di luar kampus.

Di atas segalanya, program MBKM semisal pemberian kesempatan untuk belajar di luar Prodi ini akan membuka wawasan dan cakrawala berpikir mahasiswa.

Setidaknya informasi ini menjadi titik tolak (*baseline*) bagi program MBKM yang sekarang masif dikembangkan oleh perguruan tinggi. Selain itu, informasi pengalaman belajar di luar kampus juga membuka cakrawala kita bahwa Ditjen Dikti memiliki banyak program mobilitas mahasiswa yang telah berjalan. **Misalnya program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit (PERMATA-SAKTI) yang memfasilitasi kampus di seluruh Indonesia untuk saling menerima dan mengirim mahasiswa untuk menempuh perkuliahan/praktek/skripsi/magang pada Prodi yang sama atau berbeda selama satu semester penuh.**

Selama ini banyak pengguna lulusan mengeluhkan kemampuan berpikir logis dan kreatif lulusan perguruan tinggi yang hanya melihat sesuatu dengan kaca mata kuda (*vision of tunnel*) dari Prodi nya, karena kurangnya mobilitas akademik. Kini, diharapkan mahasiswa bisa melepaskan hal tersebut dan melihat persoalan dari perspektif lain, serta terbiasa bekerja secara tim, dengan rekan yang berbeda latar belakang keilmuan.



Sitasi, Pengakuan Mutu Publikasi Ilmiah

Ilmuwan Indonesia dalam dasawarsa terakhir tidak lagi bisa disebut terisolasi dari jaringan ilmuwan global. Hal ini bisa dilihat dari naiknya jumlah publikasi artikel ilmiah ilmuwan Indonesia di jurnal bereputasi dunia. Pada tahun 2019 misalnya ada 35.834 jumlah publikasi artikel. Produktivitas ini semakin naik pada tahun 2020, yaitu 47.254 artikel. Ini jauh melampaui target yang dibuat yaitu sebanyak 35.000 artikel. kontribusi ilmuwan Indonesia ini tentu saja patut diapresiasi.



Jumlah publikasi artikel ilmiah ilmuwan Indonesia di jurnal bereputasi dunia.

Pada 2020 jauh melampaui target yang dibuat yaitu sebanyak 35.000 artikel.



Patut kita apresiasi karena untuk dapat terbit, sebuah artikel pasti melewati proses yang panjang. **Bermula dari penelitian sampai pada publikasi, artikel melalui proses peer review yang ketat. Saringan seperti inilah yang membuat informasi sebuah karya ilmiah nilainya berbeda dengan kajian-kajian nonilmiah.**

Akan tetapi, kuantitas saja tentu tidak cukup. Hal yang juga penting adalah dampaknya terhadap pengembangan tubuh ilmu pengetahuan. **Indikator yang disepakati oleh ilmuwan dunia untuk menakar impact sebuah karya adalah pengutipan atau sitasi.** Pada aras inilah kualitas sebuah publikasi akhirnya dinilai. Publikasi yang diapresiasi dan dikutip biasanya jika dipublikasikan di jurnal bereputasi dunia atau ditulis bersama dengan ilmuwan yang dirujuk di bidang keilmuannya.

Karya ilmiah yang baik adalah karya yang dibaca dan dikutip. Semakin banyak karyanya dirujuk oleh rekan sejawat dan komunitas akademik global lain, maka sebuah karangan faktual dianggap memiliki pengaruh. Artinya pengutipan adalah bentuk rekognisi dan pangakuan. Karya yang disitasi dianggap berkontribusi untuk pengembangan keilmuan. Semakin tinggi indeks pengutipannya, maka semakin tinggi pula kaliber dan pengaruhnya sebagai seorang ilmuwan.

Berdasarkan nalar pemikiran itu, **Ditjen Dikti menjadikan jumlah sitasi per dosen sebagai informasi penting dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi Indonesia.** Sitasi ini dihitung secara akumulatif dari artikel, *proceeding* atau *book chapters* yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terindeks di sistem indeks internasional yang bereputasi semisal Web of Science, Thomson Reuters dan Scopus.

Tahun 2020 Ditjen Dikti menargetkan dari seluruh artikel yang dipublikasikan, angka sitasinya adalah 42.821 kutipan. akan tetapi target ini tidak tercapai. Capainnya hanya 46 persen dari target yang diharapkan. Rendahnya angka sitiran ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, semisal kualitas artikel, mutu jurnal dan sebagainya.



Target tahun 2020
sitasi dari seluruh artikel
yang dipublikasikan
adalah

42.821
kutipan.



Sitasi yang ditargetkan
Hanya tercapai

46%

Jurnal bereputasi dunia dilihat dari jumlah rata-rata sitirannya atau juga dikenal dengan *impact factor*. Semakin tinggi jumlah sitirannya semakin tinggi pula reputasi suatu jurnal.

Selain itu, Ditjen Dikti juga mendorong dosen untuk mempublikasikan karya kolaboratif dengan ilmuwan dengan kutipan tinggi (*highly cited scholar*). Umumnya ilmuwan seperti ini adalah mereka yang selalu dirujuk pemikirannya. Otomatis dengan strategi seperti ini, maka angka penyitiran juga akan tergeret naik.

Karena rezim *publish or perish*, semua dosen harus punya publikasi. Ditambah lagi publikasi merupakan syarat kenaikan pangkat seorang dosen. Karena tuntutan ini terkadang dosen berpikir pragmatis dan tidak melihat kualitas suatu jurnal. Tingginya kebutuhan publikasi banyak juga dimanfaatkan oleh jurnal predator yang tidak lagi mengindahkan kaidah akademik. Sikap pragmatis lain yang acapkali menghinggapi insan akademisi adalah masih adanya praktik plagiarisme. Khusus yang terakhir ini, pemerintah menindak tegas para pelakunya.

Ditjen Dikti memberikan defenisi yang jelas terkait jurnal internasional ini. **Jurnal yang baik adalah diantaranya memiliki terbitan versi online, dewan redaksinya adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari empat negara, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari dua negara dan pastinya harus terindeks oleh data base internasional Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search dan seterusnya.**

Karena sitasi sangat tergantung pada kualitas artikel yang dipublikasikan, maka Ditjen Dikti juga mendorong perguruan tinggi untuk mempublikasikan artikelnya di jurnal yang bereputasi dunia.



Perguruan Tinggi, Motor Penggerak Daya Saing Bangsa

Perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat krusial dalam memperkuat sistem inovasi nasional dan struktur tenaga kerja yang berdaya saing. Harapannya adalah kebijakan penguatan kapasitas dan produktivitas inovasi dari perguruan tinggi mengalir ke hulu industrialisasi dan memacu daya saing sektor industri. Di samping itu, peranan SDM yang produktif serta kreatif tetap menjadi tumpuan bagi perekonomian negara. Kebijakan untuk memaksimalkan kontribusi pada dua aras ini diharapkan bisa mendorong perguruan tinggi untuk selalu memperbaiki kualitas tridarma.

Kinerja inovasi yang bergerak positif memberikan angin segar dan harapan untuk Indonesia maju. Covid-19 tidak menghalangi civitas academica untuk tetap berkarya bahkan semakin memacu kreativitas dan inovasi mereka. **Jumlah artikel ilmiah, Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan, dan prototipe penelitian dan pengembangan dan lain sebagainya semakin berkembang.** Harapannya adalah geliat inovasi ini semoga juga memberikan pengaruh pada rapor *Global Innovation Index (GII)* Indonesia.

Upaya ini bukan tanpa halangan dan rintangan. Perguruan tinggi Indonesia diharapkan membudayakan dan meningkatkan minat serta kemampuan menulis hasil penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pendidik harus tergerak dan termotivasi dalam melakukan penelitian, juga harus diiringi dengan minat untuk mendiseminasikan hasil penelitian, sehingga dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Di samping itu, masih banyak ditemui pelanggaran etika dan integritas ilmiah. Untuk penulisan dan publikasi artikel ilmiah, **Ditjen Dikti telah memberikan berbagai fasilitas klinik penulisan, hibah, insentif penulisan, melanggankan akses e-journal untuk memastikan kebaruan dalam meneliti, sosialisasi penegakan etika, serta integritas akademik.**

Penelitian yang baik tentu saja tidak hanya terpublikasi, tapi juga dikembangkan menjadi invensi yang berpotensi paten. Tantangannya, menumbuhkembangkan penelitian, publikasi, hingga menjadi sebuah kekayaan intelektual, berupa paten terdaftar. Pemerintah selalu berupaya memberikan insentif untuk tumbuhnya kesadaran dan motivasi peneliti agar bergelora menjadikan penelitiannya hingga mendapatkan paten.

Ditjen Dikti terus memberikan fasilitas bagi para penemu dengan dunia industri agar tercipta komersialisasi produk yang

telah memiliki paten. Komersialisasi dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain memberikan fasilitas terhadap tumbuhnya perusahaan-perusahaan rintisan baru (*start-up*), dan untuk tugas fasilitasi ini, pemerintah sudah menyediakan wadah Kedaireka.

Selain itu, menghasilkan lulusan yang profesional adalah bentuk pertanggungjawaban publik suatu kampus. Memperhatikan data persentase lulusan PT yang bekerja dalam waktu satu tahun, ada tren kenaikan yang menggembirakan. Gaji yang diterima lulusan juga dapat di atas garis upah minimum regional. Perguruan tinggi diharapkan terus memacu diri untuk menyiapkan lulusan yang memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang relevan dengan dunia kerja saat ini dan masa datang.

Mahasiswa bisa bertukar gagasan, lebih kreatif dan inovatif, serta mengalami langsung belajar dalam berbagai situasi dan pengaturan. Selain itu, berbagai program baik yang selama ini sudah berjalan seperti kewirausahaan mahasiswa, kreativitas mahasiswa, pertukaran pelajar nusantara, pekan ilmiah nasional pun terus digalakkan. Semua pengalaman pembelajaran seperti tersebut, menjadikan mahasiswa lebih siap memasuki dunia kerja.

Kalau kita lihat secara seksama, agar berdampak dan berkontribusi, perguruan tinggi harus membuka diri dan membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan. Kebijakan dan kegiatan Merdeka Belajar di kampus, semuanya juga mengandaikan adanya kerja sama lintas lembaga. Tantangannya kampus digalakkan dapat lebih gencar bekerja sama dengan dunia industri dan usaha. Diharapkan, kerja sama yang dulu bersifat sporadis dan temporer, tidak keberlanjutan, kini dapat secara simultan tumbuh dan terstruktur. **Ditjen Dikti menaruh harapan besar bahwa kebijakan dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka berjalan dengan baik dan dampaknya bisa dirasakan pada masa yang akan datang.**

Dengan semua perbaikan yang terus menerus dan disokong dengan asupan data dan informasi yang baik, maka program semisal penelusuran lulusan (*tracer study*) menjadi keharusan. Keduanya selalu diupayakan dikelola secara profesional, bukan

Dalam konteks ini, kebijakan pengalaman belajar di luar kampus untuk memperkuat kompetensi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja menjadi krusial. Program mobilitas mahasiswa untuk belajar di luar prodi adalah terobosan yang telah diapresiasi oleh banyak pihak.

sekedar formalitas. Dari hasil analisis *tracer study*, perguruan tinggi menjadi tahu profil lulusan mereka dan tingkat kepuasan pengguna pada aspek *hard skill* dan *soft skill*. Hasil ini akan memberikan timbal balik bagi peningkatan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas dan relevan.

Ujungnya adalah Indonesia yang semakin berdaya saing secara global dan keluar dari kategori sebagai negara berkembang (*middle income trap*). Kemudian masyarakat Indonesia menjadi semakin sejahtera. Hal tersebut hanya dapat terwujud jika perguruan tinggi dan seluruh konstituen inovasi berkolaborasi untuk menghasilkan produk inovasi yang bermanfaat bagi khalayak luas. Semua dapat terwujud dengan tekad kampus untuk terus memperbaiki diri dan memastikan luarannya memiliki relevansi tinggi serta manfaat besar bagi komunitas ilmiah dan masyarakat luas.





DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Kampus Merdeka

Bukan Sekadar Mimpi

Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perikehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai rakyat. Tuturan Ki Hadjar Dewantara ini bukan tanpa makna bagi sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sistem pendidikan terus didorong untuk mencetak sumber daya manusia yang menciptakan solusi bagi masalah kemasyarakatan. Rasian demi rasian itu pun diwujudkan dalam sebuah program bernama Kampus Merdeka.

Lewat satu tahun sejak Kampus Merdeka lahir sebagai anak kandung Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, program ini telah mendorong tercetaknya lulusan-lulusan baru yang lebih siap menyongsong dunia kerja dan memiliki kompetensi untuk memecahkan persoalan di level masyarakat. Dirancang sejak akhir 2019 dan terealisasi pada Januari 2020, Kampus Merdeka membuka peluang bagi para mahasiswa untuk belajar di luar universitas selama tiga semester.

Lewat program tersebut, mahasiswa Indonesia diberi akses untuk melakukan pertukaran pelajar dengan kampus lain, baik di luar pulau maupun luar negeri. Mahasiswa bisa melihat dunia pendidikan dari podium yang berbeda. Atau lebih luas, mahasiswa diberi kesempatan untuk magang di industri sampai ke kelas dunia. Berdasarkan data Forum Human Capital Indonesia, sepanjang 2018 hingga Juni 2020 telah terdapat 16.648 mahasiswa yang menjadi peserta Program Magang Bersertifikat.

Konsep Kampus Merdeka dibangun untuk meruntuhkan sekat-sekat antara akademik dan industri, riset dan pembelajaran, serta dinding pemisah antar fakultas dan program studi. Kampus Merdeka adalah sistem pendidikan tinggi yang memungkinkan para mahasiswa hingga dosennya berkolaborasi tanpa tembok penyekat.

Berbagai aturan dan insentif pun disusun selama 2020 untuk mewujudkan program yang mengutamakan kemerdekaan belajar mahasiswa ini. Setidaknya ada delapan jenis insentif keuangan yang digelontorkan pemerintah kepada perguruan tinggi negeri untuk memaksimalkan jumlah mahasiswa sampai dosen 'keluar' dari zona nyaman kampus guna mengikuti pelbagai proyek sosial dan bermitra dengan perusahaan nirlaba.

Di tengah perkembangan dunia yang semakin pesat berkembang, Kampus Merdeka telah membuka ruang pacu bagi akademikusnya untuk mengikuti perubahan. Arus perubahan sangat cepat bergulir dan penuh dengan kompetisi. Tanpa Kampus Merdeka, lulusan Indonesia akan ketinggalan dengan kebaruan teknologi dan iptek.

Melalui Kampus Merdeka, lulusan perguruan tinggi pun diharapkan memiliki dedikasi kuat untuk kemajuan bangsa, toleransi kebinekaan, dan kemanusiaan. Lulusan kampus juga digadagadangi memiliki karakter dan keterampilan pembelajar yang kuat dengan terus mempelajari hal baru dan menganyari pengetahuan. Sebab, saat ini dunia pendidikan tengah menghadapi tantangan masa depan yang penuh disrupsi. Dengan demikian, lulusan Indonesia bukan hanya siap bertarung di lapangan kerja, melainkan juga menciptakan lapangan kerja.

Tak cukup sumber daya manusianya, pemerintah pun mendorong perguruan tinggi untuk menjadi kampus berkelas dunia dan masuk dalam *500 top World Class University (WCU)*. Tujuannya bukan semata membawa kampus ke posisi teratas di daftar pemeringkatan, namun memberikan efek bagi mahasiswanya untuk lebih berdaya saing.

Pemerintah telah memilih metode *picking-up-the winners* atau memilih yang terbaik dari kampus yang sudah ada untuk dipacu menempati ranking teratas mengalahkan kampus-kampus yang lebih dulu berkaliber. Memang tak semua kampus harus menjadi WCU. Pemerintah pada 2020 mematok target tiga universitas terbaik nasional yang akan menempati daftar kampus berkelas dunia, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menempati 500 WCU. Target itu pun tercapai.

Kendati begitu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tak menutup kemungkinan bagi kampus-kampus terbaik nasional lainnya terus mengejar peringkat dunia. Ditjen Dikti pun mendorong dan memfasilitasi kampus untuk bersaing di matra global.